



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**
- 6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 bagi Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022.**
- 7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.**

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 di daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

- (1) Penjabaran RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub kegiatan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Juli 2023

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 667

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005



PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NO. 04 TAHUN 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024**

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan	I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu	II-1
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-11
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-27
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-68
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD/RPD.....	II-80
2.3. Permasalahan Pembangunan	II-116
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-116
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-119
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	III-1
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024	III-7
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-14
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-19
3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-24
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-7

4.2.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-7
4.2.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024	IV-11
4.2.3. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024	IV-14
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Kerangka Pendanaan	V-1
5.2. Program dan Kegiatan Prioritas	V-3
5.2.1. Program dan Kegiatan Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar	V-3
5.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	V-7
5.2.3. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan	V-12
5.2.4. Program dan Kegiatan Urusan Penunjang	V-14
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-3
BAB VII : PENUTUP	VII-1

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2024.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Eksistensi sistem perencanaan pembangunan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bertujuan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Kemudian dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Dalam menyusun RKPD ini digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan memperhatikan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Proses penyusunan dokumen RKPD 2024 ini, mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan; persiapan; rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Secara substansi, penyusunan RKPD mencakup; (a) analisis gambaran umum kondisi Daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah; (d) penelaahan Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan (k) perumusan rencana kerja, program dan pendanaan.

Dokumen RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2024. Proses penyusunan RKPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renja PD, secara simultan dan bersinergi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah :

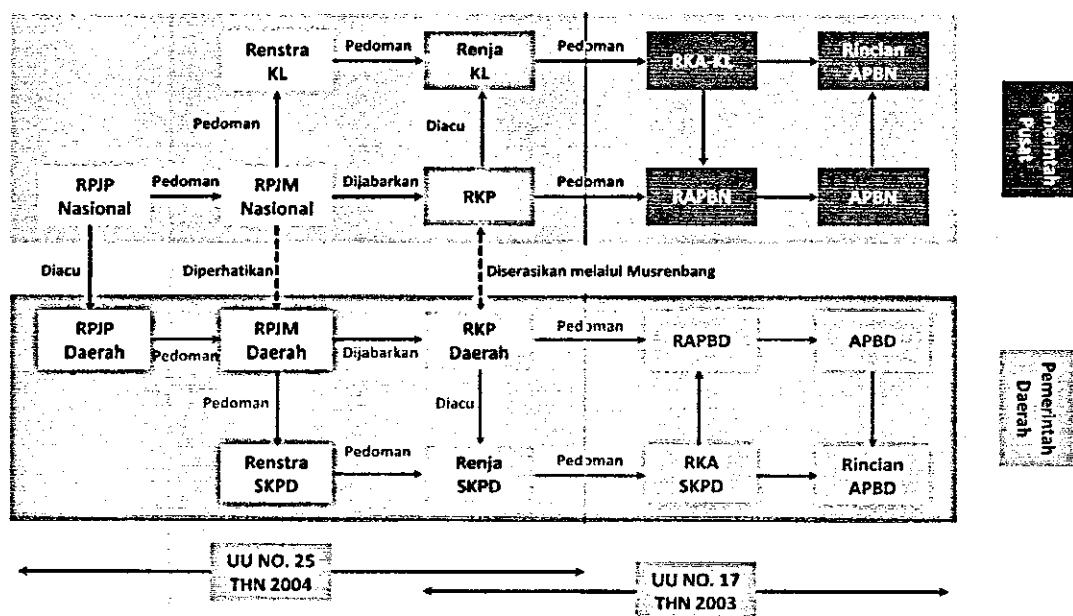
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Propinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 314);
 18. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Lampung Tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen.

RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sereta DPA Perangkat Daerah. Adapun hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 1.01.
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan
dan Penganggaran.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan.

A. Maksud Penyusunan.

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sinergisitas dan menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya pembangunan daerah.
2. Memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pringsewu maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.
3. Pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2024 sesuai RPD periode tahun 2023-2026;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi msyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD;

B. Tujuan Penyusunan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Pekon/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten.

4. Menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berupa program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2024.
5. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
6. Pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;

1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah :

BAB I : Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen.
- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan.
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

- 2.1. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu.
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2022 dan Realisasi RPJMD.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

- 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023
- 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.
- 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.
- 4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

- 5.1 Kerangka Pendanaan
- 5.2 Program dan Kegiatan Prioritas

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 6.1. Indikator Kinerja Utama

6.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII : Penutup.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kabupaten Pringsewu.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Administrasi.

Kabupaten Pringsewu dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung, yang terletak pada posisi 104°45'25" sampai dengan 105°4'42" Bujur Timur dan 5°9'10" sampai dengan 5°34'27" Lintang Selatan, persisnya di persimpangan jalan strategis nasional dan propinsi, sehingga Pringsewu berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki luas 617,19 km² atau sekitar 1,81% dari luas Provinsi Lampung. Wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan sepanjang 46,79 km, dan dari Timur ke Barat sepanjang 39,27 km. Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu terbagi 9 wilayah Kecamatan, 5 wilayah Kelurahan, dan 126 wilayah Desa atau Pekon. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Pagelaran Utara (158,19 km²), dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Ambarawa (33,11 km²). Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu secara lebih jelas, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.01
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu

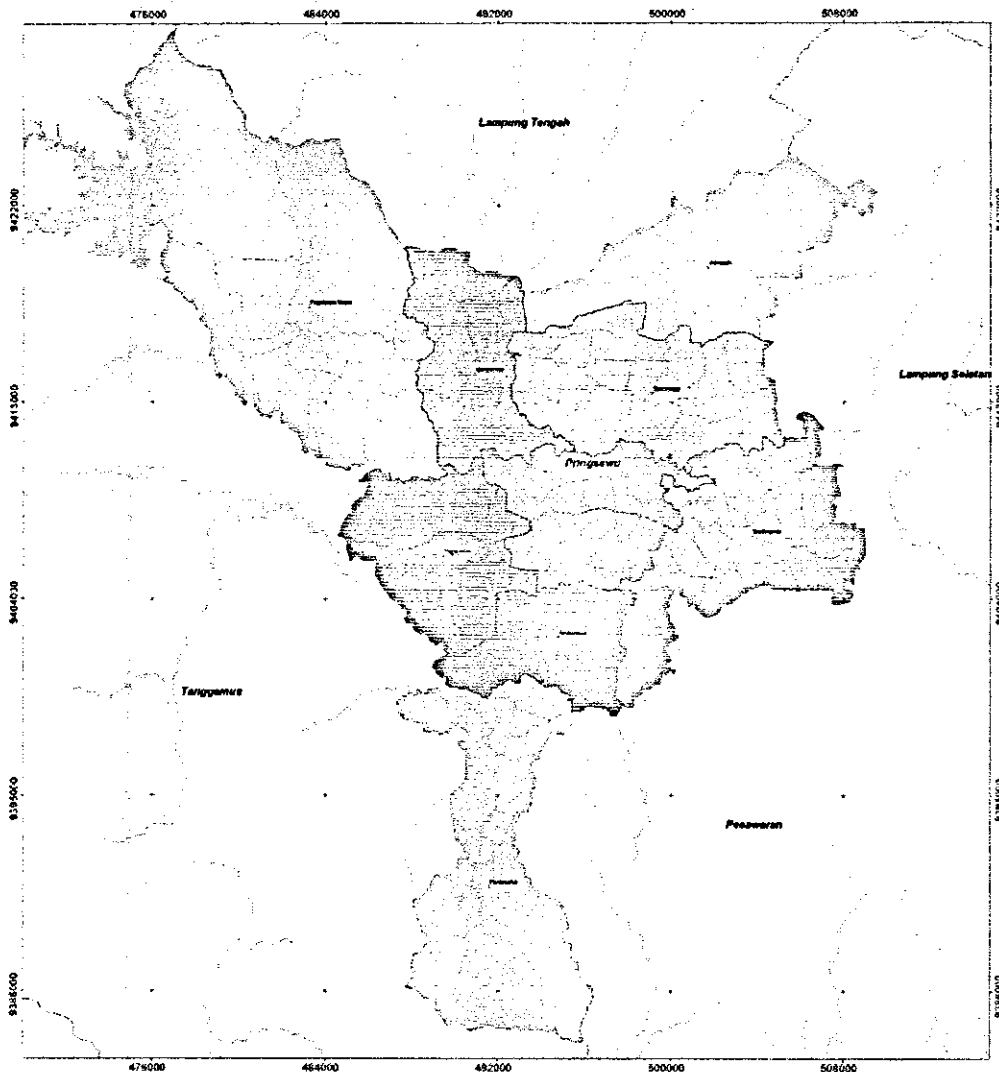
NO	KECAMATAN	LUAS (km²)	PROSENTASE
1	Pardasuka	87,31	14,15
2	Ambarawa	33,11	5,36
3	Pagelaran	48,42	7,85
4	Pringsewu	45,27	7,33
5	Gadingrejo	67,79	10,98
6	Sukoharjo	65,59	10,63
7	Banyumas	42,71	6,92
8	Adiluwih	68,80	11,15
9	Pagelaran Utara	158,19	25,63
Jumlah		617,19	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Panggung dan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus; Sebelah Timur

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu secara jelas, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar2.01
Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu



Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu 2023-2043

2.1.1.2. Kondisi Geografis.

A. Fisiografi.

Ditinjau dari fisiografi atau permukaan bumi, wilayah Kabupaten Pringsewu dibagi dalam enam grup fisiografi umum, mencakup group aluvial seluas 10.825,10 ha atau 17,32%; group dataran seluas 16.496,88 ha atau 26,39%; group perbukitan seluas 11.186,39 ha atau 17,90%; group vulkan seluas 12.566,95 ha atau 20,10%; group pegunungan seluas 10.538,41 ha atau 16,86%; dan group lainnya seluas 896 ha atau 1,43%.

B. Topografis.

1. Kemiringan Lahan.

Tingkat kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu yaitu kemiringan 0° – 3° sebanyak 17%; kemiringan 3° – 8° sebesar 25%; kemiringan 8° – 15° sebesar 19%; kemiringan 15° – 25° sebesar 18%; kemiringan 25° – 40° sebesar 3%; dan kemiringan diatas 40° sebesar 18%.

2. Ketinggian Lahan.

Tingkat ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pringsewu meliputi tingkat elevansi 0 m – 100 m dpl seluas 8.943,23 ha atau 14,31%; tingkat elevansi 100 m – 200 m dpl seluas 40.555,25 ha atau 64,88%; tingkat elevansi 200 m – 300 m dpl seluas 4.954,79 ha atau 5,99%; dan tingkat elevansi 300 m – 400 m dpl seluas 3.747,12 ha atau 5,99%.

C. Geologi.

Ditinjau dari segi geologi, di wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa formasi yang berasal dari masa tersier dan kuartar. Formasi terbesar adalah formasi lempung (Qtl) seluas 23.882 ha atau 38,21%, dan formasi terbesar kedua adalah formasi kompleks gunungkasih (Pzg) seluas 18.234 ha atau 29,17%. Selain itu terdapat formasi granit kapur (Kgr) seluas 1.981 ha atau 3,17%; formasi menanga (Km) seluas 202 ha atau 0,32%; formasi diorit sekampungterdaunkan (Kds) seluas 365 ha atau 0,58%; formasi gading (Tomg) seluas 367 ha atau 0,59%; formasi kasai (Qtk) seluas 2.112 ha atau 3,38%; formasi hulusimpang (Tomh) seluas 5.794 ha atau 9,27%; formasi aluvium (Qa) seluas 5.396 ha atau 8,63%; dan formasi batuan gunung api kuartar muda (Qhy) seluas 4.178 ha atau 6,68%.

D. Hidrologi.

1. Daerah Aliran Sungai.

Di wilayah Kabupaten Pringsewu hanya ada satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Way Sekampung. Dari DAS utama tersebut kemudian membentuk Sub DAS, yang meliputi Sub DAS Way Sekampung Anak yang memiliki areal seluas 12.575,90 ha; Sub DAS Way Bulok yang memiliki areal seluas 15.144,96 ha; Sub DAS Way Semah yang memiliki areal seluas 2.209,20 ha; Sub DAS Merabung Ilahan Saka yang memiliki areal seluas 20.081,02 ha; Sub DAS Way Tebu yang memiliki areal seluas 12.498,92 ha.

2. Sungai.

Kabupaten Pringsewu memiliki tujuh sungai yang meliputi Way Sekampung Bagian Tengah yang memiliki panjang 24 km dengan daerah aliran 600 km²; Way Gading yang memiliki panjang 7 km dengan daerah aliran 56 km²; Way Apus yang memiliki panjang 6,8

km dengan daerah aliran 5.440 km²; Way Wonokoro yang memiliki panjang 8,8 km dengan daerah aliran 7.040 km²; Way Wayah yang memiliki panjang 19 km dengan daerah aliran 380 km²; Way Sangsep yang memiliki panjang 17 km dengan daerah aliran 225 km²; dan Way Marga Harjo yang memiliki panjang 2,5 km dengan daerah aliran 15 km².

E. Klimatologi.

1. Iklim.

Rata-rata temperatur suhu di Kabupaten Pringsewu berselang antara 22,9°C – 32,4°C. Sedangkan rata-rata kelembaban-nya antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Kemudian rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs. Dengan karakteristik iklim tersebut, maka wilayah Kabupaten Pringsewu memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian.

2. Curah Hujan.

Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis. Data terkini dari BPS menunjukkan bahwa rata-rata curah hujan sepanjang 2019 berkisar 129 mm³/bulan, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu berkisar 389 mm³. Sedangkan intensitas hujan pada tahun 2019 berkisar antara 1 hingga 20 hari, dengan intensitas hujan tertinggi yaitu di Bulan Januari sebanyak 20 hari.

F. Penggunaan Lahan.

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pringsewu adalah tegalan yaitu seluas 17.227 ha atau 27,56%. Selain itu digunakan sebagai lahan sawah seluas 12.197 ha atau 19,51%, lahan perkebunan seluas 11.989 ha atau 19,18%, lahan hutan seluas 10.634 ha atau 17,01%, lahan permukiman seluas 9.547 ha atau 15,27%, dan lahan belukar seluas 917ha atau 1,47%.

2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043, disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu meliputi beberapa kawasan antara lain :

A. Kawasan pertanian.

Potensi pengembangan kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura dan kawasan pembangunan. Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan juga sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan Perda Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 8.145 hektar di seluruh kecamatan. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 4.479 hektar yang berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 6.660 hektar yang berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo.

B. Kawasan perikanan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 651 hektar yang terdapat di Kecamatan Pagelaran yang diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan sebagai Kawasan Strategi Kabupaten.

C. Kawasan pertambangan dan energi.

Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi di Kabupaten Pringsewu yaitu meliputi mineral batuan memiliki luas sebesar kurang lebih 236 hektar yang terdapat di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Sukoharjo.

D. Kawasan pariwisata.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Pringsewu terfokus pada Pengembangan yang terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya. Dimana kawasan pariwisata alam merupakan pengembangan dari obyek-obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pringsewu yang dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata alam terdiri dari Bukit Pangonan Talang Indah Pajaresuk dan Bukit Tursina di Kecamatan Pringsewu serta Talang Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran. Kawasan pariwisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gading Rejo, Makan Kyai Haji Gholib, Goa Maria padang Bulan, Rumah Adat di Margakaya yang terdapat di Kecamatan Pringsewu serta Rumah Adat di Kecamatan Pardasuka.

E. Kawasan permukiman.

Pengembangan kawasan permukiman yang meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 17.616 hektar. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan terdapat di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 6.010 hektar.

F. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan yang terdiri dari kompleks markas kepolisian Resor Pringsewu seluas kurang lebih 2 hektar di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gading Rejo, Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 hektar di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pagelaran Utara. Sedangkan kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer berada di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana.

Wilayah rawan bencana atau sering disebut kawasan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.

Ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana, diantaranya tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Terhadap bencana sendiri ada empat penanganan yang dapat dilakukan yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali.

Adapun kawasan rawan bencana sesuai dengan sumber data pada RTRW Kabupaten Pringsewu meliputi kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, dan kawasan rawan bencana gempa bumi. Kawasan rawan bencana banjir tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu. Namun beberapa kali banjir terjadi di Kecamatan Gading Rejo yaitu di Pekon Wates, Pekon Wates Selatan, Pekon Tambahrejo Barat serta di Kecamatan Pringsewu yaitu di Kelurahan Pringsewu Utara, Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Timur dan Kelurahan Pringsewu Utara. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Pardasuka seperti di Pekon Selapan. Sedangkan kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka.

2.1.1.5. Kondisi Demografi.

A. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pringsewu, diketahui selama lima tahun terakhir, penduduk Pringsewu di dominasi oleh kaum laki-laki. Rata-rata posisi sex ratio selama lima tahun terakhir (1917-2021) adalah sebesar 105,16. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.02
Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No	Tahun	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2018	203.282	193.937	397.219	104,82
2	2019	208.792	195.395	400.187	104,81
3	2020	208.763	196.703	405.466	106,13
4	2021	208.824	198.566	406.823	105,17
5	2022	210.015	198.400	408.415	105,85

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

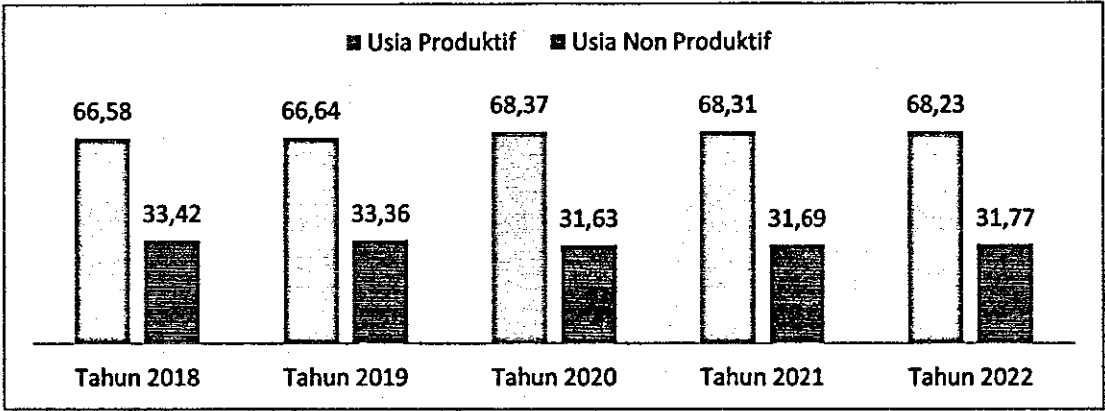
Kemudian jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, sejak tahun 2018 telah terjadi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (usia 15 s.d. 64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.03
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	0 - 4	34.372	34.144	34.636	34.197	33.835
2	5 - 9	37.258	37.609	35.396	35.294	35.066
3	10 - 14	35.905	36.733	32.451	32.511	32.701
4	15 - 19	33.587	33.846	34.214	33.746	33.375
5	20 - 24	28.768	28.964	34.408	33.804	33.200
6	25 - 29	28.093	28.219	31.469	31.187	30.934
7	30 - 34	29.150	29.322	30.615	30.443	30.226
8	35 - 39	30.269	30.490	29.944	29.981	30.052
9	40 - 44	30.590	31.155	29.152	29.321	29.436
10	45 - 49	26.912	27.808	27.428	27.861	28.296
11	50 - 54	23.086	23.895	24.311	24.809	25.326
12	55 - 59	19.316	20.185	20.303	20.852	21.387
13	60 - 64	14.690	15.595	15.368	15.888	16.444
14	≥ 65	25.223	26.443	25.771	26.929	28.137
Jumlah		397.219	400.187	405.466	406.823	408.415

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Gambar 2.02
Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.

Secara umum, persebaran penduduk memberi informasi mengenai lokasi tempat tinggal penduduk. Distribusi penduduk Kabupaten Pringsewu dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.04
Distribusi Penduduk Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	35.066	35.811	35.174	35.292	35.450
2	Ambarawa	34.852	35.914	36.387	36.509	36.635
3	Pagelaran	47.067	51.964	52.042	52.216	52.440
4	Pagelaran Utara	15.850	15.446	15.301	15.352	15.397
5	Pringsewu	84.088	81.745	81.776	82.050	82.377
6	Gadingrejo	74.482	76.705	77.727	77.987	78.293
7	Sukoharjo	49.315	50.019	49.704	49.870	50.072
8	Banyumas	20.959	21.352	21.292	21.363	21.442
9	Adiluwih	35.540	35.452	36.063	36.184	36.308
Jumlah		397.219	400.187	405.466	406.823	408.415

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sosial, diantaranya dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosialnya. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Pringsewu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.05
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan (Jiwa / Km ²)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	87,31	371	378	371,66	372,91	365,61
2	Ambarawa	33,11	1.125	1.159	1.174,15	1178,09	1.186,16

3	Pagelaran	48,42	649	717	718,12	720,52	726,25
4	Pagelaran Utara	158,19	158	154	152,58	153,69	153,31
5	Pringsewu	45,27	1.578	1.534	1.534,55	909,89	1.540,61
6	Gadingrejo	67,79	869	895	906,86	683,62	914,96
7	Sukoharjo	65,59	676	686	681,34	536,09	686,51
8	Banyumas	42,71	526	536	534,30	483,61	539,20
9	Adiluwih	68,80	475	474	482,00	153,09	484,23
Kabupaten		617,19	630	636	647	649	653,46

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

C. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah 0,636. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelahiran penduduk telah dapat dikendalikan. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.06
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	0,89	0,79	0,78	0,45	0,26
2	Ambarawa	0,75	0,66	0,64	0,45	0,58
3	Pagelaran	0,49	0,40	0,37	0,45	0,65
4	Pringsewu	0,99	0,90	0,87	0,44	0,27
5	Pagelaran Utara	1,05	0,95	0,93	0,45	0,23
6	Gadingrejo	0,70	0,60	0,59	0,45	0,51
7	Sukoharjo	1,03	0,93	0,91	0,45	0,43
8	Banyumas	1,03	0,93	0,92	0,44	0,52
9	Adiluwih	0,75	0,65	0,64	0,45	0,26
Kabupaten		0,84	0,75	0,73	0,45	0,41

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

A. Kesejahteraan Ekonomi.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan

R,S,T,U jasa perdagangan dan kegiatan Sosial	170,71	100,73	170,07	185,37	188,58
R,S,T,U jasa Lainnya	122,22	135,85	127,97	126,03	163,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.389,15	11.156,95	11.166,16	11.662,32	12.852,32

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar dimana dalam perhitungan ini

barang dan jasa. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pringsewu tercermin pada data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selama lima tahun (2018-2022), pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pringsewu selalumengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 mencapai 12,85 triliun rupiah, padahal pada tahun 2018 hanya mencapai 10,39 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.07
PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.634,67	2.728,00	2.805,34	2.811,32	3.073,72
B. Pertambangan dan Penggalian	11,33	11,89	12,35	11,77	12,37
C. Industri Pengolahan	1.616,58	1.742,50	1.667,98	1.776,44	1.855,40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,68	7,30	7,90	8,48	8,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	5,97	6,26	6,76	7,11
F. Konstruksi	1.257,73	1.353,15	1.313,39	1.442,95	1.579,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.439,36	1.599,90	1.534,85	1.650,22	2.023,97
H. Transportasi dan Pergudangan	470,71	512,28	503,48	523,19	670,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270,31	299,95	293,35	292,61	333,08
J. Informasi dan Komunikasi	572,73	622,51	675,47	702,15	710,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	419,66	435,49	447,75	484,90	507,54
L. Real Estate	395,68	442,35	439,82	447,87	474,77
M, N Jasa Perusahaan	26,27	27,57	27,40	27,90	33,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	444,12	465,70	491,93	511,14	517,34
P. Jasa Pendidikan	546,98	605,78	634,24	653,83	691,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,41	160,75	176,67	185,37	188,58
R,S,T,U Jasa Lainnya	122,22	135,85	127,97	126,03	163,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.389,15	11.156,95	11.166,16	11.662,32	12.852,32

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini menggunakan tahun dasar 2010. Berdasarkan harga konstan atau riel, PDRB di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun juga mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2022 mencapai 8,21 triliun rupiah, padahal pada tahun 2018 hanya sebesar 7,37 triliun

rupiah. Data pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.08
PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806,12	1.828,00	1.838,33	1.820,26	1.859,31
B. Pertambangan dan Penggalian	7,49	7,81	7,97	7,50	7,62
C. Industri Pengolahan	1.106,54	1.165,82	1.100,49	1.149,66	1.153,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,43	5,82	6,33	6,57	6,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,78	3,94	4,11	4,39	4,57
F. Konstruksi	910,96	965,15	941,44	998,29	1.034,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.142,35	1.220,60	1.147,22	1.212,53	1.371,79
H. Transportasi dan Pergudangan	332,07	359,41	346,03	353,34	407,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,31	185,01	179,66	178,17	197,73
J. Informasi dan Komunikasi	426,21	460,23	503,42	535,40	537,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	289,57	295,20	304,70	313,20	302,25
L. Real Estate	304,04	321,41	312,66	316,19	326,13
M, N Jasa Perusahaan	16,89	17,49	17,06	17,24	20,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	273,87	285,19	297,75	310,03	306,54
P. Jasa Pendidikan	382,72	413,53	427,68	432,60	443,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,86	114,81	125,27	129,08	127,62
R,S,T,U Jasa Lainnya	85,29	92,09	87,55	85,72	106,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.370,49	7.741,50	7.647,66	7.870,13	8.214,16

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

2. Distribusi PDRB.

Distribusi PDRB menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), perekonomian di Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, yaitu kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), kategori C (Industri Pengolahan), dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.09
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pringsewu (Persen)
Tahun 2018-2022.

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92
B. Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
C. Industri Pengolahan	15,56	15,62	14,94	15,23	14,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	12,11	12,13	11,76	12,37	12,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,85	14,34	13,75	14,15	15,75
H. Transportasi dan Pergudangan	4,53	4,59	4,51	4,49	5,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,69	2,63	2,51	2,59
J. Informasi dan Komunikasi	5,51	5,58	6,05	6,02	5,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,90	4,01	4,16	3,95
L. Real Estate	3,81	3,96	3,94	3,84	3,69
M, N Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,25	0,24	0,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	4,17	4,41	4,38	4,03
P. Jasa Pendidikan	5,26	5,43	5,68	5,61	5,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,44	1,58	1,59	1,47
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,18	1,22	1,15	1,08	1,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu tahun 2022, dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu 23,92%, meskipun angka ini terus menurun selama lima tahun terakhir. Distribusi PDRB yang terus menurun dikarenakan luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan, lahan tidak digarap, anomalia musim/iklim, hama dan penyakit serta keengganan anak muda yang terjun dalam dunia pertanian. Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu memberikan peranan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten pringsewu tetapi distribusi PDRB sektor pertanian terus menurun selama 5 tahun terakhir. Penurunan nilai kontribusi dari sektor pertanian tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut merupakan faktor-faktor perubahan nilai kontribusi yaitu :

1. Musim/iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, anomali iklim di beberapa tahun terakhir sangat berdampak pada kualitas dan produktifitas hasil pertanian. Kondisi tersebut diperparah dengan temperatur dan

- curah hujan yang naik secara signifikan dibandingkan dengan kondisi iklim normal.
2. Banyak lahan tidak tergarap. Berdasarkan keterangan, salah satu faktor yang menyebabkan pemilik lahan enggan untuk mengusahakan lahannya adalah iklim. Kasus yang terjadi beberapa tahun ini akibat anomali iklim yang merupakan faktor pembatas menyebabkan petani tidak dapat mengolah lahannya untuk budidaya dan petani cenderung beralih ke pekerjaan lain.
 3. Tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya sudah berusia tidak produktif
 4. Hama, penyakit dan virus. Dalam melakukan budidaya sudah pasti ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang jika tidak dicegah atau ditanggulangi dengan baik akan menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas hasil sehingga produksi pertanian tidak optimal.

3. Laju Pertumbuhan PDRB.

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Data ini berguna untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pringsewu cenderung menurun, meskipun pada tahun 2020 mengalami koreksi -1,21 sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
 Harga Konstan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022.

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,85	1,21	0,57	-0,98	2,51
B Pertambangan dan Penggalian	6,71	4,31	2,03	-5,83	1,57
C Industri Pengolahan	6,13	5,36	-5,60	4,47	0,32
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,52	7,14	8,76	3,86	4,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,09	4,26	4,32	6,97	3,93
F Konstruksi	6,41	5,95	-2,46	6,04	3,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,85	-6,01	5,69	13,13
H Transportasi dan Pergudangan	6,85	8,24	-3,72	2,11	15,42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,55	9,27	-2,89	-0,83	10,98
J Informasi dan Komunikasi	8,21	7,89	9,38	6,35	0,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,95	3,22	2,79	-3,50
L Real Estate	3,70	5,71	-2,72	1,13	3,14
M, N Jasa Perusahaan	1,54	3,52	-2,46	1,04	16,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,13	4,41	4,12	-1,13

P Jasa Pendidikan	7,12	8,05	3,42	1,15	2,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	6,45	9,11	3,05	-1,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,20	7,97	-4,93	-2,09	24,62
LAJU PERTUMBUHAN PDRB	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

4. PDRB Per Kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tabel 2.11
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
1. Atas Dasar Harga Berlaku	10.389,15	11.159,04	11.166,16	11.662,32	12.852,32
2. Atas Dasar Harga Konstan	7.370,49	7.741,50	7.647,66	7.870,16	8.214,16
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
1. Atas Dasar Harga Berlaku	26.154,71	27.851,92	27.563,22	28.666,81	31.468,39
2. Atas Dasar Harga Konstan	18.555,24	19.346,34	18.974,21	19.345,42	21.236,03
Jumlah Penduduk	397.219	400.187	405.466	406.823	408.415
Pert. PDRB Per Kapita ADHK	4,14	4,26	-1,92	1,02	1,06

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

5. Laju Inflasi.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju inflasi di Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Kelompok Pengeluaran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bahan Makanan	3,37	3,50	3,06	3,12	1,88
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.	0,80	4,01	3,06	5,08	0,10
Perumahan.	0,47	1,68	0,75	3,55	0,59
Sandang.	1,54	6,29	1,09	2,73	0,14
Kesehatan.	0,87	4,18	3,09	2,57	0,33
Pendidikan, Rekreasi dan OlahRaga	3,49	1,09	1,85	-2,07	0,00

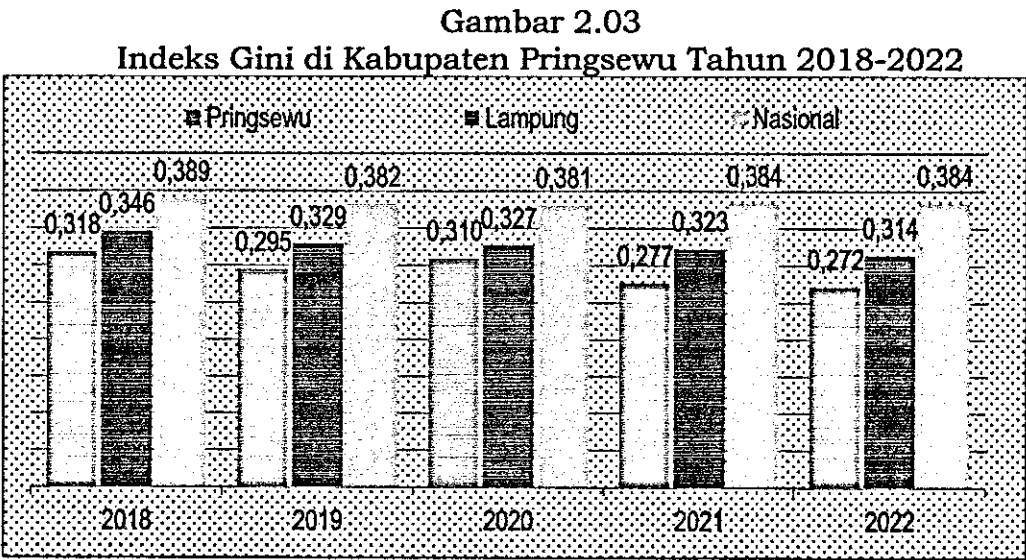
Transp, Komunikasi dan Jasa Keuangan.	1,48	-0,11	1,43	-1,59	0,13
Inflasi Kab. Pringsewu	1,77	2,73	2,72	2,74	5,37

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

B. Pemerataan Ekonomi.

1. Indeks Gini.

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Kriteria kesenjangan indeks gini di bawah 0,30 berarti ketimpangan rendah, indeks gini 0,30 sampai dengan 0,50 berarti ketimpangan sedang dan indeks gini di atas 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Kondisi ini berarti semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar. Sebaliknya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) capaian indeks gini Kabupaten Pringsewu bersifat fluktuatif, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2023.

2. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang di dasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum. Oleh karena itu diperlukan analisis pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Namun mengingat keterbatasan data, maka digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

Bila jumlah pengeluaran dari 40% penduduk berpendapatan rendah kurang dari 12% maka dikategorikan ketimpangan tinggi. Kemudian bila hasilnya antara 12% sampai dengan 17% maka dikategorikan ketimpangan sedang/menengah; dan bila hasilnya ternyata diatas 17% dikategorikan ketimpangan rendah. Hasil analisis pemerataan pendapatan versi bank dunia di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 menunjukan bahwa pengeluaran 40% kelompok terbawah sebesar 15,81%, pengeluaran 40% kelompok menengah sebanyak 28,44%, dan pengeluaran 20% kelompok tinggi sebesar 55,75%. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di Kabupaten Pringsewu adalah kategori sedang.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.

A. Kemiskinan.

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah seluruh penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan atas garis kemiskinan. Pperkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
1	2018	397.219	408.174	41.708	10,50
2	2019	400.187	422.691	41.047	10,15
3	2020	405.466	458.627	40.120	9,89
4	2021	406.823	475.983	41.040	10,11
5	2022	408.415	511.679	38.180	9,34

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 41.708 jiwa (10,50 persen) menjadi 40.120 jiwa (9,89 persen) pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 menjadi 41.040 jiwa (10,11 persen). Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang masih belum selesai penanganannya sehingga masih banyak masyarakat yang usahanya terdampak, terutama masyarakat yang berada di garis kemiskinan, statusnya turun menjadi dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 38.180 jiwa (9,34 persen).

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kemiskinan dapat di ukur dengan Indeks kedalaman kemiskinan (P1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu juga diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai dari P1 dan P2 dipengaruhi oleh nilai garis kemiskinan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan di Pringsewu adalah Rp. 408.174 perbulan per jiwa. Selanjutnya setiap tahun dinaikan dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 511.679 perbulan. Dengan kenaikan tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga ikut bergerak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	(P1)	(P2)	Garis Kemiskinan
2018	41.708	10,50	1.44	0.31	408.174
2019	41.047	10,15	1.13	0.21	422.691
2020	40.120	9,89	1.20	0.21	458.627
2021	41.040	10,11	1.38	0.26	475.983
2022	38.180	9,34	1,07	0,19	511.679

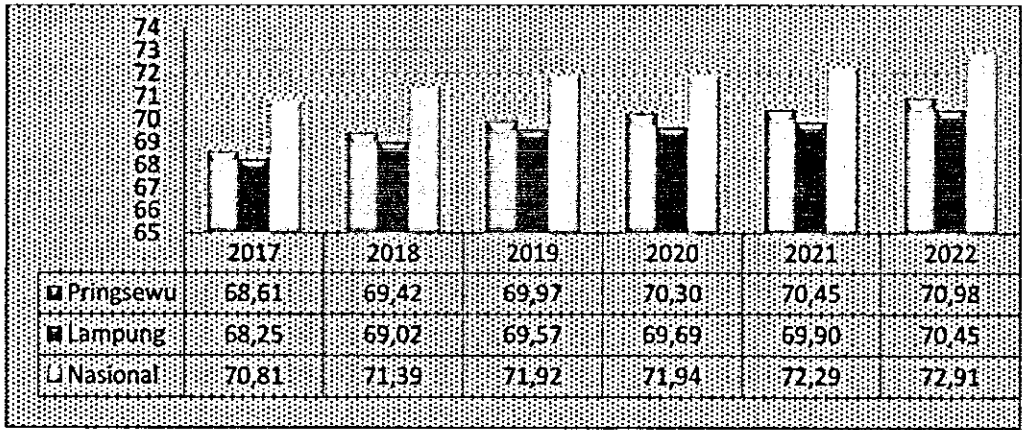
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

Kabupaten Pringsewu tahun 2022 angka kemiskinannya menurut BPS sebesar ,1,1% dan ditargetkan 0% pada tahun 2024 sesuai target dari Program Nasional. Kabupaten Pringsewu melalui SK Bupati Pringsewu Nomor: B/342/KPTS/B01/2023 telah menetapkan 1176 KK dengan irisan 117 keluarga stunting didalamnya sebagai sasaran program Kemiskinan ekstrem.

B. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung, namun relatif rendah jika dibandingkan IPM Nasional. Adapun perbandingan antara IPM Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.04
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

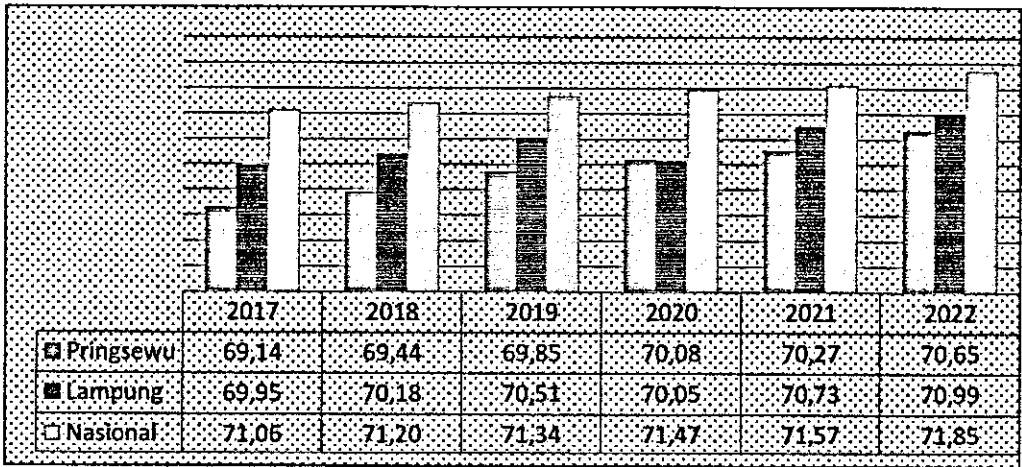


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

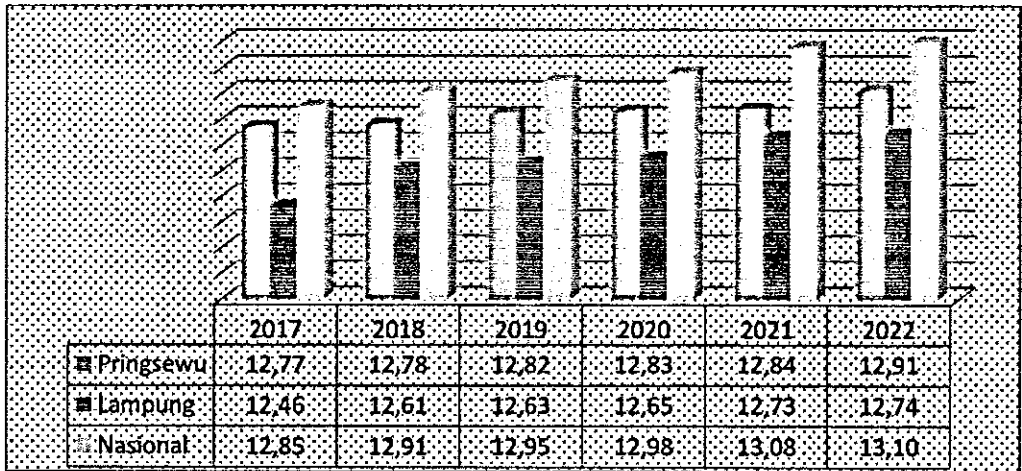
Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup. Indikator dari bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara unsur dari bidang perekonomian, indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Dengan demikian maka kenaikan IPM juga ditentukan dengan adanya kenaikan pada unsur pembentuknya. Adapaun perkembangan masing-masing unsur pembentuk IPM di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.05
Perkembangan Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2022

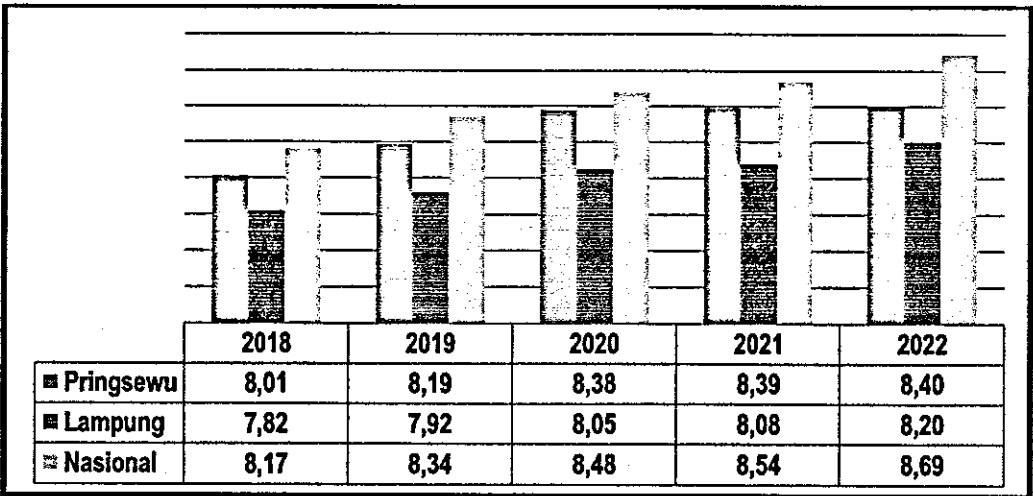
Angka Harapan Hidup



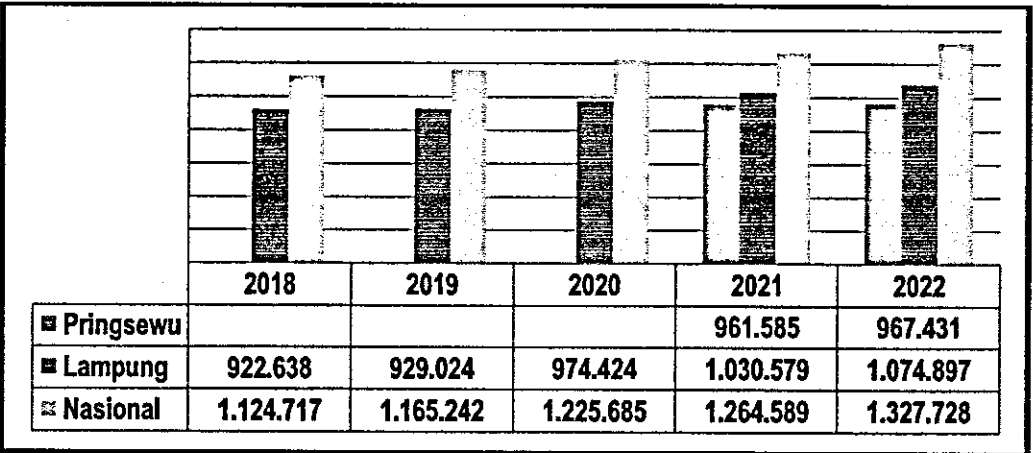
Angka Harapan Lama Sekolah



Rata-Rata Lama Sekolah



Pengeluaran Per Kapita per bulan



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

C. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan danketerampilan serta sikap manusia sehingga kualitas sumber daya manusiasangat tergantung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum dapatdikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan tingkatpendidikannya. Semakin tinggi

tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2		4	5	6	7
1	Angka melek huruf	97,15	97,25	97,24	97,28	96,90
2	Rata-rata lama sekolah	8,01	8,19	8,38	8,39	8,40
3	Angka harapan lama sekolah	12,78	12,82	12,83	12,84	12,91
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 12 Tahun.	100,00	100,00	99,99	96,49	96,49
5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13 – 15 Tahun.	99,08	99,25	98,64	80,59	87,73
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MTs.	106,68	116,50	104,89	103,39	104,10
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.	92,52	94,00	94,51	96,06	109,56
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,00	98,50	99,49	99,27	99,99
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	83,71	81,22	83,60	83,59	87,62

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 banyak capaian kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Pringsewu melampaui capaian provinsi. Tinggal beberapa indikator lagi yang masih dibawah capaian provinsi. Data capaian APM SD/MI yang lebih tinggi dari provinsi (Pringsewu sebesar 96,49% dan Lampung sebesar 78,97%). Untuk capaian angka melek huruf adalah 97,28%, lebih kecil dari provinsi sebesar 99,49%; rata-rata lama sekolah sebesar 8,39, lebih besar dari provinsi (8,08); angka harapan lama sekolah sebesar 12,84, lebih besar dari provinsi (12,73); APS usia 7-12 tahun 96,49% atau lebih kecil dari provinsi (99,53%); APS usia 13-15 tahun sebesar 80,59%, lebih kecil dari provinsi (85,14%); APK SD/MI sebesar 98,96% atau lebih besar dari provinsi (85,14%); APK SMP/MTs sebesar 82,66% atau lebih besar dari provinsi (75,96%); dan APM SMP/MTs sebesar 80,59% atau lebih besar dari provinsi (56,03%).

D. Kualitas Kesehatan.

Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat. Analisis kinerja dibidang kesehatan dilakukan terhadap indikator-indikator Angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk. Sebagai pencapaian indikator bidang kesehatan, sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 2.16
 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Pringsewu
 Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2		4	5	6	7
1	Angka Usia Harapan Hidup	69,44	69,85	70,08	70,27	70,65
2	Penolong kelahiran oleh tenaga medis	87,15	92,78	95,37	96,89	100
3	Angka kesakitan	12,59	13,83	16,80	44,2	20,5
4	Angka kelangsungan hidup bayi	99,08	99,04	98,80	99,30	99,38
5	Angka kematian ibu melahirkan	0,09	0,10	0,13	0,13	0
6	Prosentase balita gizi buruk	0,010	0,007	0,020	0,019	0,1

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Dari keenam indikator bidang kesehatan tersebut, beberapa indikator menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti AHH, prosentase penolong kelahiran oleh tenaga medis, angka kelangsungan hidup bayi dan prosentase balita gizi buruk. Dan masih ada indikator yang mengalami penurunan yang akan menjadi perhatian dalam pembangunan daerah di tahun 2023. Adapun angka kesakitan mangalami kenaikan disebabkan oleh perubahan musim yang tidak menentu dan efek virus covid-9, dengan 10 penyakit dengan jumlah kasus terbesar antara lain Dyspepsia 10.988 kasus, Myalgia 9.535 kasus, Gastritis 9.211 kasus, Influenza 8.379 kasus, Hyertensi esensial 7.551 kasus, Atritis Rematozoid 6.290 kasus, Rinitis Akut 6.003 kasus, Demam 5.423 kasus, Tension Headache 5.164 kasus, dan Dermatitis Atropik 4.682 kasus. Jumlah Kunjungan pasien ke Puskesmas dan Rumah sakit yaitu Rawat Jalan 561.269 kunjungan, Rawat Inap 44.243 kunjungan, dan Gangguan Jiwa 1.029 kunjungan. Khusus terhadap capaian indikator angka kematian ibu, nampaknya bersifat fluktuatif dan hal ini akan menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Adapun data kasus kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17
 Kasus AKI dan AKB di Kabupaten Pringsewu

Uraian	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu	137/100.00 0 KH	154/100.00 0 KH	151/100. 000 KH
Angka Kematian Bayi	11/1000KH	7/1000KH	7/1000K H

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 Jumlah Kasus kematian ibu berjumlah 151 dari 100.000 kelahiran hidup, sebagian besar penyebabnya adalah pendarahan dan eklamsi . Sedangkan jumlah Kasus kematian Bayi di Kabupaten Pringsewu berjumlah 7 kasus dari 1000 kelahiran hidup, sebagaia

n besar disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia

Isu penting lainnya yang akan menjadi perhatian serius yaitu adanya kasus stunting/bayi tumbuh pendek atau pertumbuhan bayi yang lebih rendah dari rata-rata. Berdasarkan data E PPGBM dari Dinas Kesehatan, diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 6,54 persen kasus stunting di Kabupaten Pringsewu yang tersebar diseluruh wilayah Desa atau Pekon. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pekon/desa dan kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022, pekon yang memiliki prevalensi stunting terbesar terdapat di Pamenang dengan besaran 26,94% dan diikuti oleh Pekon Pasir Ukir dengan angka 22,30%. Sedangkan lokasi fokus dengan prevalensi stunting dengan angka terkecil terdapat di Pekon Pujiharjo dengan angka 8,24%. Dari 131 pekon/desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Proingsewu, terdapat 20 pekon yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting, dengan rincian 9 lokasi fokus lanjutan dan 11 lokasi fokus baru.

Tabel 2.18
Prevalensi Stunting di Kabupaten Pringsewu

Tahun	Persentase (Data E PPGBM)	Persentase(Data SSGI)
2018	20,19	-
2019	17,76	-
2020	7,57	17
2021	6,54	19
2022	5,62	16,2

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Kasus TBC di Kabupaten Pringsewu terdiri dari TBC terkonfirmasi bacteriologis sebanyak 331 kasus , dengan tingkat kesembuhan 27,5%. Penanganan dan terapi TB selama 6 bulan sehingga tingkat kesembuhan pasien kecil dan pasien yang belum sembuh masih dalam penanganan di tahun 2023. Angka keberhasilan pengobatan (success rate/sr) semua kasus tuberkulosis adalah 92,7% dengan tingkat kematian 3,1% atau 17 jiwa. Hasil follow up kasus TB di Kabupaten Pringsewu adalah 91 orang pengobatan sembuh, 415 orang pengobatan lengkap, 17 orang meninggal. Angka Treatment Succes Rate TB di Kabupaten Pringsewu sebesar 93,76%. Untuk kasus hipertensi dapat dijelaskan bahwa penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 27.321 pasien / 34,9% dari estimasi penderita hipertensi > 15 tahun. Sedangkan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3.882 pasien / 78% dari estimasi penderita DM.

Dinas Kesehatan Pringsewu terus berupaya untuk meningkatkan
capaian

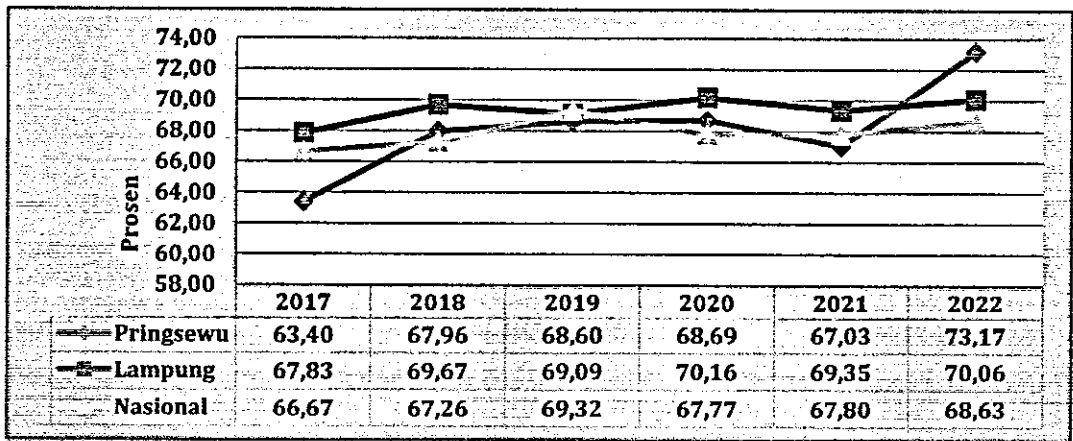
Universal Health Coverage melalui kegiatan seperti Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Tim percepatan pencapaian UHC Kab. Pringsewu, Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS, untuk kepesertaan PBI APBD, APBN, PPU, PBPUPU dan PU, agar tidak ada dobel data termasuk data peserta yang telah meninggal bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil, Melakukan pendataan per desa, masyarakat yang belum terdaftar peserta BPJS dan advokasi ke BPKAD untuk penambahan anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

E. Ketenagakerjaan.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila tingkat perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka terjadi peningkatan pengangguran. Adapun perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pringsewu, dapat diketahui dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Selama lima tahun terakhir (2017-2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu selalu meningkat. Namun peningkatan tersebut masih dibawah TPAK Provinsi Lampung dan Nasional. Perbandingan TPAK Pringsewu dengan Lampung dan Nasional, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.06
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

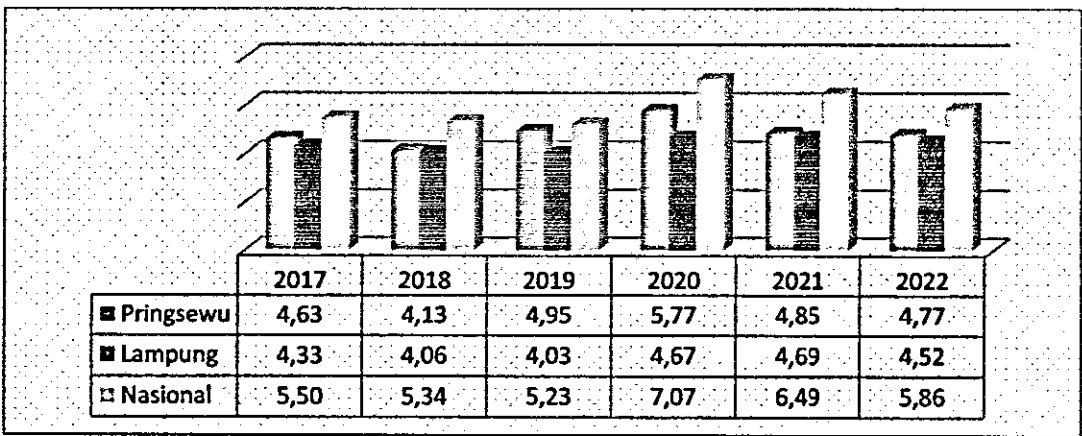


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

Kemudian terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan

perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. TPT di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan provinsi, namun masih lebih baik bila dibandingkan nasional.

Gambar 2.07
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

F. Pelayanan Publik.

Salah tugas Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Oleh karena itu maka sangat penting untuk mengetahui kinerja tersebut, terutama yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah, dan predikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun capaian kinerja terhadap tiga indikator pelayanan publik tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,50	79,61	81,15	84,50	85,41	85,10
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Predikat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	CC	CC	B	B	B	B

Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2023.

Dari ketiga indikator pelayanan publik tersebut, terhadap Nilai SAKiP dari Kementerian PAN RB, masih membutuhkan perhatian serius, meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2017.

G. Ketahanan Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Ketahanan Pangan berarti kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun capaian beberapa indikator ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,10	87,55	88,10	88,50	89,20	89,4
2	Ketersediaan Pangan Pemerintah	18,00	35,50	54,27	74,27	84,27	14,37
3	Ketersediaan Pangan Masyarakat	43,00	43,00	70,00	79,00	80,00	93,80
4	Kontribusi pertanian dan perikanan terhadap PDRB	25,81	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 adalah 89,4% atau telah mendekati sempurna (100%). Ini berarti bahwa pola konsumsi masyarakat telah semakin beragam antar kelompok pangan dan bergizi seimbang. Kelompok pangan tersebut meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain.

Kemudian cadangan pangan di Kabupaten Pringsewu juga selalu tersedia, dan selama lima tahun terakhir belum ditemui kasus kekurangan pangan secara signifikan. Disisi lain kontribusi pertanian dan perikanan juga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, meskipun terjadi tren penurunan, sebagai dampak adanya alih fungsi lahan untuk sektor yang lainnya.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.

A. Seni Budaya.

Pembangunan bidang seni budaya atau kebudayaan diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya

pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu berusaha melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kinerja pelestarian kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Jumlah group kesenian tradisional	276	325	357	357	342	342
2	Jumlah group seni kesenian musik.	24	27	31	31	31	31
3	Jumlah penyelenggaraan lomba dan festival seni serta budaya	4	6	6	1	2	2
4	Jumlah sarana pentas seni dan budaya	15	19	21	21	21	21
5	Jumlah benda sejarah	36	36	36	36	36	36
6	Jumlah kawasan cagar budaya	2	3	3	3	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

B. Olah Raga.

Sasaran utama olahraga pada dasarnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup manusia, baik yang menyakut kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konsteks ini maka pada dasarnya ada dua tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks perlombaan, maka tujuan utamanya adalah mencapai prestasi setinggi-tingginya. Namun dalam konteks kesehatan, maka pada dasarnya adalah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat, sehingga mampu untuk melaksanakan aktivitas secara produktif. Adapun kinerja bidang olah raga, dapat diketahui dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Jumlah organisasi olahraga	21	25	25	25	25	25
2	Julmah club olah raga	185	193	205	410	410	410
3	Jumlah gedung olahraga	26	31	33	36	36	36
4	Jumlah sarana atau lapangan olahraga	278	312	321	325	325	325
5	Jumlah pertandingan olahraga	7	7	9	9	9	9

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan.

Kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator makro yang dipakai secara nasional. Diantaranya adalah melalui rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, kondisi ruang kelas, Pendidikan Anak Usia Dini, angka putus sekolah (APS), angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah, guru berkualifikasi S-1/D-IV, dan jumlah guru yang telah bersertifikasi. Adapun capaian kinerja urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI	65,34	65,34	65,34	68,97	63,10	66,50
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs	33,33	33,33	33,33	33,44	37,81	33,83
3	Rasio guru terhadap murid SD/MI	66,67	66,67	66,67	66,67	64,35	56,25
4	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs.	71,43	71,43	71,43	71,43	69,30	45,21
5	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	71,41	71,43	71,43	50,00	78,88	67,85
6	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SMP/MTs	50,00	50,00	50,00	25,00	54,60	63,25
7	Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	29,12	29,45	29,50	29,68	31,28	28,79
8	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	18,86	20,00	20,50	21,08	19,63	48,92
9	Rasio murid Pendidikan Anak Usia Dini terhadap anak usia 4-6 tahun.	90,00	90,07	91,85	92,50	93,00	97,50
10	Rasio guru Pendidikan Anak Usia Dini	6,67	7,69	7,14	5,56	5,47	10,1
11	Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,82	0,59
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,82	0,59
13	Angka kelulusan SD/MI	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka kelulusan SMP/MTs	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	98,90	88,38	86,92

16	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	87,90	95,70	98,50	98,50	98,50	98,50
17	Prosentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV	78,68	81,50	83,33	90,48	94,73	96,42
18	Prosentase guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV	87,06	88,50	90,51	91,71	93,82	94,56
19	Kualifikasi guru SD/MI yang bersertifikat mengajar.	67,55	58,02	61,94	55,40	47,68	42,75
20	Kualifikasi guru SMP/MTs yang bersertifikat mengajar.	75,85	74,61	58,61	45,24	47,42	46,56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan diatur di dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasil Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
A.	SPM Pendidikan Anak Usia Dini				
1.	Peserta didik anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	100	10709	97.50	10441
2.	Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini meliputi buku gambar sebanyak 6 buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester dan 1 set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester dan diberikan pada setiap awal tahun;	100	10709	100	10709
3.	Kualitas Pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini;	100	1078	56.59	610
4.	Kualitas Pendidik yang memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini;	100	1078	16.51	178
5.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	274	71.17	195
6.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini memiliki sertifikat pendidik	100	274	28.10	77
7.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini yang telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang;	100	274	33.58	92

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasi Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
8.	Pemenuhan jumlah pendidik pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini dan 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini;	100	274	100	274
B.	SPM Pendidikan Dasar				
1.	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;	100	68916	97.50	67193
2.	Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik pertahun dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester yang diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik dan diberikan pada setiap awal tahun;	100	68916	100	68916
3.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1)	100	4601	95.50	4406
4.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki sertifikat pendidik	100	4601	44.65	2029
5.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).	100	395	100.00	395
6.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan	100	395	93.72	377
7.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah.	100	395	79.39	326
8.	Tenaga penunjang lainnya pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	395	75.69	299
9.	Pemenuhan jumlah pendidik pada Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar, jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan	100	395	100	395
10.	Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yaitu terdiri dari 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan dan 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan Pendidikan	100	395	100	395
C.	Pendidikan Kesetaraan				
1.	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	100	621	100	621

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasi Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
2.	Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik pendidikan kesetaraan yaitu 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	621	100	621
3.	Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan dengan kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	86	100	86
4.	Jenis tenaga kependidikan dengan kualitas tenaga kependidikan kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat;	100	11	100	11
5.	Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	100	86	100	86
6.	Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan dan 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan	100	11	100	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

B. Urusan Wajib Kesehatan.

Urusan wajib pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas pelaku pembangunan yangberdampak pada keberhasilan pembangunan. Selain itu juga berdampak pada kualitas bersaing dalam dunia kerja, sehingga mampu menempati posisi-posisi penting dalam dunia usaha dan ikut secara langsung mewarnai dunia kerja.

Indikator untuk melihat keberhasilan kinerja urusan wajib kesehatan, diantaranya adalah rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, pustu dan klinik per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga kesehatan dan lainnya, yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Posyandu per satuan balita	1,09	1,14	1,42	1,15	1,26	1,36

2	Ketersediaan fasilitas kesehatan.						
A	Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	7	7	7	7	7	7
B	Jumlah Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	13	13	13	13	13	13
C	Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	34	34
D	Jumlah Fasilitas Poliklinik / Rumah bersalin.	19	19	22	23	22	24
E	Jumlah fasilitas Apotek / Toko Obat.	41	45	45	47	66	85
3	Rasio Puskesmas Per 20.000 penduduk	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,61
4	Rasio Pustu Per 6.000 penduduk	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,47
5	Rasio Poliklinik dan Rumah Bersalin per 6.000 penduduk	0,32	0,32	0,37	0,34	0,33	0,34
6	Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	1,58	1,57	0,13	0,17	0,17	0,17
7	Rasio ketersediaan tempat tidur per 1.000 penduduk	0,18	0,18	4,94	1,42	1,38	1,33
8	Ketersediaan tenaga kesehatan.						
A	Tenaga Dokter	193	152	222	279	269	200
B	Tenaga Bidan	149	360	461	497	619	580
C	Tenaga Perawat	610	270	708	773	830	858
D	Tenaga Kesehatan Lainnya	83	137	892	992	880	981
9	Rasio Tenaga Dokter per 2.500 penduduk.	1,22	0,96	0,08	1,72	1,35	1,18
10	Rasio Tenaga Bidan per 1.000 penduduk.	0,38	0,91	0,46	1,22	1,51	1,37
11	Rasio Tenaga Perawat per 1.000 penduduk.	1,55	0,68	0,71	1,90	2,08	2,02
12	Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 1.000 penduduk	0,21	0,34	0,89	2,24	2,17	2,31
13	Cakupan Puskesmas	133,33	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44
14	Cakupan Puskesmas Pembantu	25,19	25,19	25,19	25,19	25,95	25,19
15	Cakupan Pekon yang melaksanakan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	100,00	90,80	85,00	93,94

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun Pencapaian SPM

Bidang Kesehatan di Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel.2.26
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator S P M	Sasaran	CAPAIAN					%
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Pelayanan Ibu hamil	7.013	1.370	1.379	1.533	2.230	6.512	92,9%
2	Pelayanan Ibu bersalin	6.694	1.348	1.484	1.512	1.620	5.964	89,1%
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	6.057	1.286	1.481	1.509	1.632	5.908	97,5%
4	Pelayanan Balita	30.968	5.762	4.643	6.304	3.657	20.366	65,8%
5	Pelayanan Kesehatan pd usia pendidikan dasar	61.400	-		31.165	12.849	44.014	71,7%
6	Pelayanan kesehatan pd usia produktif	259.751	6.991	7.341	8.825	51.477	74.634	28,7%
7	Pelayanan kesehatan pd usia lanjut	51.169	10.386	10.252	10.181	8.188	39.007	76,2%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	78.352	2.632	2.172	1.622	20.895	27.321	34,9%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4.975	1.118	1.067	700	997	3.882	78,0%
10	Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	696	428	113	-	48	589	84,6%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	5.549	1.247	660	1.912	1.730	5.549	100,0%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.785	1.112	1.475	1.779	3.419	7.785	100,0%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang kurangnya mendapatkan dukungan dana, Sumber Daya Manusia yang kurang dan petugas/pengelola program yang double job dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target salah satunya yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (28,70)%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi (34,90)% yang sangat jauh dari target. Ini antara lain disebabkan oleh pandem icovid-19, kurangnya Sumber Daya Manusia, petugas/pengelola program yang double job dalam pelaksanaan kegiatan/program. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan/program setelah pandemi covid-19 sudah teratasi dengan baik, melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO), serta peningkatan skrining kesasaran, serta Optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air. Capaian indikator kinerja urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	36,71	40,56	40,74	36,16	35,82	26,39
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.	326,54	329,30	335,25	338,14	352,27	358,12
3	Prosentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m)	1,89	2,15	2,17	2,17	2,17	60,00
5	Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	0,91	0,83	0,71	0,68	0,68	0,44
6	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	76,35	77,50	77,86	78,00	80,00	83,07
7	Posentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	18,11	17,42	15,74	15,00	15,00	10,48
8	Prosentase drainase dalam kondisi baik.	65,34	67,44	68,27	68,50	70,15	56,93
9	Rasio jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	52,34	53,94	57,97	61,50	64,31	67,29
10	Rasio jaringan irigasi	52,34	53,94	57,97	61,50	64,31	67,29
11	Prosentase penduduk berakses air minum layak	77,35	73,11	78,57	78,57	79,72	81,57
12	Prosentase areal kawasan kumuh	9,55	7,86	7,53	7,00	0,15	0,15
B	URUSAN WAJIB TATA RUANG						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	0,67	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	44,59	44,65	44,75	44,87	44,87	40,00

Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 8.145 hektar di seluruh kecamatan. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 4.479 hektar yang berada di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Sukoharjo. Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 6.660 hektar yang berada di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo.

B. Kawasan perikanan.

Kawasan perikanan di Kabupaten Pringsewu berupa kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 651 hektar yang terdapat di Kecamatan Pagelaran yang diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan sebagai Kawasan Strategi Kabupaten.

C. Kawasan pertambangan dan energi.

Kawasan peruntukan pertambangan dan Energi di Kabupaten Pringsewu yaitu meliputi mineral batuan memiliki luas sebesar kurang lebih 236 hektar yang terdapat di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Sukoharjo.

D. Kawasan pariwisata.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Pringsewu terfokus pada Pengembangan yang terdiri dari kawasan pariwisata alam dan kawasan pariwisata budaya. Dimana kawasan pariwisata alam merupakan pengembangan dari obyek-obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pringsewu yang dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata alam terdiri dari Bukit Pانونان Talang Indah Pajaresuk dan Bukit Tursina di Kecamatan Pringsewu serta Talang Resort One Bumirejo di Kecamatan Pagelaran. Kawasan pariwisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Kecamatan Gading Rejo, Makan Kyai Haji Gholib, Goa Maria padang Bulan, Rumah Adat di Margakaya yang terdapat di Kecamatan Pringsewu serta Rumah Adat di Kecamatan Pardasuka.

E. Kawasan permukiman.

Pengembangan kawasan permukiman yang meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 17.616 hektar. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan terdapat di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 6.010 hektar.

F. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan yang terdiri dari kompleks markas kepolisian Resor Pringsewu seluas kurang lebih 2 hektar di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gading Rejo, Markas Komando Distrik Militer dengan luas kurang lebih 15 hektar di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Pagelaran Utara. Sedangkan kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer berada di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana.

Wilayah rawan bencana atau sering disebut kawasan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu diperlukan mitigasi bencana yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.

Ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana, diantaranya tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu dan pengaturan, penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Terhadap bencana sendiri ada empat penanganan yang dapat dilakukan yaitu mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali.

Adapun kawasan rawan bencana sesuai dengan sumber data pada RTRW Kabupaten Pringsewu meliputi kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, dan kawasan rawan bencana gempa bumi. Kawasan rawan bencana banjir tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu. Namun beberapa kali banjir terjadi di Kecamatan Gading Rejo yaitu di Pekon Wates, Pekon Wates Selatan, Pekon Tambahrejo Barat serta di Kecamatan Pringsewu yaitu di Kelurahan Pringsewu Utara, Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan Pringsewu Timur dan Kelurahan Pringsewu Utara. Kawasan rawan bencana tanah longsor terdapat di Kecamatan Pardasuka seperti di Pekon Selapan. Sedangkan kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Pardasuka.

2.1.1.5. Kondisi Demografi.

A. Komposisi dan Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik Kabupaten Pringsewu, diketahui selama lima tahun terakhir, penduduk Pringsewu di dominasi oleh kaum laki-laki. Rata-rata posisi sex ratio selama lima tahun terakhir (1917-2021) adalah sebesar 105,16. Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.02
Komposisi Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No	Tahun	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	2018	203.282	193.937	397.219	104,82
2	2019	208.792	195.395	400.187	104,81
3	2020	208.763	196.703	405.466	106,13
4	2021	208.824	198.566	406.823	105,17
5	2022	210.015	198.400	408.415	105,85

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

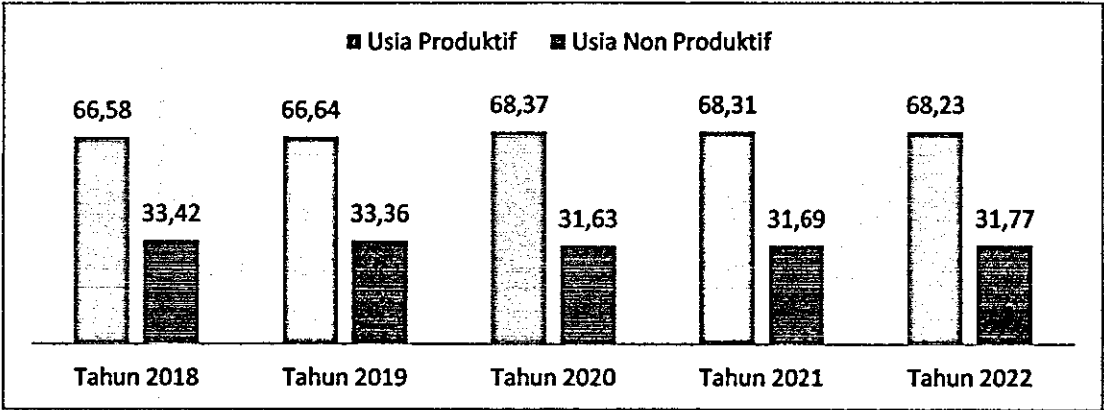
Kemudian jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, sejak tahun 2018 telah terjadi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif (usia 15 s.d. 64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk Pringsewu berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.03
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

No.	Kelompok Umur	Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	0 - 4	34.372	34.144	34.636	34.197	33.835
2	5 - 9	37.258	37.609	35.396	35.294	35.066
3	10 - 14	35.905	36.733	32.451	32.511	32.701
4	15 - 19	33.587	33.846	34.214	33.746	33.375
5	20 - 24	28.768	28.964	34.408	33.804	33.200
6	25 - 29	28.093	28.219	31.469	31.187	30.934
7	30 - 34	29.150	29.322	30.615	30.443	30.226
8	35 - 39	30.269	30.490	29.944	29.981	30.052
9	40 - 44	30.590	31.155	29.152	29.321	29.436
10	45 - 49	26.912	27.808	27.428	27.861	28.296
11	50 - 54	23.086	23.895	24.311	24.809	25.326
12	55 - 59	19.316	20.185	20.303	20.852	21.387
13	60 - 64	14.690	15.595	15.368	15.888	16.444
14	≥ 65	25.223	26.443	25.771	26.929	28.137
Jumlah		397.219	400.187	405.466	406.823	408.415

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Gambar 2.02
Perbandingan penduduk usia produktif dan non produktif



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk.

Secara umum, persebaran penduduk memberi informasi mengenai lokasi tempat tinggal penduduk. Distribusi penduduk Kabupaten Pringsewu dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.04
Distribusi Penduduk Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	35.066	35.811	35.174	35.292	35.450
2	Ambarawa	34.852	35.914	36.387	36.509	36.635
3	Pagelaran	47.067	51.964	52.042	52.216	52.440
4	Pagelaran Utara	15.850	15.446	15.301	15.352	15.397
5	Pringsewu	84.088	81.745	81.776	82.050	82.377
6	Gadingrejo	74.482	76.705	77.727	77.987	78.293
7	Sukoharjo	49.315	50.019	49.704	49.870	50.072
8	Banyumas	20.959	21.352	21.292	21.363	21.442
9	Adiluwih	35.540	35.452	36.063	36.184	36.308
Jumlah		397.219	400.187	405.466	406.823	408.415

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Untuk mengetahui kompleksitas permasalahan sosial, diantaranya dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka semakin kompleks permasalahan sosialnya. Adapun tingkat kepadatan penduduk di Pringsewu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.05
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Kepadatan (Jiwa / Km²)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	87,31	371	378	371,66	372,91	365,61
2	Ambarawa	33,11	1.125	1.159	1.174,15	1178,09	1.186,16

3	Pagelaran	48,42	649	717	718,12	720,52	726,25
4	Pagelaran Utara	158,19	158	154	152,58	153,69	153,31
5	Pringsewu	45,27	1.578	1.534	1.534,55	909,89	1.540,61
6	Gadingrejo	67,79	869	895	906,86	683,62	914,96
7	Sukoharjo	65,59	676	686	681,34	536,09	686,51
8	Banyumas	42,71	526	536	534,30	483,61	539,20
9	Adiluwih	68,80	475	474	482,00	153,09	484,23
	Kabupaten	617,19	630	636	647	649	653,46

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

C. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah 0,636. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelahiran penduduk telah dapat dikendalikan. Adapun laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.06
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pringsewu.

No.	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pardasuka	0,89	0,79	0,78	0,45	0,26
2	Ambarawa	0,75	0,66	0,64	0,45	0,58
3	Pagelaran	0,49	0,40	0,37	0,45	0,65
4	Pringsewu	0,99	0,90	0,87	0,44	0,27
5	Pagelaran Utara	1,05	0,95	0,93	0,45	0,23
6	Gadingrejo	0,70	0,60	0,59	0,45	0,51
7	Sukoharjo	1,03	0,93	0,91	0,45	0,43
8	Banyumas	1,03	0,93	0,92	0,44	0,52
9	Adiluwih	0,75	0,65	0,64	0,45	0,26
	Kabupaten	0,84	0,75	0,73	0,45	0,41

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

A. Kesejahteraan Ekonomi.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen. Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan

barang dan jasa. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pringsewu tercermin pada data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran tentang kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selama lima tahun (2018-2022), pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pringsewu selalumengalami kenaikan, dimana pada tahun 2022 mencapai 12,85 triliun rupiah, padahal pada tahun 2018 hanya mencapai 10,39 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.07
PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.634,67	2.728,00	2.805,34	2.811,32	3.073,72
B. Pertambangan dan Penggalian	11,33	11,89	12,35	11,77	12,37
C. Industri Pengolahan	1.616,58	1.742,50	1.667,98	1.776,44	1.855,40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,68	7,30	7,90	8,48	8,98
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,70	5,97	6,26	6,76	7,11
F. Konstruksi	1.257,73	1.353,15	1.313,39	1.442,95	1.579,63
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.439,36	1.599,90	1.534,85	1.650,22	2.023,97
H. Transportasi dan Pergudangan	470,71	512,28	503,48	523,19	670,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270,31	299,95	293,35	292,61	333,08
J. Informasi dan Komunikasi	572,73	622,51	675,47	702,15	710,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	419,66	435,49	447,75	484,90	507,54
L. Real Estate	395,68	442,35	439,82	447,87	474,77
M, N Jasa Perusahaan	26,27	27,57	27,40	27,90	33,60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	444,12	465,70	491,93	511,14	517,34
P. Jasa Pendidikan	546,98	605,78	634,24	653,83	691,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148,41	160,75	176,67	185,37	188,58
R,S,T,U Jasa Lainnya	122,22	135,85	127,97	126,03	163,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.389,15	11.156,95	11.166,16	11.662,32	12.852,32

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini menggunakan tahun dasar 2010. Berdasarkan harga konstan atau riel, PDRB di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun juga mengalami pertumbuhan, dimana pada tahun 2022 mencapai 8,21 triliun rupiah, padahal pada tahun 2018 hanya sebesar 7,37 triliun

rupiah. Data pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.08
PDRB Kabupaten Pringsewu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806,12	1.828,00	1.838,33	1.820,26	1.859,31
B. Pertambangan dan Penggalian	7,49	7,81	7,97	7,50	7,62
C. Industri Pengolahan	1.106,54	1.165,82	1.100,49	1.149,66	1.153,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,43	5,82	6,33	6,57	6,88
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,78	3,94	4,11	4,39	4,57
F. Konstruksi	910,96	965,15	941,44	998,29	1.034,76
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.142,35	1.220,60	1.147,22	1.212,53	1.371,79
H. Transportasi dan Pergudangan	332,07	359,41	346,03	353,34	407,82
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,31	185,01	179,66	178,17	197,73
J. Informasi dan Komunikasi	426,21	460,23	503,42	535,40	537,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	289,57	295,20	304,70	313,20	302,25
L. Real Estate	304,04	321,41	312,66	316,19	326,13
M, N Jasa Perusahaan	16,89	17,49	17,06	17,24	20,08
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	273,87	285,19	297,75	310,03	306,54
P. Jasa Pendidikan	382,72	413,53	427,68	432,60	443,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,86	114,81	125,27	129,08	127,62
R,S,T,U Jasa Lainnya	85,29	92,09	87,55	85,72	106,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.370,49	7.741,50	7.647,66	7.870,13	8.214,16

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

2. Distribusi PDRB.

Distribusi PDRB menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), perekonomian di Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, yaitu kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), kategori C (Industri Pengolahan), dan kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Hal ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.09
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pringsewu (Persen)
Tahun 2018-2022.

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92
B. Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
C. Industri Pengolahan	15,56	15,62	14,94	15,23	14,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F. Konstruksi	12,11	12,13	11,76	12,37	12,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,85	14,34	13,75	14,15	15,75
H. Transportasi dan Pergudangan	4,53	4,59	4,51	4,49	5,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,69	2,63	2,51	2,59
J. Informasi dan Komunikasi	5,51	5,58	6,05	6,02	5,53
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	3,90	4,01	4,16	3,95
L. Real Estate	3,81	3,96	3,94	3,84	3,69
M, N Jasa Perusahaan	0,25	0,25	0,25	0,24	0,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	4,17	4,41	4,38	4,03
P. Jasa Pendidikan	5,26	5,43	5,68	5,61	5,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,44	1,58	1,59	1,47
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,18	1,22	1,15	1,08	1,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, peranan terbesar pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu tahun 2022, dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu 23,92%, meskipun angka ini terus menurun selama lima tahun terakhir. Distribusi PDRB yang terus menurun dikarenakan luas lahan pertanian yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan, lahan tidak digarap, anomalia musim/iklim, hama dan penyakit serta keengganan anak muda yang terjun dalam dunia pertanian. Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Pringsewu memberikan peranan besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten pringsewu tetapi distribusi PDRB sektor pertanian terus menurun selama 5 tahun terakhir. Penurunan nilai kontribusi dari sektor pertanian tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut merupakan faktor-faktor perubahan nilai kontribusi yaitu :

1. Musim/iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi produksi pertanian. Selain itu, anomali iklim di beberapa tahun terakhir sangat berdampak pada kualitas dan produktifitas hasil pertanian. Kondisi tersebut diperparah dengan temperatur dan

- curah hujan yang naik secara signifikan dibandingkan dengan kondisi iklim normal.
2. Banyak lahan tidak tergarap. Berdasarkan keterangan, salah satu faktor yang menyebabkan pemilik lahan enggan untuk mengusahakan lahannya adalah iklim. Kasus yang terjadi beberapa tahun ini akibat anomali iklim yang merupakan faktor pembatas menyebabkan petani tidak dapat mengolah lahannya untuk budidaya dan petani cenderung beralih ke pekerjaan lain.
 3. Tenaga kerja dan kurangnya minat generasi muda tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian pada umumnya sudah berusia tidak produktif
 4. Hama, penyakit dan virus. Dalam melakukan budidaya sudah pasti ada hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang jika tidak dicegah atau ditanggulangi dengan baik akan menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas hasil sehingga produksi pertanian tidak optimal.

3. Laju Pertumbuhan PDRB.

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Data ini berguna untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil dari pembangunan. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pringsewu cenderung menurun, meskipun pada tahun 2020 mengalami koreksi -1,21 sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Hal ini dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022.

Lapangan Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,85	1,21	0,57	-0,98	2,51
B Pertambangan dan Penggalian	6,71	4,31	2,03	-5,83	1,57
C Industri Pengolahan	6,13	5,36	-5,60	4,47	0,32
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,52	7,14	8,76	3,86	4,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,09	4,26	4,32	6,97	3,93
F Konstruksi	6,41	5,95	-2,46	6,04	3,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,18	6,85	-6,01	5,69	13,13
H Transportasi dan Pergudangan	6,85	8,24	-3,72	2,11	15,42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,55	9,27	-2,89	-0,83	10,98
J Informasi dan Komunikasi	8,21	7,89	9,38	6,35	0,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46	1,95	3,22	2,79	-3,50
L Real Estate	3,70	5,71	-2,72	1,13	3,14
M, N Jasa Perusahaan	1,54	3,52	-2,46	1,04	16,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,13	4,41	4,12	-1,13

P Jasa Pendidikan	7,12	8,05	3,42	1,15	2,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	6,45	9,11	3,05	-1,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	9,20	7,97	-4,93	-2,09	24,62
LAJU PERTUMBUHAN PDRB	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

4. PDRB Per Kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tabel 2.11
PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
1. Atas Dasar Harga Berlaku	10.389,15	11.159,04	11.166,16	11.662,32	12.852,32
2. Atas Dasar Harga Konstan	7.370,49	7.741,50	7.647,66	7.870,16	8.214,16
PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)					
1. Atas Dasar Harga Berlaku	26.154,71	27.851,92	27.563,22	28.666,81	31.468,39
2. Atas Dasar Harga Konstan	18.555,24	19.346,34	18.974,21	19.345,42	21.236,03
Jumlah Penduduk	397.219	400.187	405.466	406.823	408.415
Pert. PDRB Per Kapita ADHK	4,14	4,26	-1,92	1,02	1,06

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

5. Laju Inflasi.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju inflasi di Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Laju Inflasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Kelompok Pengeluaran	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Bahan Makanan	3,37	3,50	3,06	3,12	1,88
Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau.	0,80	4,01	3,06	5,08	0,10
Perumahan.	0,47	1,68	0,75	3,55	0,59
Sandang.	1,54	6,29	1,09	2,73	0,14
Kesehatan.	0,87	4,18	3,09	2,57	0,33
Pendidikan, Rekreasi dan OlahRaga	3,49	1,09	1,85	-2,07	0,00

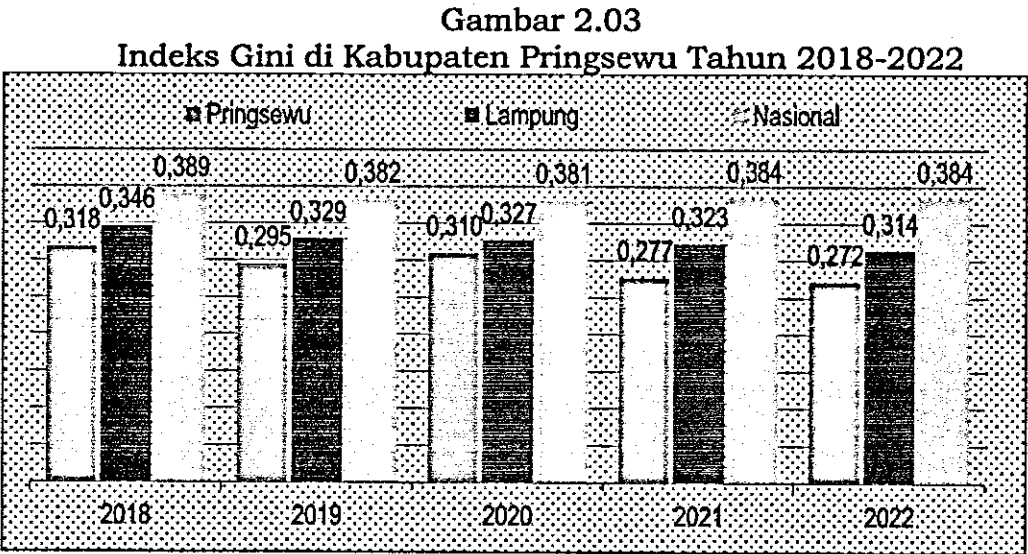
Transp, Komunikasi dan Jasa Keuangan.	1,48	-0,11	1,43	-1,59	0,13
Inflasi Kab. Pringsewu	1,77	2,73	2,72	2,74	5,37

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

B. Pemerataan Ekonomi.

1. Indeks Gini.

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Kriteria kesenjangan indeks gini di bawah 0,30 berarti ketimpangan rendah, indeks gini 0,30 sampai dengan 0,50 berarti ketimpangan sedang dan indeks gini di atas 0,50 berarti ketimpangan tinggi. Kondisi ini berarti semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin melebar. Sebaliknya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) capaian indeks gini Kabupaten Pringsewu bersifat fluktuatif, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2023.

2. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang di dasarkan pada hasil perhitungan indeks gini hanya bisa menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara umum. Oleh karena itu diperlukan analisis pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Namun mengingat keterbatasan data, maka digunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

Bila jumlah pengeluaran dari 40% penduduk berpendapatan rendah kurang dari 12% maka dikategorikan ketimpangan tinggi. Kemudian bila hasilnya antara 12% sampai dengan 17% maka dikategorikan ketimpangan sedang/menengah; dan bila hasilnya ternyata diatas 17% dikategorikan ketimpangan rendah. Hasil analisis pemerataan pendapatan versi bank dunia di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 menunjukan bahwa pengeluaran 40% kelompok terbawah sebesar 15,81%, pengeluaran 40% kelompok menengah sebanyak 28,44%, dan pengeluaran 20% kelompok tinggi sebesar 55,75%. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di Kabupaten Pringsewu adalah kategori sedang.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat.

A. Kemiskinan.

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah seluruh penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan atas garis kemiskinan. Pperkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pringsewu

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin
1	2018	397.219	408.174	41.708	10,50
2	2019	400.187	422.691	41.047	10,15
3	2020	405.466	458.627	40.120	9,89
4	2021	406.823	475.983	41.040	10,11
5	2022	408.415	511.679	38.180	9,34

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 41.708 jiwa (10,50 persen) menjadi 40.120 jiwa (9,89 persen) pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2021 menjadi 41.040 jiwa (10,11 persen). Hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang masih belum selesai penanganannya sehingga masih banyak masyarakat yang usahanya terdampak, terutama masyarakat yang berada di garis kemiskinan, statusnya turun menjadi dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 38.180 jiwa (9,34 persen).

Selanjutnya untuk mengetahui kualitas kemiskinan dapat di ukur dengan Indeks kedalaman kemiskinan (P1), yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Selain itu juga diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 maka semakin tinggi juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai dari P1 dan P2 dipengaruhi oleh nilai garis kemiskinan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan di Pringsewu adalah Rp. 408.174 perbulan per jiwa. Selanjutnya setiap tahun dinaikan dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 511.679 perbulan. Dengan kenaikan tersebut, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga ikut bergerak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Prosentase Penduduk Miskin	(P1)	(P2)	Garis Kemiskinan
2018	41.708	10,50	1.44	0.31	408.174
2019	41.047	10,15	1.13	0.21	422.691
2020	40.120	9,89	1.20	0.21	458.627
2021	41.040	10,11	1.38	0.26	475.983
2022	38.180	9,34	1,07	0,19	511.679

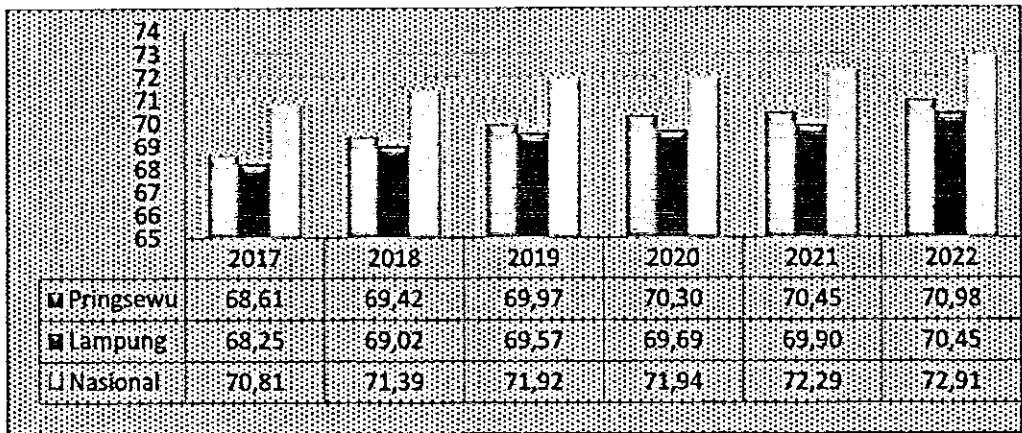
Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

Kabupaten Pringsewu tahun 2022 angka kemiskinannya menurut BPS sebesar ,1,1% dan ditargetkan 0% pada tahun 2024 sesuai target dari Program Nasional. Kabupaten Pringsewu melalui SK Bupati Pringsewu Nomor: B/342/KPTS/B01/2023 telah menetapkan 1176 KK dengan irisan 117 keluarga stunting didalamnya sebagai sasaran program Kemiskinan ekstream.

B. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung, namun relatif rendah jika dibandingkan IPM Nasional. Adapun perbandingan antara IPM Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.04
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

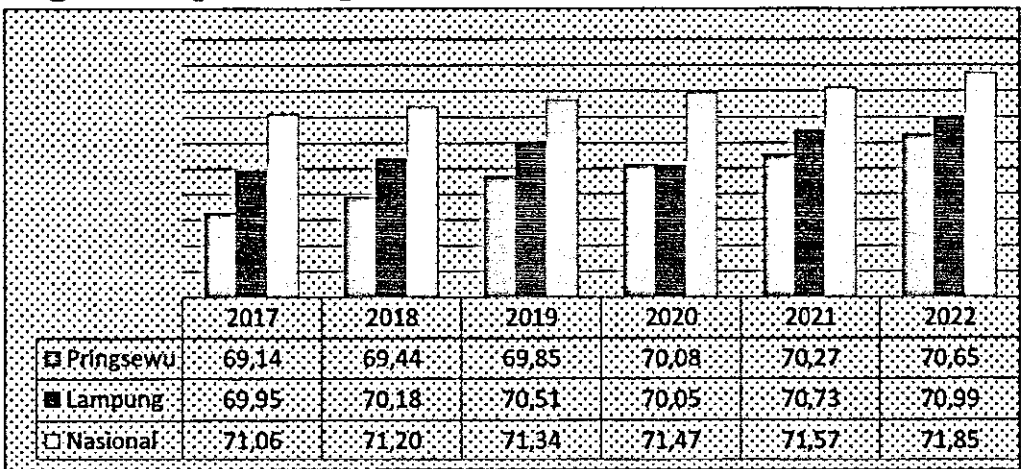


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023.

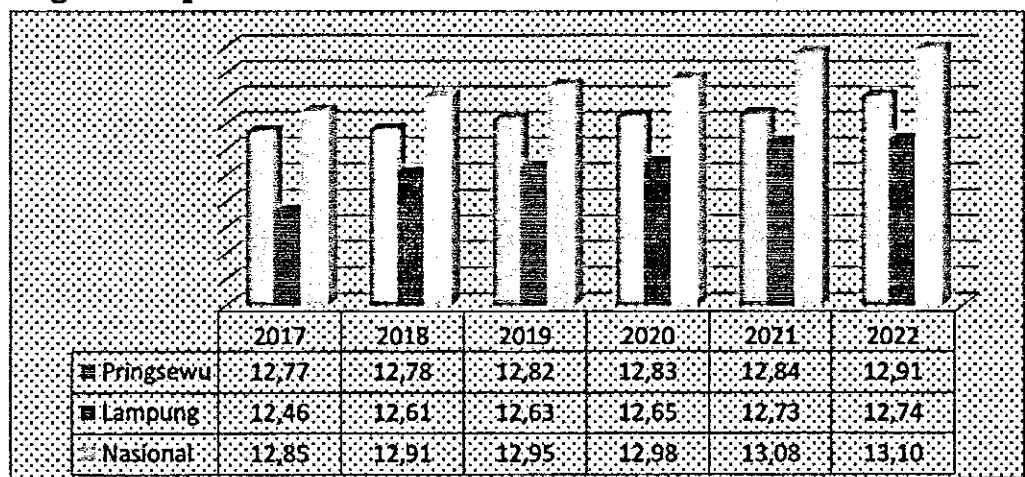
Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup. Indikator dari bidang pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara unsur dari bidang perekonomian, indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Dengan demikian maka kenaikan IPM juga ditentukan dengan adanya kenaikan pada unsur pembentuknya. Adapaun perkembangan masing-masing unsur pembentuk IPM di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.05
Perkembangan Unsur Pembentuk IPM Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2022

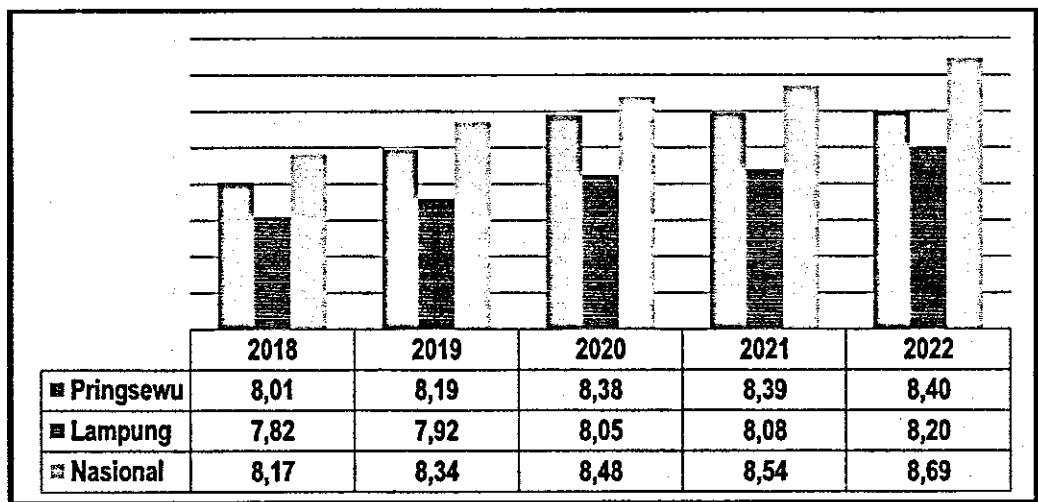
Angka Harapan Hidup



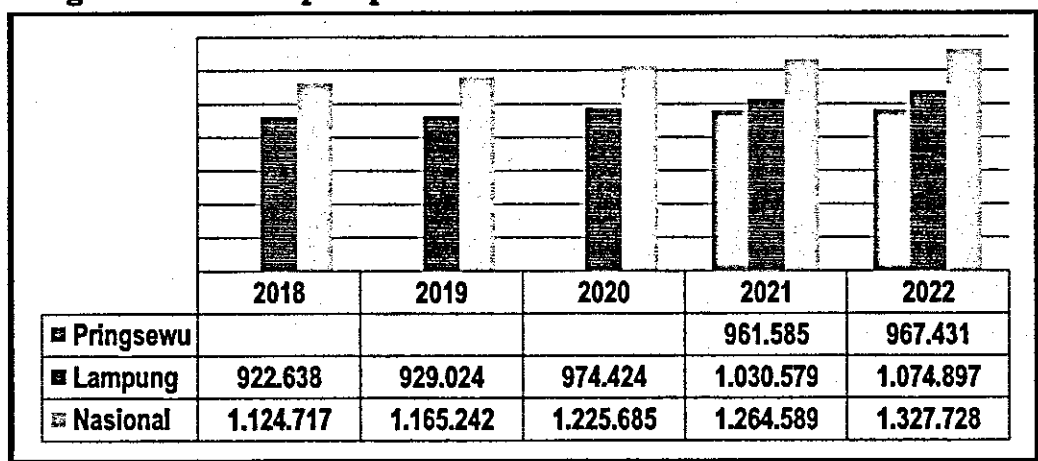
Angka Harapan Lama Sekolah



Rata-Rata Lama Sekolah



Pengeluaran Per Kapita per bulan



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

C. Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan danketerampilan serta sikap manusia sehingga kualitas sumber daya manusiasangat tergantung dari kualitas pendidikan itu sendiri. Secara umum dapatdikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan tingkatpendidikannya. Semakin tinggi

tingkat pendidikan yang dicapai, maka kualitas sumber daya manusia juga semakin tinggi. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2		4	5	6	7
1	Angka melek huruf	97,15	97,25	97,24	97,28	96,90
2	Rata-rata lama sekolah	8,01	8,19	8,38	8,39	8,40
3	Angka harapan lama sekolah	12,78	12,82	12,83	12,84	12,91
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 12 Tahun.	100,00	100,00	99,99	96,49	96,49
5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13 – 15 Tahun.	99,08	99,25	98,64	80,59	87,73
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MTs.	106,68	116,50	104,89	103,39	104,10
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs.	92,52	94,00	94,51	96,06	109,56
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,00	98,50	99,49	99,27	99,99
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs.	83,71	81,22	83,60	83,59	87,62

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2022 banyak capaian kinerja bidang pendidikan di Kabupaten Pringsewu melampaui capaian provinsi. Tinggal beberapa indikator lagi yang masih dibawah capaian provinsi. Data capaian APM SD/MI yang lebih tinggi dari provinsi (Pringsewu sebesar 96,49% dan Lampung sebesar 78,97%). Untuk capaian angka melek huruf adalah 97,28%, lebih kecil dari provinsi sebesar 99,49%; rata-rata lama sekolah sebesar 8,39, lebih besar dari provinsi (8,08); angka harapan lama sekolah sebesar 12,84, lebih besar dari provinsi (12,73); APS usia 7-12 tahun 96,49% atau lebih kecil dari provinsi (99,53%); APS usia 13-15 tahun sebesar 80,59%, lebih kecil dari provinsi (85,14%); APK SD/MI sebesar 98,96% atau lebih besar dari provinsi (85,14%); APK SMP/MTs sebesar 82,66% atau lebih besar dari provinsi (75,96%); dan APM SMP/MTs sebesar 80,59% atau lebih besar dari provinsi (56,03%).

D. Kualitas Kesehatan.

Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat. Analisis kinerja dibidang kesehatan dilakukan terhadap indikator-indikator Angka kelangsungan hidup bayi, angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk. Sebagai pencapaian indikator bidang kesehatan, sebagaimana uraian berikut ini:

Tabel 2.16
 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten Pringsewu
 Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2		4	5	6	7
1	Angka Usia Harapan Hidup	69,44	69,85	70,08	70,27	70,65
2	Penolong kelahiran oleh tenaga medis	87,15	92,78	95,37	96,89	100
3	Angka kesakitan	12,59	13,83	16,80	44,2	20,5
4	Angka kelangsungan hidup bayi	99,08	99,04	98,80	99,30	99,38
5	Angka kematian ibu melahirkan	0,09	0,10	0,13	0,13	0
6	Prosentase balita gizi buruk	0,010	0,007	0,020	0,019	0,1

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

Dari keenam indikator bidang kesehatan tersebut, beberapa indikator menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, seperti AHH, prosentase penolong kelahiran oleh tenaga medis, angka kelangsungan hidup bayi dan prosentase balita gizi buruk. Dan masih ada indikator yang mengalami penurunan yang akan menjadi perhatian dalam pembangunan daerah di tahun 2023. Adapun angka kesakitan mangalami kenaikan disebabkan oleh perubahan musim yang tidak menentu dan efek virus covid-9, dengan 10 penyakit dengan jumlah kasus terbesar antara lain Dyspepsia 10.988 kasus, Myalgia 9.535 kasus, Gastritis 9.211 kasus, Influenza 8.379 kasus, Hyertensi esensial 7.551 kasus, Atritis Rematozoid 6.290 kasus, Rinitis Akut 6.003 kasus, Demam 5.423 kasus, Tension Headache 5.164 kasus, dan Dermatitis Atropik 4.682 kasus. Jumlah Kunjungan pasien ke Puskesmas dan Rumah sakit yaitu Rawat Jalan 561.269 kunjungan, Rawat Inap 44.243 kunjungan, dan Gangguan Jiwa 1.029 kunjungan. Khusus terhadap capaian indikator angka kematian ibu, nampaknya bersifat fluktuatif dan hal ini akan menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Adapun data kasus kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.17
 Kasus AKI dan AKB di Kabupaten Pringsewu

Uraian	2020	2021	2022
Angka Kematian Ibu	137/100.00 0 KH	154/100.00 0 KH	151/100. 000 KH
Angka Kematian Bayi	11/1000KH	7/1000KH	7/1000K H

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Pada tahun 2022 Jumlah Kasus kematian ibu berjumlah 151 dari 100.000 kelahiran hidup, sebagian besar penyebabnya adalah pendarahan dan eklamsi . Sedangkan jumlah Kasus kematian Bayi di Kabupaten Pringsewu berjumlah 7 kasus dari 1000 kelahiran hidup, sebagaia

n besar disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia

Isu penting lainnya yang akan menjadi perhatian serius yaitu adanya kasus stunting/bayi tumbuh pendek atau pertumbuhan bayi yang lebih rendah dari rata-rata. Berdasarkan data E PPGBM dari Dinas Kesehatan, diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 6,54 persen kasus stunting di Kabupaten Pringsewu yang tersebar diseluruh wilayah Desa atau Pekon. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pekon/desa dan kelurahan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022, pekon yang memiliki prevalensi stunting terbesar terdapat di Pamenang dengan besaran 26,94% dan diikuti oleh Pekon Pasir Ukir dengan angka 22,30%. Sedangkan lokasi fokus dengan prevalensi stunting dengan angka terkecil terdapat di Pekon Pujiharjo dengan angka 8,24%. Dari 131 pekon/desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Proingsewu, terdapat 20 pekon yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting, dengan rincian 9 lokasi fokus lanjutan dan 11 lokasi fokus baru.

Tabel 2.18

Prevalensi Stunting di Kabupaten Pringsewu

Tahun	Persentase (Data E PPGBM)	Persentase(Data SSGI)
2018	20,19	-
2019	17,76	-
2020	7,57	17
2021	6,54	19
2022	5,62	16,2

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Kasus TBC di Kabupaten Pringsewu terdiri dari TBC terkonfirmasi bacteriologis sebanyak 331 kasus , dengan tingkat kesembuhan 27,5%. Penanganan dan terapi TB selama 6 bulan sehingga tingkat kesembuhan pasien kecil dan pasien yang belum sembuh masih dalam penanganan di tahun 2023. Angka keberhasilan pengobatan (success rate/sr) semua kasus tuberkulosis adalah 92,7% dengan tingkat kematian 3,1% atau 17 jiwa. Hasil follow up kasus TB di Kabupaten Pringsewu adalah 91 orang pengobatan sembuh, 415 orang pengobatan lengkap, 17 orang meninggal. Angka Treatment Succes Rate TB di Kabupaten Pringsewu sebesar 93,76%. Untuk kasus hipertensi dapat dijelaskan bahwa penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 27.321 pasien / 34,9% dari estimasi penderita hipertensi > 15 tahun. Sedangkan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 3.882 pasien / 78% dari estimasi penderita DM.

Dinas Kesehatan Pringsewu terus berupaya untuk meningkatkan capaian

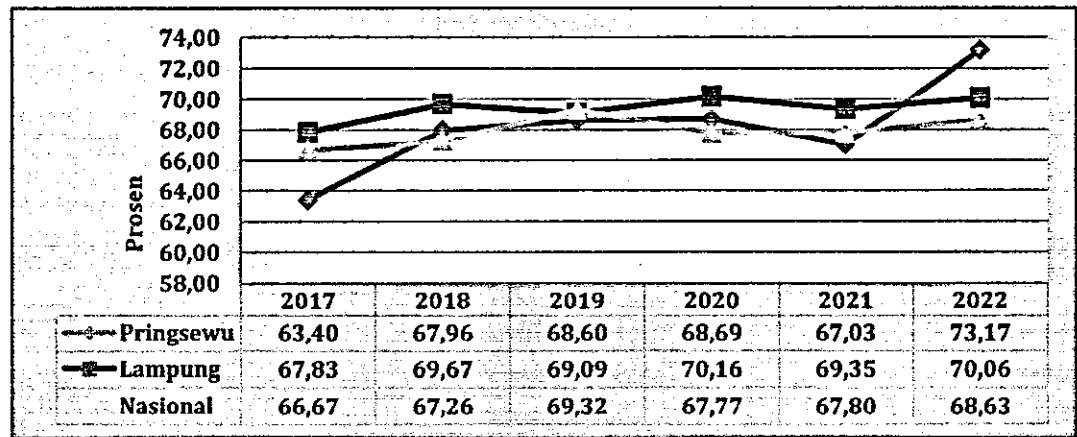
Universal Health Coverage melalui kegiatan seperti Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Tim percepatan pencapaian UHC Kab. Pringsewu, Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS, untuk kepesertaan PBI APBD, APBN, PPU, PBPU dan PU, agar tidak ada dobel data termasuk data peserta yang telah meninggal bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil, Melakukan pendataan per desa, masyarakat yang belum terdaftar peserta BPJS dan advokasi ke BPKAD untuk penambahan anggaran pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

E. Ketenagakerjaan.

Informasi ketenagakerjaan sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja. Apabila tingkat perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka terjadi peningkatan pengangguran. Adapun perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pringsewu, dapat diketahui dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Selama lima tahun terakhir (2017-2022) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu selalu meningkat. Namun peningkatan tersebut masih dibawah TPAK Provinsi Lampung dan Nasional. Perbandingan TPAK Pringsewu dengan Lampung dan Nasional, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.06
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

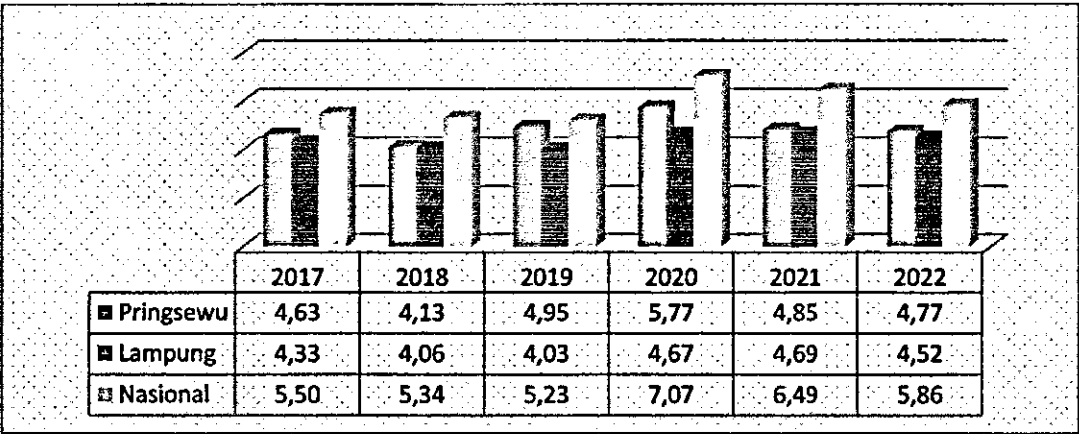


Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

Kemudian terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan

perbandingan antara pengangguran terbuka dengan angkatan kerja. TPT di Kabupaten Pringsewu selama lima tahun terakhir masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan provinsi, namun masih lebih baik bila dibandingkan nasional.

Gambar 2.07
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2023

F. Pelayanan Publik.

Salah tugas Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada. Oleh karena itu maka sangat penting untuk mengetahui kinerja tersebut, terutama yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah, dan predikan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Adapun capaian kinerja terhadap tiga indikator pelayanan publik tersebut, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,50	79,61	81,15	84,50	85,41	85,10
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Predikat Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	CC	CC	B	B	B	B

Sumber : Bappeda Kabupaten Pringsewu, 2023.

Dari ketiga indikator pelayanan publik tersebut, terhadap Nilai SAKiP dari Kementerian PAN RB, masih membutuhkan perhatian serius, meskipun terjadi peningkatan sejak tahun 2017.

G. Ketahanan Pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Ketahanan Pangan berarti kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Adapun capaian beberapa indikator ketahanan pangan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,10	87,55	88,10	88,50	89,20	89,4
2	Ketersediaan Pangan Pemerintah	18,00	35,50	54,27	74,27	84,27	14,37
3	Ketersediaan Pangan Masyarakat	43,00	43,00	70,00	79,00	80,00	93,80
4	Kontribusi pertanian dan perikanan terhadap PDRB	25,81	25,36	24,45	25,12	24,11	23,92

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, skor Pola Pangan Harapan tahun 2022 adalah 89,4% atau telah mendekati sempurna (100%). Ini berarti bahwa pola konsumsi masyarakat telah semakin beragam antar kelompok pangan dan bergizi seimbang. Kelompok pangan tersebut meliputi padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain.

Kemudian cadangan pangan di Kabupaten Pringsewu juga selalu tersedia, dan selama lima tahun terakhir belum ditemui kasus kekurangan pangan secara signifikan. Disisi lain kontribusi pertanian dan perikanan juga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB, meskipun terjadi tren penurunan, sebagai dampak adanya alih fungsi lahan untuk sektor yang lainnya.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.

A. Seni Budaya.

Pembangunan bidang seni budaya atau kebudayaan diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Sedangkan tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah. Upaya

pelestarian budaya penting untuk dilakukan mengingat semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu berusaha melestarikan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Kinerja pelestarian kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Jumlah group kesenian tradisional	276	325	357	357	342	342
2	Jumlah group seni kesenian musik.	24	27	31	31	31	31
3	Jumlah penyelenggaraan lomba dan festival seni serta budaya	4	6	6	1	2	2
4	Jumlah sarana pentas seni dan budaya	15	19	21	21	21	21
5	Jumlah benda sejarah	36	36	36	36	36	36
6	Jumlah kawasan cagar budaya	2	3	3	3	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

B. Olah Raga.

Sasaran utama olahraga pada dasarnya adalah untuk peningkatan kualitas hidup manusia, baik yang menyakut kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial. Dalam konsteks ini maka pada dasarnya ada dua tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks perlombaan, maka tujuan utamanya adalah mencapai prestasi setinggi-tingginya. Namun dalam konteks kesehatan, maka pada dasarnya adalah untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat, sehingga mampu untuk melaksanakan aktivitas secara produktif. Adapun kinerja bidang olah raga, dapat diketahui dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Jumlah organisasi olahraga	21	25	25	25	25	25
2	Jumlah club olah raga	185	193	205	410	410	410
3	Jumlah gedung olahraga	26	31	33	36	36	36
4	Jumlah sarana atau lapangan olahraga	278	312	321	325	325	325
5	Jumlah pertandingan olahraga	7	7	9	9	9	9

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2023.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan.

Kemajuan dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator makro yang dipakai secara nasional. Diantaranya adalah melalui rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, kondisi ruang kelas, Pendidikan Anak Usia Dini, angka putus sekolah (APS), angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah, guru berkualifikasi S-1/D-IV, dan jumlah guru yang telah bersertifikasi. Adapun capaian kinerja urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/MI	65,34	65,34	65,34	68,97	63,10	66,50
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs	33,33	33,33	33,33	33,44	37,81	33,83
3	Rasio guru terhadap murid SD/MI	66,67	66,67	66,67	66,67	64,35	56,25
4	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs.	71,43	71,43	71,43	71,43	69,30	45,21
5	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SD/MI	71,41	71,43	71,43	50,00	78,88	67,85
6	Rasio guru terhadap murid per rata-rata kelas jenjang SMP/MTs	50,00	50,00	50,00	25,00	54,60	63,25
7	Ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik	29,12	29,45	29,50	29,68	31,28	28,79
8	Ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik	18,86	20,00	20,50	21,08	19,63	48,92
9	Rasio murid Pendidikan Anak Usia Dini terhadap anak usia 4-6 tahun.	90,00	90,07	91,85	92,50	93,00	97,50
10	Rasio guru Pendidikan Anak Usia Dini	6,67	7,69	7,14	5,56	5,47	10,1
11	Angka putus sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,01	0,01	0,82	0,59
12	Angka putus sekolah SMP/MTs	0,03	0,03	0,03	0,03	0,82	0,59
13	Angka kelulusan SD/MI	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Angka kelulusan SMP/MTs	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	98,90	88,38	86,92

16	Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	87,90	95,70	98,50	98,50	98,50	98,50
17	Prosentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV	78,68	81,50	83,33	90,48	94,73	96,42
18	Prosentase guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV	87,06	88,50	90,51	91,71	93,82	94,56
19	Kualifikasi guru SD/MI yang bersertifikat mengajar.	67,55	58,02	61,94	55,40	47,68	42,75
20	Kualifikasi guru SMP/MTs yang bersertifikat mengajar.	75,85	74,61	58,61	45,24	47,42	46,56

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan diatur di dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Adapun Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasi Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
A.	SPM Pendidikan Anak Usia Dini				
1.	Peserta didik anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	100	10709	97.50	10441
2.	Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini meliputi buku gambar sebanyak 6 buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester dan 1 set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester dan diberikan pada setiap awal tahun;	100	10709	100	10709
3.	Kualitas Pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini;	100	1078	56.59	610
4.	Kualitas Pendidik yang memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini;	100	1078	16.51	178
5.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	274	71.17	195
6.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini memiliki sertifikat pendidik	100	274	28.10	77
7.	Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini yang telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang;	100	274	33.58	92

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasi Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
8.	Pemenuhan jumlah pendidik pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini dan 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini;	100	274	100	274
B.	SPM Pendidikan Dasar				
1.	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;	100	68916	97.50	67193
2.	Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik pertahun dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester yang diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik dan diberikan pada setiap awal tahun;	100	68916	100	68916
3.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1)	100	4601	95.50	4406
4.	Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki sertifikat pendidik	100	4601	44.65	2029
5.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).	100	395	100.00	395
6.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan	100	395	93.72	377
7.	Kualitas tenaga kependidikan Kepala sekolah pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah.	100	395	79.39	326
8.	Tenaga penunjang lainnya pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	100	395	75.69	299
9.	Pemenuhan jumlah pendidik pada Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar, jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan	100	395	100	395
10.	Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan yaitu terdiri dari 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan dan 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan Pendidikan	100	395	100	395
C.	Pendidikan Kesetaraan				
1.	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	100	621	100	621

No	Jenis Layanan Dasar /Indikator S P M	Sasaran/Target		Hasi Capaian	
		Tahun 2022		Tahun 2022	
		%	Sasaran	%	Sasaran
2.	Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik pendidikan kesetaraan yaitu 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	100	621	100	621
3.	Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan dengan kualitas pendidik paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100	86	100	86
4.	Jenis tenaga kependidikan dengan kualitas tenaga kependidikan kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat;	100	11	100	11
5.	Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan, kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor dan jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	100	86	100	86
6.	Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan dan 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan	100	11	100	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.

B. Urusan Wajib Kesehatan.

Urusan wajib pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas pelaku pembangunan yangberdampak pada keberhasilan pembangunan. Selain itu juga berdampak pada kualitas bersaing dalam dunia kerja, sehingga mampu menempati posisi-posisi penting dalam dunia usaha dan ikut secara langsung mewarnai dunia kerja.

Indikator untuk melihat keberhasilan kinerja urusan wajib kesehatan, diantaranya adalah rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas, pustu dan klinik per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga kesehatan dan lainnya, yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Posyandu per satuan balita	1,09	1,14	1,42	1,15	1,26	1,36

2	Ketersediaan fasilitas kesehatan.						
A	Jumlah Fasilitas Rumah Sakit	7	7	7	7	7	7
B	Jumlah Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat	13	13	13	13	13	13
C	Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu	34	34	34	34	34	34
D	Jumlah Fasilitas Poliklinik / Rumah bersalin.	19	19	22	23	22	24
E	Jumlah fasilitas Apotek / Toko Obat.	41	45	45	47	66	85
3	Rasio Puskesmas Per 20.000 penduduk	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,61
4	Rasio Pustu Per 6.000 penduduk	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,47
5	Rasio Poliklinik dan Rumah Bersalin per 6.000 penduduk	0,32	0,32	0,37	0,34	0,33	0,34
6	Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk	1,58	1,57	0,13	0,17	0,17	0,17
7	Rasio ketersediaan tempat tidur per 1.000 penduduk	0,18	0,18	4,94	1,42	1,38	1,33
8	Ketersediaan tenaga kesehatan.						
A	Tenaga Dokter	193	152	222	279	269	200
B	Tenaga Bidan	149	360	461	497	619	580
C	Tenaga Perawat	610	270	708	773	830	858
D	Tenaga Kesehatan Lainnya	83	137	892	992	880	981
9	Rasio Tenaga Dokter per 2.500 penduduk.	1,22	0,96	0,08	1,72	1,35	1,18
10	Rasio Tenaga Bidan per 1.000 penduduk.	0,38	0,91	0,46	1,22	1,51	1,37
11	Rasio Tenaga Perawat per 1.000 penduduk.	1,55	0,68	0,71	1,90	2,08	2,02
12	Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 1.000 penduduk	0,21	0,34	0,89	2,24	2,17	2,31
13	Cakupan Puskesmas	133,33	144,44	144,44	144,44	144,44	144,44
14	Cakupan Puskesmas Pembantu	25,19	25,19	25,19	25,19	25,95	25,19
15	Cakupan Pekon yang melaksanakan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	100,00	90,80	85,00	93,94

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan diatur di dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun Pencapaian SPM

Bidang Kesehatan di Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 2022 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel.2.26
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator S P M	Sasaran	CAPAIAN					%
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total	
1	Pelayanan Ibu hamil	7.013	1.370	1.379	1.533	2.230	6.512	92,9%
2	Pelayanan Ibu bersalin	6.694	1.348	1.484	1.512	1.620	5.964	89,1%
3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	6.057	1.286	1.481	1.509	1.632	5.908	97,5%
4	Pelayanan Balita	30.968	5.762	4.643	6.304	3.657	20.366	65,8%
5	Pelayanan Kesehatan pd usia pendidikan dasar	61.400	-		31.165	12.849	44.014	71,7%
6	Pelayanan kesehatan pd usia produktif	259.751	6.991	7.341	8.825	51.477	74.634	28,7%
7	Pelayanan kesehatan pd usia lanjut	51.169	10.386	10.252	10.181	8.188	39.007	76,2%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	78.352	2.632	2.172	1.622	20.895	27.321	34,9%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4.975	1.118	1.067	700	997	3.882	78,0%
10	Pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat	696	428	113	-	48	589	84,6%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	5.549	1.247	660	1.912	1.730	5.549	100,0%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	7.785	1.112	1.475	1.779	3.419	7.785	100,0%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Beberapa Indikator SPM Bidang Kesehatan yang kurangnya mendapatkan dukungan dana, Sumber Daya Manusia yang kurang dan petugas/pengelola program yang double job dalam pelaksanaan kegiatan/program sehingga target tidak tercapai, beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target salah satunya yaitu pelayanan kesehatan pada usia produktif (28,70)%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi (34,90)% yang sangat jauh dari target. Ini antara lain disebabkan oleh pandem icovid-19, kurangnya Sumber Daya Manusia, petugas/pengelola program yang double job dalam pelaksanaan kegiatan/program. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan/program setelah pandemi covid-19 sudah teratasi dengan baik, melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman definisi operasional (DO), serta peningkatan skrining kesasaran, serta Optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan dan pemukiman, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air. Capaian indikator kinerja urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	36,71	40,56	40,74	36,16	35,82	26,39
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.	326,54	329,30	335,25	338,14	352,27	358,12
3	Prosentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 m)	1,89	2,15	2,17	2,17	2,17	60,00
5	Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	0,91	0,83	0,71	0,68	0,68	0,44
6	Prosentase rumah tinggal bersanitasi	76,35	77,50	77,86	78,00	80,00	83,07
7	Posentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	18,11	17,42	15,74	15,00	15,00	10,48
8	Prosentase drainase dalam kondisi baik.	65,34	67,44	68,27	68,50	70,15	56,93
9	Rasio jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	52,34	53,94	57,97	61,50	64,31	67,29
10	Rasio jaringan irigasi	52,34	53,94	57,97	61,50	64,31	67,29
11	Prosentase penduduk berakses air minum layak	77,35	73,11	78,57	78,57	79,72	81,57
12	Prosentase areal kawasan kumuh	9,55	7,86	7,53	7,00	0,15	0,15
B	URUSAN WAJIB TATA RUANG						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	0,67	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75
3	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	44,59	44,65	44,75	44,87	44,87	40,00

4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	31,15	30,65	30,35	28,95	28,95	28,95
5	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	56,43	60,91	60,99	61,75	74,00	80,79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023.

D. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap urusan wajib perumahan dan permukian antara lain melakukan penyediaan danrehabilitasi rumah korban bencana; pengembangan dan penataan perumahan; peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan penyelenggaraan fasilitas umum perumahan. Capaian kinerja terhadap pengelolaan urusan wajib perumahan rakyat dan permukian adalah :

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Permukiman di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio rumah layak huni	93,18	94,26	94,89	95,60	95,70	95,70
2	Rasio permukiman layak huni	95,75	99,49	99,51	99,59	99,61	99,61
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	81,54	83,82	85,75	95,60	95,70	95,75
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	90,45	91,13	92,44	95,60	95,60	95,75
5	Persentase pemukiman yang tertata	61,10	63,51	66,21	68,20	68,20	68,20
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	5,350	0,032	0,021	0,020	0,020	2,5
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	9,55	7,86	7,53	7,00	0,15	0.15
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	20,86	19,34	17,45	4,56	4,56	4,27
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	72,11	74,35	77,26	79,72	80,77	83,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023.

Tabel. 2.29

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persenatse Capaian
A	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		-	.	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		-	.	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persenatse Capaian
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	6.00	6.00	100.00%
1	Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Dokumen	0.00	0.00	0.00%
2	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0.00	0.00	0.00%
3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	150.00	138.00	92.00%
4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0.00	0.00	0.00%
5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0.00	0.00	0.00%
6	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	5500	725.00	13.18%
7	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0.00	0.00	0.00%
8	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0.00	0.00	0.00%
9	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0.00	0.00	0.00%
10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	12	10.00	83.33%
11	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0.00	0.00	0.00%
12	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0.00	0.00	0.00%
13	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0.00	0.00	0.00%
14	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0.00	0.00	0.00%
15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0.00	0.00	0.00%
16	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
17	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0.00	0.00	0.00%
18	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0.00	0.00	0.00%
19	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0.00	0.00	0.00%
20	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0.00	0.00	0.00%
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	200.00	-	-	
a.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.00	-	-	
1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	3.00	100.00%
2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0.00	0.00	0.00%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Persenatse Capaian
3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	12.00	10.00	83.33%
4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0.00	0.00	0.00%
8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1.00	1.00	0.00%
9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0.00	0.00	0.00%
10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0.00	0.00	0.00%
11	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		0.00	0.00	0.00%
12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	0.00	0.00	0.00%
13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0.00	0.00	0.00%
14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0.00	0.00	0.00%
15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0.00	0.00	0.00%
17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0.00	0.00	0.00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

E. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuhkembangnya investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik kita adalah memelihara kebhinekaan agar tetap menjadi faktor yang mampu menginspirasi,memperkaya dan menguatkan ikatan persatuan dan kesatuan. Lalu disisi lain iklim daerah yang kondusif juga perlu diciptakan melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Capaian kinerja urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
 Capaian Kinerja Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
 Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	34,73	34,75	35,35	33,63	33,29	32,86
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	77,65	74,55	75,00	85,00	85,00	87,00
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	29,54	35,75	38,50	38,87	38,87	38,87
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	86,11	86,10	86,00	94,00	89,29	80,00
5	Persentase Penegakan PERDA	65,33	68,15	70,00	80,00	82,50	85,00

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023.

SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Permendagri RI Nomor Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas mencakup 4 (Empat) pelayanan dasar yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana

Tabel.2.31

RealisasiPencapaianTargetSPMBidangKetenteraman,KetertibanUmum danPerlindunganMasyarakatKabupatenPringsewu,2022

(a) Penanggulangan Bencana Daerah

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERHITUNGAN	REALISASI %
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{3441}{3500} \times 100$	97,46
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{940}{3500} \times 100$	35,86
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{17}{17} \times 100$	100

4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{24}{24} \times 100$	100

(b) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Pelayanan trantibum	Terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan trantibum	100	100	100
	Persentase Terpenuhinya kebutuhan dasar pelayanan trantibum			

F. Urusan Wajib Sosial.

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkankesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial. Capaian kinerja urusan wajib Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Wajib Sosial Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	20,37	30,67	49,62	54,02	57,71	73,65
2	Persentase PPKS yang tertangani	73,13	73,92	72,12	77,51	90,92	90,67
3	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,13	94,37	94,14	95,59	92,50	83,49
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	60,45	60,45	65,32	70,15	70,15	70,15
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam jiwa						240.886

Sumber : Dinas Sosial, 2023.

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.2.33

Realisasi Pencapaian Target SPM Bidang Sosial Kabupaten Pringsewu, Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	CAPAIAN KABUPATEN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan pengemis di luar panti.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan pengemis di luar panti.	<i>Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i> _____ x100% <i>Populasi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan pengemis di luar panti</i>	100%	71.97%	71.97%
		Persentase (%) penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar serta gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	69.854 jiwa _____ x100% 97.057 jiwa			

No	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	CAPAIAN KABUPATEN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi penyandang disabilitas telantar di luar panti}} \times 100\%$	100%	71.77%	71.77%
		Persentase (%) penyandang disabilitas telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	$\frac{1828 \text{ jiwa}}{2547 \text{ jiwa}} \times 100\%$			
b.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak telantar di luar panti.	$\frac{\text{Jumlah anak telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi anak telantar di luar panti}} \times 100\%$	100%	69.66%	69.66%
		Persentase (%) anak telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	$\frac{43.969 \text{ jiwa}}{63.123 \text{ jiwa}} \times 100\%$			
c.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti.	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di luar panti.	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia telantar di luar panti}} \times 100\%$	100%	76.64%	76.64%
		Persentase (%) lanjut usia telantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	$\frac{24.053 \text{ jiwa}}{31.383 \text{ jiwa}} \times 100\%$			
d.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti.	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti.	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis di luar panti}} \times 100\%$	100%	100%	100%
		Persentase (%) gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	$\frac{4}{4} \times 100\%$			

No	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	FORMULASI/ PERHITUNGAN	CAPAIAN KABUPATEN		
		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/ kota.	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%
		Persentase (%) korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/ kota.	$\frac{31 \text{ kk}}{31 \text{ kk}} \times 100\%$			
e.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan bencana sosial.	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan sosial.}} \times 100\%$	100%	100%	100%
		Persentase (%) korban bencana alam dan sosial skala kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah.	$\frac{31 \text{ kk}}{31 \text{ kk}} \times 100\%$			

Pada tahun 2022, tidak terdapat penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di luar panti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu selaku Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan SPM Sosial di Kabupaten Pringsewu. Selain itu, juga tidak tersedia data yang menggambarkan populasi/ jumlah gelandangan dan pengemis keseluruhan di Kabupaten Pringsewu yang berhak mendapatkan jenis pelayanan dasar sesuai dengan kriteria standar dan mutu pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Karena jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social dasar berjumlah 0 (nol) jiwa dari total populasi 0 (nol) jiwa, sehingga target pencapaian SPM untuk pelayanan

dasar Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis di luar panti sebesar 0% atau tidak terpenuhi.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

A. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi permasalahan tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru, diharapkan dapat mendorong semakin terbukanyalapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif. Capaian kinerja urusan wajib Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Wajib Tenaga Kerja Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,40	67,96	68,60	68,69	67,03	73,17
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,63	4,13	4,95	5,77	4,85	4,77
3	Rasio penduduk yang bekerja	95,37	95,87	95,08	94,23	95,15	95,23
4	Pekerja yang menjadi peserta jamsostek	39,14	41,95	43,21	53,20	54,26	55,30
5	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0,07	0,13	0,04	0,08	0,08	0,08
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	93,75	94,24	93,35	93,80	93,80	93,80
7	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	54,83	55,12	55,35	56,67	57,80	58,25
8	Keselamatan & perlindungan (menerapkan K3)	70,15	47,68	55,75	70,05	72,00	73,23
9	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	39,14	41,95	43,21	53,20	54,26	54,26
10	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	83,75	80,25	85,55	87,05	87,05	87,05
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1,26	1,35	1,55	1,30	1,30	1,30

12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1,44	1,27	1,75	2,05	2,05	2,05
13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	1,51	1,25	1,29	2,50	2,50	2,50
14	Rasio lulusan S1/S2/S3	18,75	22,18	25,56	25,50	25,50	25,50

Sumber : Dinas Tenaga dan Transmigrasi, 2023.

B. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pengarusutamaan. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Capaian kinerja urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
 Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20,97	28,01	28,74	30,00	30,67	30,97
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	35,10	35,10	27,10	27,06	27,61	27,91
4	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,15	0,15	0,30	0,07	0,06	0,055
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	59,40	38,96	35,45	50,27	51,03	50,27
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pemberd. Peremp, & PP, Peng. Penduduk & KB, 2023.

C. Urusan Wajib Pangan.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Program dan kegiatan dalam urusan pangan dilaksanakan dalam rangka penguatan cadangan pangan, aksesibilitas pangan dan ketersediaan informasi dan peningkatan mutu konsumsi pangan. Capaian kinerja urusan wajib Pangan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketersediaan pangan utama	183,706	199,068	199,068	260,105	503,988	339.777
2	Ketersediaan daging, ikan dan telur.	23,276	23,649	23,649	34,674	29.949	30.821
3	Skor Pola Pangan Harapan	86,1	86,5	88,1	88,5	89,2	89,4
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	69,57	88,10	94,70	95,90	95,50	90,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023.

D. Urusan Wajib Pertanahan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Bidang Pertanahan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Antara lain pemberian izin lokasi dalam satu Daerahkabupaten; penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten; penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam kabupaten; penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten; penerbitan izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan penatagunaan lahan sesuai dengan daya dukung lahan dan memastikan bahwa penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah, telah sesuai dengan arahan dan fungsi kawasan, sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2043.Capaian kinerja urusan wajib Pertanahan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pertanahan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase luas lahan bersertifikat	28,14	29,53	30,15	31,24	36,94	36,94
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penyelesaian izin lokasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023.

E. Urusan Wajib Lingkungan Hidup.

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik danbijaksana. Adapun capaian kinerja urusan wajib Lingkungan Hidup, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38
 Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	47,14	45,17	45,10	63,34	63,33	50,65
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	80,08	85,25	85,75	87,40	86,03	86,76
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas lingkungan (Tutupan Lahan)	NA	26,83	26,83	26,83	23,63	59,33
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	68,57	71,15	73,21	86,58	87,04	76,92
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	2	1	1	0	0	0
9	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidakada	Tidakada	Tidakada	Ada	Ada	Ada
10	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100

11	Timbulan sampah yang ditangani	23,20	24,10	25,10	44,50	45,56	25,1
12	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	00,00	00,00	00,00	00,00	11,88	8,68
13	Persentase cakupan area pelayanan	33,84	57,48	63,85	69,01	69,01	69,01
14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	23,28	24,17	25,13	44,50	45,56	25,1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

F. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), AktaNikah, Akta Kematian. Adapun capaian kinerja urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	87,18	98,34	96,75	96,36	98,07	95,98
2	Rasio keluarga memiliki KK per satuan penduduk	82,40	87,70	88,95	91,66	91,66	99,56
3	Rasio bayi berakte kelahiran	92,00	92,84	90,71	92,37	95,68	99,95
4	Rasio pasangan berakte nikah	70,40	74,62	75,25	75,30	75,85	40,05
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	88,35	91,66	96,75	96,36	97,49	95,98
8	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	82,40	87,70	88,95	91,66	92,45	99,56
9	Cakupan penerbitan akta kelahiran (baru lahir thn)	92,80	92,84	92,57	92,37	99,21	99,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2023.

G. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kewenangan Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pada saat ini, dengan adanya Dana Desa dan program-program lainnya yang diarahkan ke desa atau pekon, maka tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi bertambah yaitu berupaya untuk memastikan bahwa program-program yang diarahkan ke Pekon, dapat berjalan sesuai ketentuan. Adapun capaian kinerja urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	61,75	63,25	65,22	78,15	97,50	93,65
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3,50	3,50	3,50	4,00	4,20	4,50
4	Persentase LSM aktif	68,95	70,10	72,65	77,78	78,15	80,00
5	Persentase LPM Berprestasi	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
6	Persentase PKK aktif	72,65	77,78	78,15	79,00	81,90	82,00
7	Persentase Posyandu aktif	75,22	76,35	79,32	82,78	85,50	95,25
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	20,75	23,14	25,50	27,29	27,50	57,00
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	30,10	35,45	37,19	40,17	43,50	44,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, 2023.

H. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Selain upaya

pengendalian, juga dilakukan peningkatan kualitas kehidupan keluarga melalui program Keluarga Berencana, yang melibatkan suami istri untuk proaktif. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Adapun capaian kinerja urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,87	0,84	0,74	0,73	0,43	0,41
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,40	2,31	2,31	2,30	2,43	2,43
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,66	1,63	1,62	1,60	1,60	2,43
4	Ratio Akseptor KB (seluruh peserta KB)	75,37	76,15	76,90	72,17	71,50	63,55
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (Angka KB Aktif)	73,56	74,12	73,88	73,20	71,58	63,55
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2,61	10,14	12,54	12,83	13,82	18,39
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4,78	5,40	5,75	4,20	4,20	63,55
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	70,11	72,25	72,55	82,82	82,82	44,44
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72,15	73,33	73,75	75,74	75,74	22,22
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	67,29	67,96	68,75	84,38	84,38	22,22
11	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	40	45	50	50	50	50

Sumber : Dinas Pemberd. Peremp, & PP, Peng. Penduduk & KB, 2023.

I. Urusan Wajib Perhubungan.

Urusan wajib perhubungan dilaksanakan melalui pengelolaan arus penumpang di daerah, pelayanan kelayakan kendaraan di jalan melalui uji kir, pemenuhan sarana dan prasarana pendukung keselamatan di jalan berupa rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. Adapun capaian kinerja urusan wajib Perhubungan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	23.166	25.260	24.970	20.450	22.462	26.000
2	Rasio ijin trayek	0,51	0,51	0,01	0,0084	0,0084	0,000
3	Jumlah uji kir angkutan umum	5.817	5.099	5.187	3.551	6.444	6.028
4	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	1,20	1,14	1,29	1,58	1,58	1,31
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	79,22	70,35	71,85	81,65	87,16	82,59
7	Pemasangan rambu-rambu	54,74	55,04	55,78	58,39	63,14	85,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,14	0,13	0,11	0,10	0,10	0,076

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023.

J. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Adapun capaian kinerja urusan wajib Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	66,67	77,78	77,78	77,78	78,15	100,00
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	29,78	35,55	42,34	49,13	84,44	86,44
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	18,71	28,17	40,98	56,12	60,41	64,41
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	16,83	25,41	32,45	41,03	84,44	84,44
6	Indeks SPBE	NA	2,29	2,18	2,93	2,03	2,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023.

K. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pada saat ini, koperasi masih menjadi soko guru bagi perekonomian. Namun masih terjadi trend penurunan keberadaan koperasi yang aktif. Begitu juga dengan UMKM juga masih membutuhkan sentuan positif supaya mampu bersaing. Adapun capaian kinerja urusan wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase koperasi aktif	NA	40,68	43,07	44,14	45,27	47,12
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	61,93	62,14	62,47	63,57	100,00	100,00
3	Persentase BPR/LKM aktif	59,67	62,30	65,57	66,54	100,00	79,62
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	95,91	96,45	98,97	98,65	99,99	99,99

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindust, 2023.

L. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Masuknya investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena ini maka kemudahan-kemudahan bagi investor terus diberikan. Adapun capaian kinerja urusan wajib Penanaman Modal, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	41	43	45	48	75	122
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	10.110 Juta	16.879 Juta	34.492 Juta	25.587 Juta	25.586 Juta	715.904 Juta

3	Rasio daya serap tenaga kerja	27,12	23,76	13,71	7,71	8,40	2,44
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	37,08	66,95	107,30	-26,10	-1,05	3,05

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023.

M. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga.

Peran pemuda dalam pembangunan, selalu di dorong melalui upaya menggerakkan kegiatan kepemudaan berupa kegiatan kreatif maupun untuk peningkatan perekonomian. Capaian kinerja urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	35,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
2	Persentase wirausaha muda	25,62	25,85	26,51	30,75	31,00	35,20
3	Cakupan pembinaan olahraga	67,32	79,84	88,11	87,04	88,00	69,00
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	12,65	13,22	15,57	20,21	24,51	56,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	22,89	23,15	23,75	15,03	17,34	32
6	Jumlah atlet berprestasi	156	141	158	30	45	12
7	Jumlah prestasi cabang olahraga	78	87	91	15	50	25

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023.

N. Urusan Wajib Statistik.

Pengelolaan urusan wajib Statistik di Kabupaten Pringsewu masih mengandalkan data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Pringsewu. Adapun capaian kinerja urusan wajib Statistik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kunjungan wisata	16.041	140.463	143.395	77.439	25.200	119.073
2	Lama kunjungan Wisata	1,05	1,25	1,37	1,28	1,50	1,50

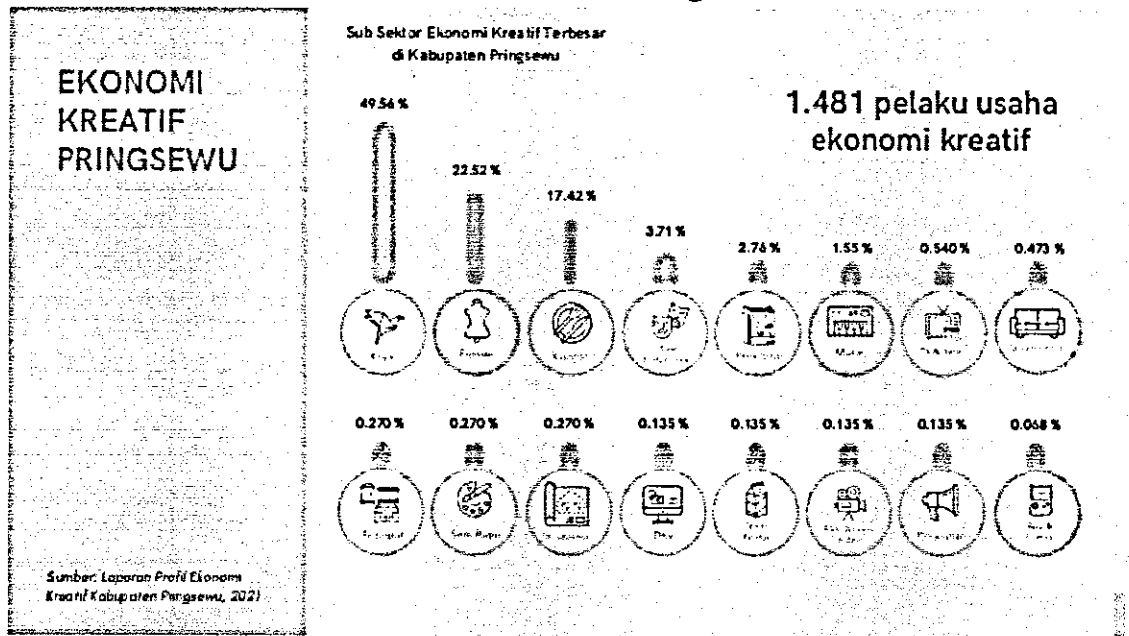
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2023.

Jumlah kunjungan wisata pada tahun 2022 jauh meningkat dari Tahun 2021 yang sempat anjlok dikarenakan pandemi covid-19. Pada tahun 2022 dimana kondisi pandemi yang sudah melandai, menjadikan pariwisata mulai pulih kembali meskipun belum menyamai seperti di Tahun 2018 dan 2019, namun hal ini sudah jauh lebih baik. mengapa lama kunjungan wisata meningkat adalah rasa nyaman dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pariwisata. Semakin lama seorang wistawan tinggal disuatu daerah tujuan wisata semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi penginapan selama tinggal. Karena itu maka Pemerintah memiliki peran yang tinggi untuk memberikan rasa nyaman dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi wisatawan. Apalagi sektor pariwisata ternyata mampu untuk menjadi pintu masuk dala menggerakkan UMKM di sekitar objek wisata yang ada

Objek wisata di Kabupaten Pringsewu menyebar di seluruh Kecamatan. Namun untuk saat ini tengah digencarkan wisata alam di sekitar area Bendungan Way Sekampung dan telah ditetapkannya Kampung Tapis yang berada di Pekon Lugusari. Diharapkan dengan bisa sinerginya pekon lugusari dengan pengelolaan area wisata di sekitar bendungan Way Sekampung maka jumlah wisatawan akan semakin meningkat. Dari seluruh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pringsewu, semuanya merupakan wisatawan domestik, belum ada wisatawan dari mancanegara.

Untuk Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh sub sektor Kriya sebesar 49,56%, Fesyen sebesar 22,52%, kuliner sebesar 17,42%, dan penerbitan 2,76%. Selebihnya berada dibawah angka 2%. Persentase pelaku Ekonomi kreatif di Kabupaten Pringsewu disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.08
Ekonomi Kreatif Pringsewu



Sumber : Laporan Profil Ekonomi Kreatif, 2021

B. Urusan Pilihan Pertanian.

Tujuan dari pembangunan pertanian antara lain, untuk menumbuhkan kembangkan usaha pertanian di desa yang akan memacu aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan industri hulu dan hilir serta penunjang peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian.

Program Kartu Petani Berjaya di Kabupaten Pringsewu adalah program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan telah diadakan kegiatan implementasi Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) secara serentak se-Kabupaten Pringsewu. Sesuai data 2021, total penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui aplikasi e-KPB oleh 89.146 petani ini mencapai 2.589 transaksi dengan nominal sebesar 15 miliar rupiah atau 53,5 persen dari total transaksi melalui e-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp 28.042.321.920,-.Sementara di tahun 2022, penebusan pupuk bersubsidi Kabupaten Pringsewu melalui e-KPB terhitung sejak Januari sampai dengan 10 Mei 2022 telah dilakukan transaksi oleh 4.087 petani dengan nilai transaksi Rp 742 juta rupiah atau sebesar 39,6% dari nilai total penebusan pupuk melalui e-KPB Provinsi Lampung sebesar Rp 1.779.238.000,-

Guna membuka peluang pasar serta menjajaki kerjasama di bidang agribisnis, Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu tampilkan beragam produk olahan hasil karya para Kelompok Wanita Tani (KWT) se Kabupaten Pringsewu olahan hasil pertanian tersebut berupa Beras Siger yang terbuat dari bahan singkong pilihan, yang di produksi oleh KWT Kartini Maju Pekon Kutawaringin, Kecamatan Adiluwih.Beras

Analog Instan “Siger”, berbahan baku singkong segar produksi KWT Melati, Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara.Beras Merah Mutiara, produksi KWT Mutiara Tani, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo.Kunyit Instan dengan komposisi kunyit dan gula, yang memiliki khasiat menurunkan tekanan darah, obat demam dan diare, produksi KWT Mekar Jaya, Pekon Giri tunggal, Kecamatan Pagelaran Utara.Kopi tanpa campuran, produksi KWT Kartika Tani, Pekon Sumberagung Kecamatan Ambarawa Teh Bunga Rosella yang memiliki khasiat mencegah kekurangan vitamin C, obat diabetes, asam urat, produksi KWT Putri Ayu, Pekon Ambarawa Timur.Selain itu, masih ada produk makanan lainnya seperti telur asin, ragining, wajik legit, wajik kacang ijo, sagon jagung, gula merah, kerak nasi, opak, jipang pisang dan jipang ketan.

Capaian kinerja urusan pertanian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53
 Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian
 Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan terhadap PDRB	25,81	25,36	24,69	25,39	24,11	23,92
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	54.1	55.5	52.5	56.8	56,6	56,5
3	Cakupan bina kelompok petani	77,60	76,50	76,63	79,30	80,39	80,48

Sumber : Dinas Pertanian, 2023.

Hasil produksi padi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.54
 Hasil Produksi Padi di Kabupaten Pringsewu 2020-2022

Padi	Luas Panen (Ha), Produksi (Ton), dan Produktivitas Padi (Ku/Ha) di Kabupaten Pringsewu		
	2020	2021	2022
Luas Panen	23041.49	21574.65	23534.41
Produksi	130867.36	122185.57	135731.10
Produktivitas	56.80	56.63	57.67

Sumber : BPS Tahun 2022

Hasil produksi tanaman buah dan sayur tahunan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.55
 Hasil Produksi tanaman buah dan sayur Tahunan di Kabupaten
 Pringsewu 2021-2022

Jenis Tanaman Buah dan Sayur Tahunan	Produksi Tanaman Buah dan Sayuran Tahunan (Kuintal)	
	2021	2022
Alpukat	6280	5412
Anggur	0	25
Apel	0	0
Belimbing	1616	1223
Buah Naga	6525	5414
Duku	2135	60
Durian	4925	1119
Jambu Air	1601	1113
Jambu Biji	4326	1743
Jengkol	1519	1514
Jeruk Lemon	72	132
Jeruk Pamelor	0	0
Jeruk Siam/Kepron	260	333
Lengkeng	276	271
Mangga	6299	6628
Manggis	917	19
Melinjo	745	248
Nangka	5495	1788
Nenas	41	24
Pepaya	224898	49517
Petai	354	590
Pisang	121067	47976
Rambutan	4225	2108
Salak	20	26
Sawo	4380	2835
Sirsak	2331	1411
Sukun	952	495

Sumber : BPS Tahun 2022

Hasil produksi tanaman sayur semusim ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.56
 Hasil Produksi sayur dan buah semusim di Kabupaten Pringsewu 2021-2022

Jenis Tanaman Sayuran dan Buah Semusim	Produksi Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim di Kabupaten Pringsewu	
	2021	2022
Bawang Daun	1450.50	450.00
Bawang Merah	3383.38	3910.00

Bawang Putih	0.00	0.00
Bayam	1714.00	986.00
Buncis	231.00	450.50
Cabai Besar/TW/Keropong	15583.00	1485.00
Cabai Keriting	18145.00	60306.75
Cabai Rawit	6304.50	12814.00
Jamur Lainnya	8955.00	10.00
Jamur Merang	0.00	47.00
Jamur Tiram	24828.00	4588.00
Kacang Panjang	3226.00	2521.25
Kangkung	6072.00	7395.00
Kembang Kol	0.00	0.00
Kentang	0.00	0.00
Kubis	0.00	500.00
Labu Siam	115.00	0.00
Melon	160.00	0.00
Mentimun	3175.50	3131.00
Paprika	0.00	0.00
Petsai/Sawi	6837.00	9259.75
Semangka	1487.00	57.00
Stroberi	0.00	0.00
Terung	21662.50	10110.89
Tomat	12981.00	11352.50
Wortel	0.00	0.00

Sumber : BPS Tahun 2022

Hasil produksi tanaman perkebunan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.57
 Hasil Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2022

Kecamatan	Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Pringsewu (Ton)									
	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Tebu	Teh	Temba kau	Cengkeh	Lada
	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Pardasuka	3	226	21	450	394	-	-	-	33	91
Ambarawa	-	41	-	-	12	-	-	-	-	-
Pagelaran	49	64	22	28	205	-	-	-	-	5
Pagelaran Utara	119	34	89	113	936	-	-	-	11	20
Pringsewu	-	17	29	-	6	-	-	-	-	-
Gadingrejo	-	110	27	-	30	-	-	-	-	-
Sukoharjo	213	1719	162	70	284	-	-	-	3	23
Banyumas	235	306	98	18	621	-	-	-	4	14
Adiluwih	291	778	62	15	541	-	-	-	3	4
Kabupaten Pringsewu	910	3295	510	694	3029	0	0	0	54	157

Sumber : BPS Tahun 2022

Perkebunan di Kabupaten Pringsewu secara umum masih dijual dalam bentuk hasil panen mentah dan sesuai harga pasar, belum diolah menjadi produk lain sehingga belum ada nilai tambah bagi petani.

C. Urusan Pilihan Perdagangan.

Tujuan pembangunan sektor perdagangan antara lain, peningkatan akses pasar, perbaikan iklim usaha perdagangan, peningkatan daya saing produk perdagangan, peningkatan kinerja sektor perdagangan dan peningkatan perlindungan konsumen. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perdagangan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	13,63	13,85	14,34	13,68	14,15	15,75
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	10,37	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdag, dan Perindst, 2023.

D. Urusan Pilihan Perindustrian.

Pembangunan sektor industri dilakukan melalui strategi memperkuat keterkaitan mata rantai; peningkatan nilai tambah melalui kompetisi yang sehat; dan peningkatan produktivitas. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perindustrian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perindustrian
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	15,44	15,56	15,62	14,94	15,23	15,23
2	Jumlah pengrajin	2.485	2.680	2.895	3.031	3.043	3.043
3	Jumlah pengrajin yang mendapat pembinaan	650	800	975	1.125	1.127	1.127
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	26,16	29,85	33,68	37,12	39,12	39,12

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perdag, dan Perindst, 2023.

E. **Urusan Pilihan Transmigrasi.**

Kebijakan transmigrasi, bukan hanya pemindahan penduduk, namun lebih berorientasi pada pengembangan wilayah berdasarkan kerja sama antara daerah. Capaian kinerja Urusan Pilihan Transmigrasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Transmigrasi
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah rumah tangga calon transmigrasi	20	0	76	0	0	5
2	Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan	20	0	5	0	0	5
3	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100	0,00	6,56	0	0	100,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023.

F. **Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan.**

Potensi perikanan darat di Kabupaten Pringsewu sangat menjanjikan dan mampu menyuplai kebutuhan di daerah-daerah lain. Potensi ini menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan urusan perikanan. Apalagi sesuai dengan RTRW juga telah ditetapkan wilayah minapolitan. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Adapun komoditas unggulan di Kabupaten Pringsewu adalah ikan lele, mas, patin, nila dan gurame. Sebagian besar komoditi perikanan Kabupaten Pringsewu berada di Kecamatan Pagelaran.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Produksi perikanan	7.115	7.157	7.317	11.819	12.261	12.674
2	Konsumsi ikan	24,14	24,52	24,88	27,63	27,76	32,15
3	Cakupan bina kelompok perikanan.	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50

Sumber : Dinas Perikanan, 2023.

Komoditas unggulan di Kabupaten Pringsewu adalah ikan lele, mas, patin, nila dan gurame. Produksi perikanan, konsumsi ikan, dan cakupan bina kelompok perikanan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan sinergi antara penyuluh perikanan dalam hal ini adalah Dinas Perikanan, dengan para petani ikan dalam kelompok-kelompok perikanan yang terjalin semakin baik sehingga

mampu mendorong produksi perikanan. Juga kesadaran akan masyarakat semakin baik dalam mengkonsumsi ikan, sehingga cakupan masyarakat mengkonsumsi ikan juga meningkat.

Tabel. 2.62
Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis ikan

Kecamatan	Nila	Mas	Gurame	Lele
<i>Subdistrict</i>				
-1	-2	-3	-4	-5
Pardasuka	469,25	769,61	938,31	2 160,00
Ambarawa	101,81	330,62	1 038,18	2 782,20
Pagelaran	6 537,15	27 400,93	7 890,05	37 238,28
Pagelaran Utara	1 027,71	1 426,48	703,98	1 112,75
Pringsewu	400,05	830,31	1 425,80	1 577,54
Gading Rejo	630,71	120,14	2 677,05	2 303,00
Sukoharjo	965,14	664,46	1 166,22	2 013,85
Banyumas	1 566,60	952,23	1 437,65	1 671,05
Adi Luwih	90,16	731,54	367,08	1 183,16
Kabupaten Pringsewu/	11 788,58	33 226,31	17 644,30	52 041,83

Sumber. BPS Pringsewu 2022

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.

A. Urusan Penunjang Perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun melalui tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.Adapun capaian kinerja urusan penunjangn perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Ada

3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023

B. Urusan Penunjang Keuangan.

Pengelolaan urusan penunjang keuangan, mencakup tatalaksana pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan asset daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah. Adapun capaian kinerja urusan penunjang keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan
Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Prosentase PAD terhadap penerimaan daerah	5,15	6,24	7,16	8,19	9,05	11,12
3	Persentase SILPA terhadap APBD	3,73	2,93	3,76	1,00	3,80	5,01
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	33,21	33,23	33,54	30,10	30,63	32,29
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	10,15	11,13	11,39	18,69	15,88	15,93
6	Perbandingan antara belanja operasi dengan total belanja daerah.	62,54	66,74	67,49	70,04	66,90	72,60
7	Bagi hasil kabupaten dan desa	14,03	14,98	16,55	14,68	15,88	14,54
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, 2023.

C. Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka ASN juga harus terlayani hak-haknya. Terutama terkait administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi. Adapun capaian kinerja

urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	100	100	100	95	95
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim II)	6,06	21,88	8,75	17,13	50,00	76,47
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim III)	6,25	9,02	4,10	1,42	29,2	50,36
4	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (Diklatpim IV)	17,74	17,98	11,78	0,48	43,15	46,31
5	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	31	28	29	27	34	34
6	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	131	132	142	139	138	137
7	Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah	452	454	470	429	436	184
8	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.491	3.395	3.533	3.451	3.375	3.978
9	Jumlah ASN yang memasuki masa pensiun	39	71	170	225	307	254
10	Jumlah penerimaan ASN baru dan pindahan.	71	376	321	15	163	563
11	Jumlah seluruh ASN	4.859	4.631	4.793	4.666	4.544	4.880

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2023.

D. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Pringsewu mendorong berbagai pihak untuk

mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan. Kelembagaan penelitian dan pengembangan masih masuk pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang saat ini dipimpin oleh kepala bidang. Kondisi saat ini Bidang Litbang Bappeda Pringsewu memiliki SDM dengan rincian 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda. Selain itu Litbang Bappeda Pringsewu tidak memiliki fungsional peneliti dikarenakan fungsional peneliti hasil penyetaraan jabatan sudah diusulkan perubahan dan sudah dilantik menjadi Analis Kebijakan pada 31 Desember 2022. Dengan kondisi seperti ini Litbang Bappeda Pringsewu masih kekurangan SDM staf fungsional dan staf pelaksana untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikarenakan jumlah SDM yang terbatas. Selain itu terdapat 1 (satu) jabatan Esselon IV/ Fungsional yang belum terisi dikarenakan untuk pengisian harus melalui Uji Kompetensi Fungsional tidak seperti pengisian jabatan Struktural. Untuk kelembagaan Litbang Bappeda Pringsewu sudah membuat Telaah Staf yang ditujukan ke Penjabat Bupati Pringsewu terkait Kelembagaan Litbang Bappeda Pringsewu dengan beberapa opsi yang dapat dipilih terkait kelembagaan Litbang, antara lain tetap bertahan menjadi Bidang dalam BAPPEDA, menjadi Balitbangda, BRIDA, BAPPERIDA, BRISKADA (Badan Riset Inovasi dan Strategi Kebijakan Daerah), atau BAPPERISKADA. Selain peraturan perundang-undangan, Telaah Staf tersebut antara lain dibuat berdasarkan hasil konsultasi ke Balitbangda Provinsi Lampung, kunjungan deputi BRIN ke Provinsi Lampung, konsultasi ke BSKDN (Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri) Kemendagri, serta Rakornas Kelembagaan Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh BSKDN Kemendagri

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2020 memperoleh nilai 3047 peringkat 54 dari 415 Kabupaten kategori Sangat Inovatif. Namun tahun 2021 terjadi penurunan yakni Pringsewu berada di peringkat 94 dari 415 Kabupaten dengan nilai 50,35 dan masuk kategori inovatif. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan nilai dan skor untuk Kabupaten Pringsewu, yakni memperoleh Skor 56,83 dengan peringkat 51 dari 415 Kabupaten, namun masih berada dalam kategori inovatif.

Capaian Indeks Daya Saing Daerah pada Tahun 2019 Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 2,0140 dan memperoleh predikat rendah. Saat itu rentang nilai yang digunakan adalah 0-3 untuk kategori rendah, 3,01-6 untuk kategori sedang, 6,01-8 masuk ke dalam kategori tinggi, dan 8,01 sd 12 masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Pada Tahun 2020 Kabupaten Pringsewu memperoleh nilai 1,5887 dan masuk dalam kategori sedang. Pada tahun tersebut BRIN sebagai pihak pelaksana telah mulai menerapkan rentang nilai yang baru, yakni 0-1,25 masuk kategori rendah, 1,26 -2,50 masuk ke dalam kategori sedang, 2,51 -3,75

untuk kategori tinggi dan 3,76 -5 masuk dalam kategori sangat tinggi. Tahun 2021, Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori tinggi, dengan perolehan nilai 3,068. Sementara pada Tahun 2022, Pemda tidak lagi melakukan penginputan IDSD dikarenakan BRIN mengambil data sekunder langsung ke produsen data (BPS, BPK, KPK, Dewan Pers, Kementerian dll). Pada tahun tersebut Kabupaten Pringsewu termasuk salah satu dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang skor akhirnya tidak keluar. Dimana nilai yang kosong ada pada pilar 1(satu) yakni institusi yang mencakup 6 dimensi dan 14 indikator.

Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan Tahun 2021 lalu, berikut ini adalah perolehan nilai Kabupaten Pringsewu untuk Tahun Anggaran 2018 sd 2020. Tahun 2018, perolehan skor IPKD 60.0415 dengan kategori Baik, Tahun 2019 memperoleh skor 58,0682 dengan kategori perlu perbaikan, serta Tahun 2020 masuk dalam kategori baik dengan skor 71,5030. Untuk skor penilaian tahun 2021 yang dilakukan tahun lalu, Kabupaten Pringsewu memperoleh skor 72,7044 dengan kategori Perlu Perbaikan. Sebagai upaya perbaikan terhadap skor tersebut, telah dilakukan konsultasi pada BSDKN Kemendagri terkait IPKD.

Adapun capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66
 Capaian Kinerja Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	7	14	21	28	35	35
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	5	12	18	26	30	30
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	10	12	18	20	38	38
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	0	0	0	0	1	1

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023.

E. Urusan Penunjang Pengawasan.

Dalam rangka memastikan bahwa sistem pemerintahan dan proses pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka kepala daerah dibantu oleh unsur pengawas atau inspektorat yang berupaya untuk menegakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun capaian kinerja urusan pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.67
 Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Tahun 2017-2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase tindak lanjut temuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelanggaran pegawai (sangsi disiplin)	4	5	5	3	1	4
3	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat	37	24	31	47	13	5
4	Jumlah temuan BPK	20	13	10	6	9	12
5	Level APIP	Level1	Level2	Level2	Level3	Level3	Level3

Sumber : Inspektorat Pringsewu, 2023.

F. **Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah menyelenggaraan sistem pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada perangkat daerah.Adapun capaian kinerja urusan penunjang SekretariatDaerahadalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
 Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	C	CC	CC	B	B	B
2	Prosentase tempat peribadatan yang mendapat pembinaan (bantuan)	86,55	89,55	89,70	90,15	100,00	99,86
3	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan.	18	6	10	9	14	7
4	Jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan.	55	67	74	52	40	33

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023.

G. **Urusan Penunjang Sekretariat Dewan.**

Sekretariat Dewan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Terutama dalam melakukan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Adapun capaian kinerja urusan Sekretariat Dewan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
 Capaian Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat Dewan
 Tahun 2017-2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Than 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Prosentase realisasi Program Legislasi Daerah (Prolegda)	81.55	100	75.00	70.00	80.00	80.00

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi daerah dengan cara mengelola aset dan daya tarik yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menganalisis daya saing daerah adalah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Analisis indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dilakukan untuk menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Adapun pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Pringsewu, dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.70
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah konsumsi makanan per kapita	376.829	431.081	442.659	483.571	513.611	530.499
2	Jumlah konsumsi non pangan per kapita	310.142	379.724	394.030	445.611	447.975	436.932
3	Total konsumsi per kapita	686.971	810.805	836.689	929.182	961.586	967.431

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

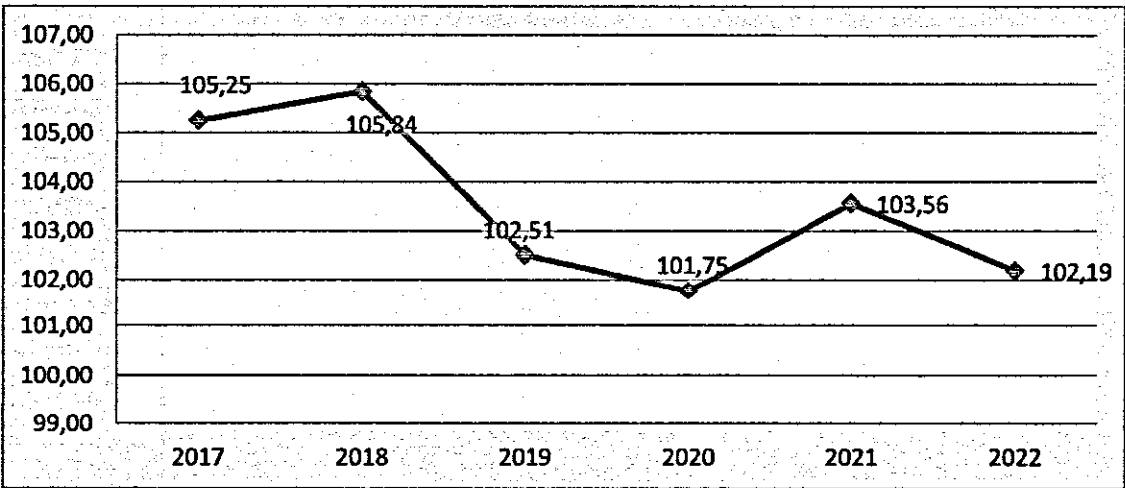
B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Hasil perbandingan indeks itu kemudian di kategorikan dalam tiga kategori, yaitu ; *Pertama*, $NTP > 100\%$, berarti petani mengalami surplus, dimana pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran; *Kedua*, $NTP = 100\%$ berarti petani mengalami impas, dimana pendapatan petani sama dengan angka pengeluaran; *Ketiga*, $NTP < 100\%$, berarti petani mengalami defisit, dimana harga barang produksinya lebih kecil dibandingkan dengan harga barang yang dikonsumsi.

Secara umum sejak tahun 2017, nilai tukar petani di Kabupaten Pringsewu selalu berada di atas nilai 100 dan cenderung naik, yang berarti mengalami surplus. Namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, namun dapat naik kembali di tahun 2021. Akan tetapi menurun kembali di 2022. Adapun Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.09

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Pringsewu 2017-2022



Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

C. **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita.**

Data pengeluaran konsumsi non pangan dibutuhkan untuk dapat mengetahui seberapa atraktifnya, keluarga memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga untuk mengetahui beberapa variabel lain yang turut andil dalam pembentukan pola konsumsi non pangan di masyarakat, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan status pekerjaan. Adapun pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Pringsewu, dapat diketahui dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Total pengeluaran rumah tangga non pangan.	310.142	379.724	394.030	445.611	447.975	436.932
2	Total pengeluaran rumah tangga	686.971	810.805	836.689	929.182	961.586	967.431
3	Rasio pengeluaran Rumah Tangga non pangan (3 : 4)	45,15	46,83	47,09	47,96	46,59	45,16

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

2.1.4.2. **Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.**

A. **Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan.**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk dapat mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses kepada setiap kendaraan, yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membangun fasilitas jalan. Adapun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.72
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah kendaraan Roda empat atau lebih.	8.354	9.578	10.537	11,292	15.255	16.321
2	Panjang jalan (km) yang ada (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten)	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1.206,27	1.206,27

3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (1 : 2)	0,14	0,13	0,11	0,10	0,079	0,06

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023.

B. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

Indikator ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan untuk mengetahui ketaatan masyarakat dan swasta terhadap regulasi Tata Ruang, sehingga tidak melebihi daya tampung dan daya dukung yang telah di sediakan. Adapun data ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.73
Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ketaatan terhadap struktur ruang	57,50	58,10	64,09	64,33	70,50	81,1
2	Ketaatan terhadap pola ruang	58,13	54,76	57,73	57,65	52,94	80,48
3	Rata-rata ketaatan terhadap struktur dan pola ruang	57,82	56,43	60,91	60,99	61,72	80,79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2023.

C. Luas Wilayah Produktif.

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai RTRW. Kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan disekitarnya. Indikator ini mengukur luas wilayah produktif dibandingkan dengan luas seluruh wilayah dan mencerminkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Luas wilayah produktif di Pringsewu, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas wilayah produktif di lapangan	36.441	38.565	39.695	41.225	41.750	35.315
2	Luas wilayah budidaya sesuai RTRW	46.148	46.148	46.148	46.148	46.148	46.148
3	Rasio wilayah produktif	78,97	83,57	86,02	89,33	90,47	76,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2023.

D. Luas Wilayah Perkotaan.

Wilayah perkotaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama non pertanian, dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan tingkat urbanisasi dan proporsi ekonomi non-pertanian di suatu daerah. Kinerja luas wilayah perkotaan di Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75
Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi luas wilayah perkotaan	6.098	6.105	6.114	6.125	6.134	7.939
2	Luas wilayah perkotaan sesuai RTRW	7.939	7.939	7.939	7.939	7.939	7.939
3	Rasio luas wilayah perkotaan	76,81	76,90	77,01	77,15	77,26	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2023.

E. Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Kehadiran fasilitas bank yang diukur dengan jenis dan jumlah serta cabang-cabangnya di daerah mencerminkan fasilitas yang memudahkan penduduk untuk transaksi keuangan. Adapun jumlah bank dan cabangnya di wilayah Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.76
Jenis dan Jumlah Bank serta Cabangnya di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Bank Milik Pemerintah	19	19	19	19	19	17
2	Jumlah Bank Milik Swasta	15	15	15	15	15	10
3	Jumlah seluruh Bank di Pringsewu	39	39	39	39	39	27

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

F. Jenis dan Jumlah Asuransi serta Cabangnya.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada

tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di tanggungkan. Kehadiran fasilitas asuransi yang diukur dengan jenis dan jumlah serta cabang cabangnya di suatu daerah mencerminkan keberadaan fasilitas modern dalam mengelola risiko usaha dan berbagai aktivitas lainnya, serta dapat dianggap sebagai salah satu menunjang kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Tabel 2.77
Jenis dan Jumlah Asuransi serta Cabangnya di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah perusahaan asuransi kerugian dan jiwa konvensional	12	14	14	15	15	15
2	Jumlah perusahaan asuransi kerugian dan jiwa syariah	5	5	5	5	5	5
3	Jumlah keseluruhan Perusahaan Asuransi.	17	19	19	20	20	20

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

G. Jenis dan Jumlah Restoran.

Prosentase jumlah restoran menurut jenis, dan kelas adalah proporsi setiap jenis dan kelas restoran terhadap jumlah seluruh restoran. Restoran adalah perusahaan/usaha yang menyajikan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian. Jumlah restoran menurut jenis, dan kelasnya merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan akses terhadap layanan kuliner terhadap penduduk, selain merupakan indikasi bagi kemampuan suatu daerah mendukung aktifitas perekonomian.

Tabel 2.78
Jenis dan Jumlah Restoran di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Usaha Restoran atau RM Sedang	8	9	11	16	36	78
2	Jumlah Usaha Rumah Makan Sederhana	73	83	105	113	67	67

3	Jumlah seluruh usaha Rumah Makan.	81	112	115	129	103	145

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

H. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan akses terhadap layanan sarana pariwisata terhadap penduduk, selain merupakan indikasi bagi kemampuan suatu daerah dalam mendukung aktifitas perekonomian.

Tabel 2.79
 Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kabupaten Pringsewu
 Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah hotel berbintang	0	1	2	2	2	6
2	Jumlah penginapan	7	7	7	8	8	8
3	Jumlah hotel berbintang dan Penginapan.	7	8	9	10	10	14

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

I. Prosentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih.

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga. Keberadaan air bersih bagi rumah tangga, menjadi indikator bagi daerah, karena mampu meningkatkan derajat kesehatan. Semakin banyak warga masyarakat menggunakan air bersih maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Semakin tinggi nilai indikator ini di suatu daerah, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut menjalankan otonomi. Adapun prosentase rumah tangga menggunakan air bersih, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.80
 Prosentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih di
 Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Rumah Tangga memiliki akses air bersih	90,61	93,75	97,89	97,94	97,94	80,00
2	Jumlah seluruh Rumah Tangga	102.608	104.166	105.749	126.463	126.737	127.373

3	Prosentase Rumah Tangga menggunakan Air Bersih.	90,61	93,75	97,89	97,94	97,94	97,94

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

J. Prosentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik.

Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga, dengan hasil kinerja sebagaimana dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Prosentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik di
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik	100.900	102.499	104.291	125.059	125.355	126.312
2	Jumlah seluruh Rumah Tangga	102.608	104.166	105.749	126.463	126.737	127.373
3	Prosentase Rumah Tangga menggunakan Listrik	92,73	95,49	98,34	98,40	98,62	98,62

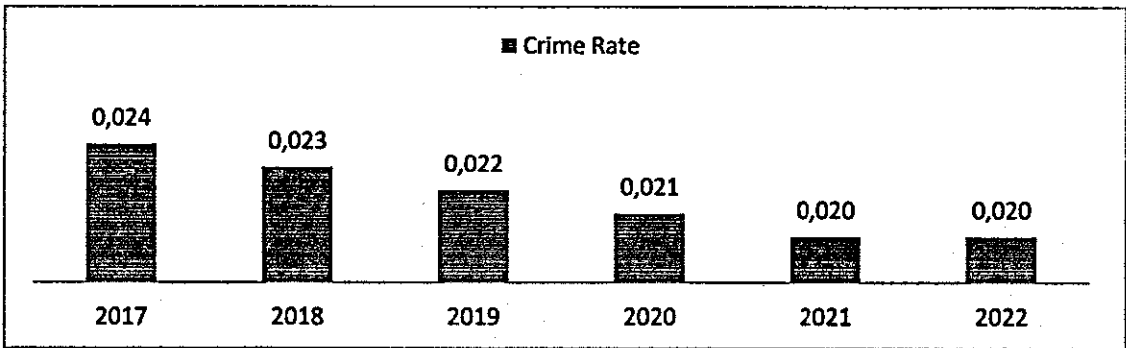
Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas.

Angka kriminalitas di hitung berdasarkan delik aduan dari penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam periode satu tahun per 100.000 penduduk (*crime rate*).Indikator ini merupakan refleksi dari kemampuan suatu daerah untuk menjamin rasa aman bagi penduduk. Adapun angka kriminal di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.10
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023.

B. Jumlah Demonstrasi.

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode satu tahun. Demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal, baik yang ditujukan kepada seseorang maupun kelompok atau pemerintahan. Inidikator ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap suatu kondisi, khususnya akibat dari lahirnya suatu kebijakan.

Tabel 2.82
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bidang Politik	3	3	6	7	1	1
2	Bidang Ekonomi	2	2	3	3	2	1
3	Bidang Sosial Budaya	0	0	0	1	2	2
4	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0	0
5	Jumlah kasus demonstrasi	5	5	9	11	5	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023.

C. Lama Proses Perizinan.

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan. Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem perizinan secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi *Online Single Submission* (OSS) dan aplikasi SiCantik Cloud untuk memproses perizinan yang tidak dilakukan melalui OSS. Adapun jumlah perizinan yang telah diterbitkan di Kabupaten Pringsewu, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.83
Jumlah Perizinan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

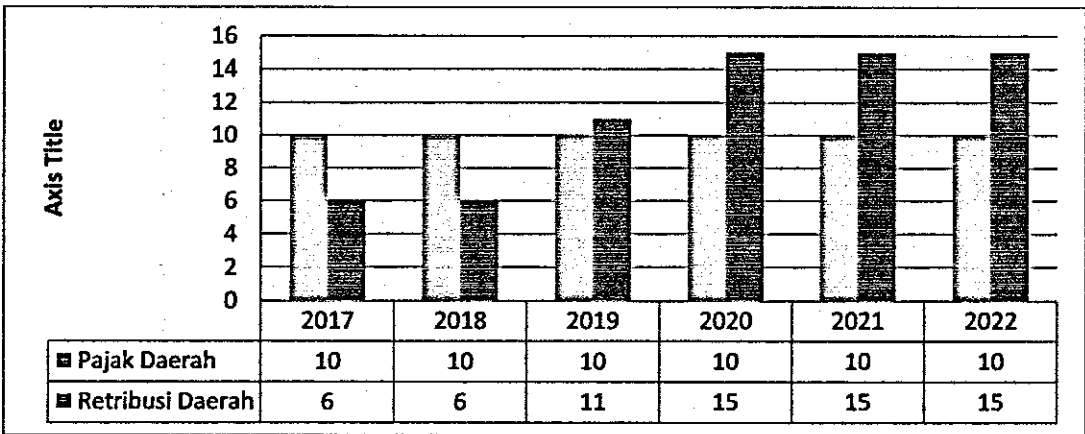
No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah perizinan melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i>	0	142	573	744	940	940
2	Jumlah perizinan melalui aplikasi SiCantik Cloud.	0	0	100	839	832	832
3	Jumlah keseluruhan perizinan yang telah di keluarkan.	1.153	1.214	1.578	1.704	1.946	1.946
4	Rata-rata penyelesaian perizinan melalui aplikasi <i>Online Single Submission</i>	5hari	5hari	5hari	5hari	5hari	5hari
5	Rata-rata penyelesaian perizinan melalui aplikasi SiCantik Cloud.	5hari	5hari	5hari	5hari	5hari	5hari
6	Jumlah perizinan yang ditolak.	4	4	8	10	4	4

Suber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023.

D. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah.

Indikator ini mengukur jumlah dan macam pajak daerah serta retribusi daerah, khususnya jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.

Gambar 2.11
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

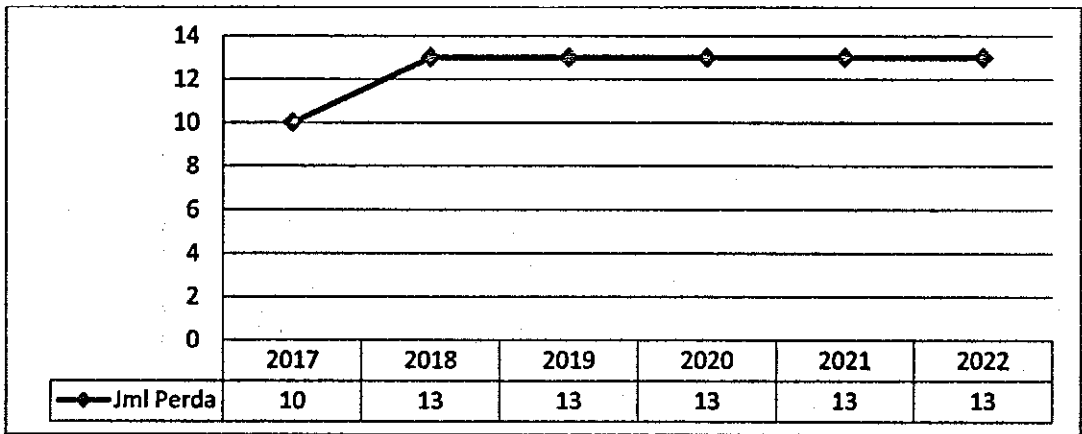


Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2023.

E. Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha.

Indikator ini digunakan untuk melihat kinerja dari pemerintah daerah untuk mendorong iklim investasi dengan mengeluarkan Perda yang terkait. Terutama Peraturan Daerah yang dapat memberikan rasa aman bagi investor dan kemudahan dalam berinvestasi.

Gambar 2.12
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha
di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022



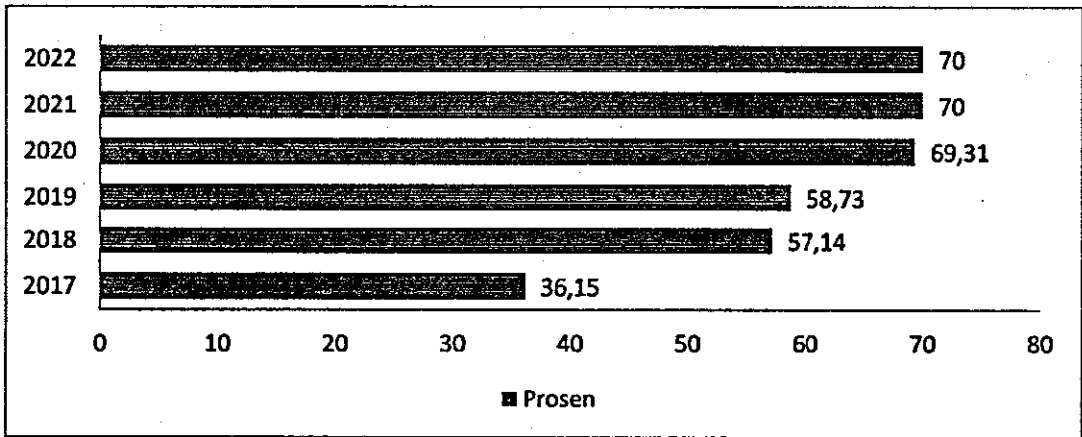
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 2023.

F. Prosentase Desa Swasembada Terhadap Total Desa.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa adalah proporsi jumlah desa swasembada terhadap jumlah desa. Desa Maju atau Desa Swasembada adalah desa yang berkecukupan dalam hal Sumber Daya Manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju. Indikator prosentase desa swasembada ini, menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui perkembangan desa-desa yang ada di dalam suatu wilayah, sebagai penggerak pembangunan di daerah tersebut. Adapun capaian kinerja desa swasembada di Pringsewu, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.13
Desa Swasembada di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

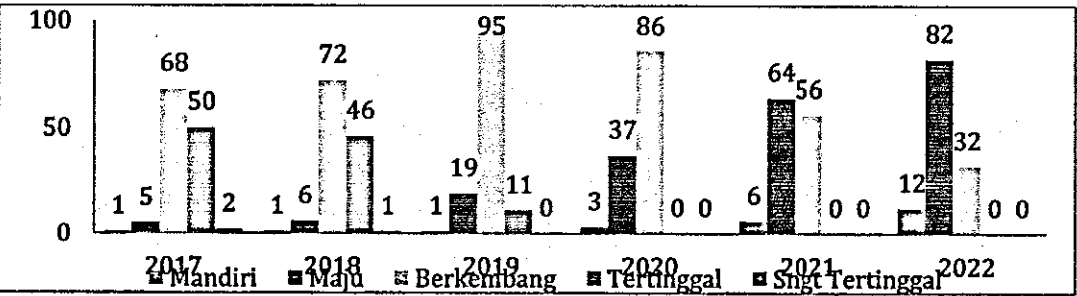


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, 2023.

G. Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.14
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022



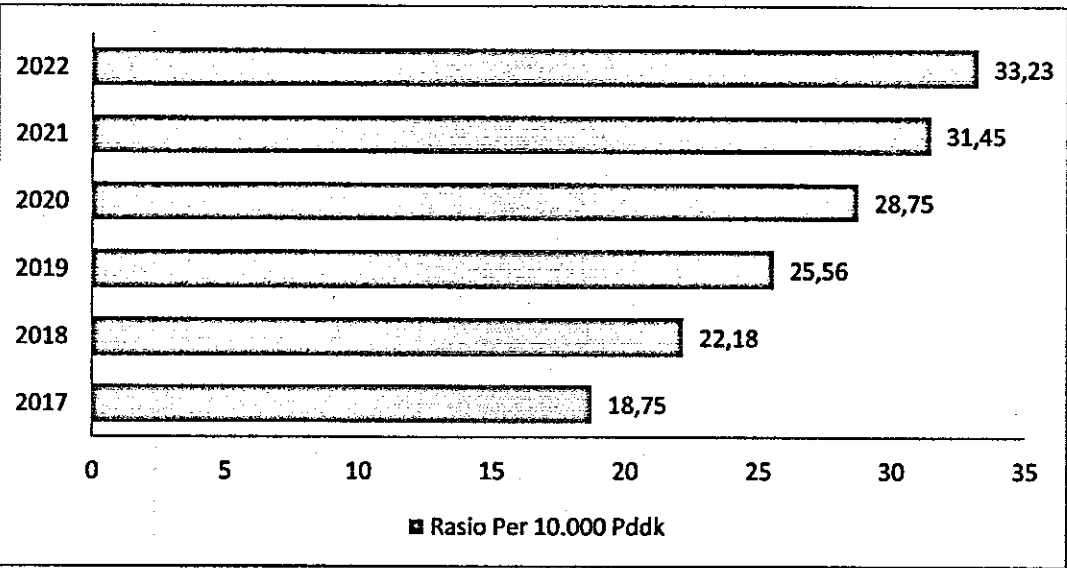
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, 2023.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1, S2 dan S3 per 10.000 penduduk. Hal ini sekaligus untuk mengetahui kualitas ketersediaan tenaga kerja yang ada.

Gambar 2.15
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023.

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).

Angka ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun dianggap penduduk belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang lain.

Tabel 2.84
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun.	107.527	107.535	108.486	102.483	102.002	101.602
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun.	24.389	25.223	26.443	25.771	26.929	28.137
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1+2)	131.916	132.758	134.929	128.254	128.931	129.739
4	Jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun)	261.985	264.461	269.479	277.212	277.892	278.676
5	Rasio ketergantungan	50,4	50,2	50,1	46,3	46,4	31,77

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD/RPD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dan realisasi RPJMD dilaksanakan terhadap tiga hal utama, yaitu :

- a. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu.

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- b. Review Capaian Kinerja RPJMD/RPD.

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD/RPD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD/RPD di akhir tahun periode RPJMD/RPD dapat tercapai.

c. **Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan.**

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Pringsewu Sampai dengan Tahun Berjalan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
URUSANWAJIB DASAR															
PENDIDIKAN															
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi PAUD	72,20	71,82	92.601.658.827	71,95	73.280.360.350	49,24	107.907.000	68,44	0,15	68,44	107.907.000	68,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Sekolah SD	96,70	96,23		96,55		100,90		104,51		104,51		104,51		
	Angka Partisipasi Sekolah SMP	80,80	80,21		80,65		82,84		102,72		102,72		102,72		
	Angka Putus Sekolah	0,60	0,75		0,75		0,78		104		104		104		
	Angka Rata-Rata Kelulusan SD	100,00	100,00		100,00		100,00		100		100		100		
	Angka Rata-Rata Kelulusan SMP	100,00	100,00		100,00		100,00		100		100		100		
	APK PAUD	74,00	73,21		73,75		49,24		66,77		66,77		66,77		
	APK SD	99,25	99,00		99,00		100,90		101,92		101,92		101,92		
	APK SMP	83,35	82,14		82,75		82,84		100,11		100,11		100,11		
	APM PAUD	72,20	71,16		71,95		48,01		66,73		66,73		66,73		
	APM SD	96,70	96,29		96,55		93,38		101,9		101,9		101,9		
	APM SMP	80,80	80,22		80,65		80,77		100,15		100,15		100,15		
	Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95	39,19		94,80		39,19		41,34		41,34		41,34		
	Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94,00	43,43		93,85		43,43		46,28		46,28		46,28		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD pada Tahun Lalu (n- 2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangggng Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Berkualifikasi SD	94,95	39,19	-	94,80	1.425,276,000	39,19	303.672.000	41,34	-	41,34	303.672.000	41,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Prosentase Guru Berkualifikasi SMP	94,00	43,43		93,85		43,43		46,28		46,28		46,28		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	B	294.038.382.230	BB	382,680,038,425	B	41.953.089.783	B	10,96	85	41.411.487.014	85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
KESEHATAN															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	IKM terhadap Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit	74,50	72,12	127.695.120.736	73,40	125,047,753,413	23	15.864.323.682	23	12,69	23	15.864.323.682	12,69	Dinas Kesehatan	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar	100,00	65,10	33.342.400	69,20	36,949,000	26	9.610.000	26,01	26,01	26,01	9.610.000	26,01		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar	82,00	65,20	104.995.629	70,00	96,916,000	10	10.019.000	11,49	10,34	11,49	10.019.000	10,34		

Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	100,00	100	328.767.155	100,00	1.667.643.100	90	3.980.000	90	0,24	90	3.980.000	90	Dinas Kesehatan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	65.370.081.986	B	62,114,986,877	B	12.340.491.208	B	19,87	B	12.340.491.208	B		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	85,00	70,00	-	73,00	4,889,135,200	70	297.689.493	70	6,09	70	297.689.493	70	Dinas PUPR	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum	87,00	80,20	-	80,70	1,830,001,600	87	2.679.500	87	0,15	87	2.679.500	87		
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regiona	Prosentase Penanganan Sampah	70,00	47,00	-	55,00	2,862,963,000	50	12.232.500	50	0,43	50	12.232.500	50		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase Cakupan Layanan Air Limbah	100,00	70,00	-	88,00	939,916,000	30	22.427.875	30	2,39	30	22.427.875	30	Dinas PUPR	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Prosentase Drainase Lingkungan Perkotaan dalam kondisi baik (tidak tersumbat)	84,00	75,70	-	81,70	1,958,001,200	50	0	50	0	50	0	50		
Program Pengembangan Permukiman	Prosentase Konektivitas Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	100,00	100,00	-	100,00	14,458,727,812	100	0	100	0	100	0	100		
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan PBG, SLF, SIMBG (Berkas)	95,00	80,00	-	86,00	6,250,226,600	25	0	25	0	25	0	25		
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Prosentase terpeliharanya fasilitas umum	87,00	73,00	-	78,00	6,932,956,000	60	0	60	0	60	0	60		
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	39,82	35	-	36,82	39,903,027,267	35	652.123.400.00	35	1,63	35	652.123.400.00	35		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	17,64	8,98	-	10,98	705,114,100	8	15.708.240	8	2,23	8	15.708.240	8		
	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100,00	100,00		100,00		100		100		100		100		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	94,00	80	-	92,40	2.533.222.800	80	87.935.10	80	3,47	80	87.935.10	80	Dinas PUPR	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	-	B	11,588,041,956	B	1.384.718.053	B	11,95	B	1.384.718.053	B		
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	95,95	90	-	95,80	656.636.000	90	0	90	0	90	0	90	Dinas PUPR	
Program Kawasan Permukiman	Prosentase perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata	1,52	0,3	-	0,38	1.481.802.000	0,3	8.120.000	0,3	0,55	0,3	8.120.000	0,3		
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase ketersediaan kepenghunian perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, & utilitas	50,00	11	-	12,50	612.961.000	11	39.663.540	11	6,47	11	39.663.540	11		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penegakan perda dan perbup	90,00	84	-	84,00	697.944.000	84	44.529.000	100	6	84	44.529.000	84	Satpol PP	
Program Penanggulangan Bencana	Rasio desa tangguh bencana	28,24	0	-	16,57	69.371.000	0	0	0	0	0	0	0	BPBD	
	Cakupan Pelayanan Pasca bencana sesuai standar	100,00	0		100,00		0		0	0	0		0	BPBD	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan kebakaran	40,90	1,6	-	38,87	30.000.000	1,6	7.325.000	1,6	0,9	1,6	7.325.000	1,6	BPBD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab	Nilai Sakip	BB	B	-	B	13.119.064.328	B	2.363.480.795	B	18	B	2.363.480.795	B	Satpol PP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab	Nilai Sakip	BB	B	-	B	5.138.986.638	B	737.394.434	B	14	B	737.394.434	B	BPBD	

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
SOSIAL															
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	90,00	82,50	-	82,50	686.763.000	0	0	0	0	0	0	91,67	Dinas Sosial	
Program Rehabilitasi Sosial	Skor Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	92,50	72,00	-	85,00	184.375.300	0	1.000.000	0	0,54	0	1.000.000	90,38		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penduduk miskin dan rentan dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).	67,50	62,50	-	62,50	2.073.329.000	15,62	67.434.700	24,99	3,25	15,62	67.434.700	15,62		
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat.	100,00	100,00	-	100,00	116.948.200	0	0	0	0	0	0	0		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	BB	-	BB	3.497.950.937	B	577.945.566	B	16,52	B	577.945.566	B	Dinas Sosial	
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
TENAGA KERJA															
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80,00	65,00	-	65,00	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	85	78	-	78	160.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dg HI	10,3	10,0	-	10,0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	2.996.714.575	B	318.144.315	B	11	B	318.144.315	B	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	66,00	60,00	-	63,00	1.396.118.400	30	31.304.000	30	2,24	48	31.304.000	48	Dinas PPPAPP&KB	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,01	0,01	-	0,01	22.134.000	0	1.367.000	0	6,18	0	1.367.000	0		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana KIE	100,00	40	-	44,44	52.767.500,00	40	0	40	0	80	0	80		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1	1	-	1	20.808.200	0	0	0	0	0	0	0		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak	100,00	40	-	44,44	90.839.000,00	40	30.661.955	40	25,58	80	30.661.955	80		
Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat perlindungan	100	100	-	100	268.405.000	0	2.180.000	0	0,81	0	2.180.000	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	4.146.946.865	B	496.311.668	B	11,97	B	496.311.668	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PANGAN															
Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Peningkatan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan	1	1	-	1	520.170.000	1	400.000.000	100	77	1	400.000.000	100	Dinas Ketahanan Pangan	
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Tingkat penganeekaragaman ketersediaan pangan dan konsumsi pangan (skor)	87,00	75	-	84,75	251.617.500	70	0	75	0	70	0	75		
Progran Penangan Kerawanan Pangan	Cadangan Pangan (ton)	400	200	-	200	128.016.000	50	6.963.364	25	5	50	6.963.364	25		
Program pengawasan keamanan pangan	Prosentase Industri Pangan yang memiliki Sertifikasi keamanan pangan	95,00	70	-	91,00	11.160.100	70	0	72	0	70	0	72		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	3.409.517.215	B	442.608.901	B	13	B	442.608.901	B		

Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PERTANAHAN															
Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah	25	25	-	25	13.300.000	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2	2	-	2	97.765.430.535	0	2.562.961.241	0	2,62	0	2.562.961.241	0	Dinas PUPR	
LINGKUNGAN HIDUP															
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	3	3	-	3	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen kualitas lingkungan hidup yang memuat IKA, IKU, dan IKTL	100	100	-	100	76.628.900	32	36.986.000	32	48,27	32	36.986.000	32		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan ketersediaan laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	3	3	-	3	3.832.000	1	450.000	33	11,74	1	450.000	1	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	80,00	55,00	-	65,00	46.361.000	55	2.250.000	82	4,85	55	2.250.000	55		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan penilaian kinerja dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	14	7	-	7	23.022.500		5.275.000		22,91		5.275.000			
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola TPA berbanding potensi timbulan sampah berdasar populasi BPS (n- 1).	48,79	40	-	46,41	963.442.750	28,05	155.665.750	55	16,16	28,05	155.665.750	28,05		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.272.406.080	B	723.539.180	B	15,63	B	723.539.180	B	Dinas Lingkungan Hidup	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL															
Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan KTP El, Kartu Identitas Anak (KIA)	99,00	97	-	98,00	39.300.000	82	0	82	0	82	0	82	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	
Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th), Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian	99,00	95	-	96,00	39.300.000	80	0	80	0	80	0	80		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data/Dokumen Kependudukan	90,00	60	-	60,00	34.985.000	25	3.718.224	35,71	10,63	25	3.718.224	53,13		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan	100,00	90	-	90,00	18.028.000	0	0	0	0	0	0	45		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.476.260.073	B	1.214.970.497	B	22,19	B	1.214.970.497	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA															
Program Penataan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataannya	105	84	-	84	185.520.000	50	0	50	0	62	0	50	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat & Pekon	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase desa yang melaksanakan kerja sama antar desa	100,00	100,00	-	100,00	39.899.000	20	0	20	0	20	0	20	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat & Pekon	
Program Administrasi Pemerintah Desa	Prosentase pekon yang berkinerja baik	100	84	-	84	2.847.715.987	0	81.156.854	0	3	0	2.847.715.987	0	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat & Pekon	
Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,le mbaga adat dan masyarakat hukum adat	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif	85	20	-	27,5	2.670.935.388	20	288.819.565	62	11	20	2.670.935.388	20	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat & Pekon	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	3.245.216.616	B	359.397.39	B	9	B	359.397.39	B	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat & Pekon	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	83	80	-	80	827.507.700	0	738.000	0	0,1	0	738.000	0	Dinas PPPAPP&KB	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase peserta KB aktif	83	80	-	80	2.876.034.450	0	0	0	0,1	0	0	0	Dinas PPPAPP&KB	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rasio ketergantungan penduduk	80	80	-	80	2.553.980.000	0	487.000	0	0,02	0	487.000	0	Dinas PPPAPP&KB	
PERHUBUNGAN															
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Prosentase penurunan titik rawan kecelakaan	82,00	80,50	-	80,50	7.191.936.300	0	2.382.672.526	0	30	0	2.382.672.526	0	Dinas Perhubungan	
	Prosentase uji KIR Kendaraan	88,00	87,25	-	87,25		22,8		30		22,8		22,8		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	7.138.187.394	B	1.048.520.148	B	15	B	1.048.520.148	B	Dinas Perhubungan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65,0	55,0	-	57,0	2.920.943.000	0	829.112.219	0	28,39%	0	829.112.219	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Program Pengelolaan aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,25	2,00	-	2,45	2.041.866.000	2	389.991.195	81,63%	19,10%	2	389.991.195	61,54%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	3.630.253.598	B	499.591.470	B	13,76%	B	499.591.470	B		
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan Prosentase Koperasi Sehat	28,00	13	-	13,98	24.006.500	5	4.770.000	35	19,87	5	4.770.000	5	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi	Prosentase Pelaku Perkoperasi	100,00	100,00	-	100,00	318.370.000	0	17.400.000	0	5,47	0	17.400.000	0		
Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Cakupan Koperasi Aktif	30	25	-	30	62.421.900	15	18.483.000	50	29,61	15	18.483.000	15		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan UMKM yang masuk klasifikasi UKM	30	20	-	30	523.859.600	0	1.500.000	0	0,29	0	1.500.000	0	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.059.019.745	B	613.732.192	B	12,13	B	613.732.192	B		
PENANAMAN MODAL															
Program pengembangan iklim penanaman modal	Cakupan persetujuan nilai investasi (izin)	7.000	1000	-	1.600	47.944.800	1159	0	70	0	1159	0	1159	Dinas PMPTSP	
Program promosi penanaman modal	Jumlah realisasi investasi (Milyar)	6,552	2,200	-	4,922	298.500.000	1,200	1.520.000	25	0,51	1,200	1.520.000	1,200	Dinas PMPTSP	
Program pelayanan penanaman modal	Cakupan pelayanan perizinan dan atau non perizinan secara online	95,00	95,00	-	95,00	276.777.300	14,74	40.785.080	21	14,74	14,74	40.785.080	14,74	Dinas PMPTSP	
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rasio kepatuhan pelaku usaha	90	90	-	90	494.293.900	10	23.222.000	13	4,70	10	23.222.000	10	Dinas PMPTSP	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah PMA dan PMDN (Investor)	40	25	-	25	36.700.000	0	0	0	0	0	0	0	Dinas PMPTSP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	4.962.734.033	B	560.815.392	B	11,3	B	560.815.392	0		
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan peningkatan daya saing kepemudaan	60	50	-	56	553.087.000	0	6.989.500	0	1	0	6.989.500	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah penyelenggaraan kompetisi berprestasi	30	10	-	22	2.422.050.000	0	138.828.000	0	6	0	138.828.000	0		
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keperamukaan	1	1	-	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	4.195.235.858	B	611.827.916	B	15	B	611.827.916	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
STATISTIK															
Program penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	25	15	-	15	197.091.000	3	18.200.000	20	9,23	3	18.200.000	3	Dinas Komunikasi dan Informatika	
PERSANDIAN															
Program penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi	Cakupan pengamanan informasi	100	72,97	-	72,97	0	72,97	0	100	0	72,97	0	72,97	Dinas Komunikasi dan Informatika	
KEBUDAYAAN															
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Seni Budaya yang Lestari	87,50	55,00	-	55,00	748,243,000	-	127.375.000	-	17,02	-	127.375.000	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang terpelihara	32,00	25,00	-	26,00	8,900,000	0	0	-	0	-	-	0	Dinas Pendldikan dan Kebudayaan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg- jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PERPUSTAKAAN															
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat	65,00	50,00	-	50,00	120.932.500	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	B	3.247.548.700	B	277.115.578	B	8,53	B	277.115.578	B		
KEARSIPAN															
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase perangkat daerah, kelurahan dan pekon yang telah menerapkan arsip sesuai standar	21,39	5,35	-	5,35	185.324.100	0	15.273.173	0	8,24	0	15.273.173	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara	83,00	75,00	-	75,00	20.220.000	0	0	0	0	0	0	0		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	13.802	12.530	-	12.530	238.613.000	3.200	115.432.300	25,54	48,38	3.200	115.432.300	6,12	Dinas Perikanan	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan	6,00	4	-	4,73	290.140.000	0	23.930.000	0	8,25	0	23.930.000	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	B	3.852.920.141	B	560.966.480	B	14,56	B	560.966.480	B		
PARIWISATA															
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah peningkatan kunjungan wisatawan (orang)	60.000	35.000	-	40.000	32.500.000	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan penguatan promosi melalui media cetak ,elektronik dan media lainnya	6	6	-	6	158.000.000	0	3.855.000		2	0	3.855.000	0		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=8+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	15	8	-	8	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
PERTANIAN															
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi padi (ton)	128.537	135.731	-	125.117	300.638.500	0	94.836.500	0	32	0	94.836.500	0	Dinas Pertanian	
	Jumlah produksi jagung (ton)	39.352	37.852		37.852		0		0		0		0		
	Jumlah produksi bawang merah (kuintal)	3.541	3.910		3.241		0		0		0		0		
	Jumlah produksi kakao (ton)	3.129	3.029		2.838		0		0		0		0		
	Jumlah produksi tembakau (ton)	113	0		91		0		0		0		0		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rasio pembangunan prasarana pertanian	1,04		-	1,01	505.950.000	0	5.000.000	0	1	0	5.000.000	0		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ketersediaan Daging (ton)	4.433	3.800	-	3.833	691.880.900	0	16.731.000	0	2	0	16.731.000	0	Dinas Pertanian	
	Jumlah ketersediaan Telur (ton)	8.424	7.525		8.124		0		0		0		0	Dinas Pertanian	
	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	5.475	5.000		5.175		0		0		0		0		
	Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kali)	4.335	4.000		4.185		0		0		0		0		
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan yang mendapat pengendalian dan pananggulangan bencana pertanian	78,00	72,00	-	72,00	115.420.000	0	15.722.500	0	14	0	15.722.500	0		
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan penyuluhan kelompok tani (%)	84,39	80,00	-	81,39	571.257.500	0	142.367.500	0	25	0	142.367.500	0		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	B	13.561.849.555	B	2.026.484.636	B	15	B	2.026.484.636	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PERDAGANGAN															
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana pasar daerah yang sehat	7	7	-	7	167.956.500	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pemantauan Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokok	7	7	-	7	532.726.500	0	39.719.500	0	8	0	39.719.500	0		
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya yang tertib ukur	97,00	83,00	-	83,00	165.624.500	0	24.923.361	0	14	0	24.923.361	0		
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Produk Dalam Negeri	4	4	-	4	709.487.000	0	113.782.220	0	17	0	113.782.220	0		
PERINDUSTRIAN															
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan IKM yang mendapatkan pemberdayaan, pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana	9	9	-	9	2.074.245.050	0	2.500.000	0	0,12	0	2.500.000	0	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Bina perindustrian	81	70	-	70	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten	9	9	-	9	256.748.400	0	141.126.550	0	54,97	0	141.126.550	0		
TRANSMIGRASI															
Program Pembangunan kawasan transmigrasi	Penempatan transmigran (%)	70	50	-	50	153.793.000	0	35.435.266	0	28	0	35.435.266	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
SEKRETARIAT DAERAH															
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90	70	-	75	11.201.514.766	19	351.588.400	25	3,14	19	351.588.400	19	Sekretariat Daerah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaku perekonomian dan pembangunan yang taat kebijakan	80	60	-	60	2.237.235.000	20	371.475.400	33	17	20	371.475.400	20	Sekretariat Daerah	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	29.899.693.966	B	3.743.084.417	B	11,76	B	3.743.084.417	B		
SEKRETARIAT DPRD															
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase dukungan terhadap peran legislatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	90	85	-	85	21.002.186.000	30	3.778.496.073	40	18	30	3.778.496.073	30	Sekretariat DPRD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	32.147.079.297	B	7.188.700.321	B	22	B	7.188.700.321	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/K atan (output)
3	4
KEUANGAN	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Inde Pengelolaan Keuangan
Program Pengelolaan Arahan Milik Daerah	Persentase Capaian Inde Pengelolaan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Realisasi F Daerah
	% Realisasi Retribusi Dae Nilai Sakip
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan ketentuan	98,00	97,75	-	97,75	1.311.297.900	50	147.431.610	50	14,40	50	147.431.610	50	BAPPEDA	
	Cakupan Indikator Kinerja PD yang Dievaluasi	98,00	97,75		97,75		50		50		50		50		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	98,00	97,80	-	97,80	2.532.660.300	50	69.208.497	50	4,67	50	69.208.497	50		
	Persentase Sasaran Perangkat Daerah	98,00	97,60	-	97,60		50		50		50		50		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.236.775.248	B	672.074.947	B	12,83	B	672.074.947	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penanggg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
PERENCANAAN															
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	98,00	97,75	-	97,75	1.311.297.900	50	147.431.610	50	14,40	50	147.431.610	50	BAPPEDA	
	Cakupan Indikator Kinerja PD yang Dievaluasi	98,00	97,75		97,75		50		50		50		50		
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	98,00	97,80	-	97,80	2.532.660.300	50	69.208.497	50	4,67	50	69.208.497	50		
	Prosentase Sasaran Perangkat Daerah	98,00	97,60	-	97,60		50		50		50		50		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.236.775.248	B	672.074.947	B	12,83	B	672.074.947	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
KEUANGAN															
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan	75,50	72,74	-	71,50	191.530.971.375	0	29.594.749.970	0	15,45		29.594.749.970		BPKAD	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Capaian Indeks Pengelolaan Aset	95,00	90,00	-	90,00	809.952.025	0	63.960.000	0	8	0	63.960.000		BPKAD	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Realisasi Pajak Daerah	98,00	90,00	-	96,50	3.734.468.805	13,64	60.292.600	14,13	1,61	14,13	60.292.600	13,92	BAPENDA	
	% Realisasi Retribusi Daerah	80,00	70,00		75,00		10,71		14,28		14,28		13,39	BAPENDA	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	29.151.921.383	B	4.652.506.536	B	15,96	B	4.652.506.536	B	BPKAD	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.753.708.605	B	506.378.500	B	8,8	B	506.378.500	B	BAPENDA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
KEPEGAWAIAN															
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pengelolaan Kinerja, Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN	100	100	-	100	4.460.645.664	50	358.936.443	50	8	50	358.936.443	50	BKPSDM	
	Persentase Kebutuhan dan Pengadaan ASN	100	100		100		50		50		50		50	BKPSDM	
	Persentase Validitas Data ASN	100	100		100		50		50		50		50	BKPSDM	
	Persentase keterisian jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan kompetensi	100	100		100		50		50		50		50	BKPSDM	
	Persentase Pelayanan proses mutasi, laporan peningkatan pendidikan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	100	100		100		50		50		50		50	BKPSDM	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	4.252.268.473	B	660.408.498	B	15,53	B	660.408.498	B	BKPSDM	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional	100	100	-	100	177.385.500	50	3.742.000	50	2,11	50	3.742.000	50	BKPSDM	
	Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan	100	100		100		50		50		50		50	BKPSDM	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N															
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Perangkat Daerah	100	100	-	100	690.831.150	0	57.836.484	0	8,37	0	57.836.484	0	BAPPEDA	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
INSPEKTORAT DAERAH															
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	100	100	-	100	2.211.009.000	0	433.410.000	0	19,6	0	433.410.000	0	Inspektorat	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100	100	-	100	1.313.910.000	13,51	177.495.000	13,51	13,51	13,51	177.495.000	13,51	Inspektorat	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	10.223.787.288	B	1.316.161.755	B	12,9	B	1.316.161.755	B		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi- atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg Jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	95	80	-	80	3.767.998.800	35	78.303.915	35	2	35	78.303.915	35	Kecamatan Pringsewu	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Keamanan dan Ketertiban di setiap pekon	95	80	-	80	246.125.000	30	0	30	0	30	0	30	Kecamatan Pringsewu	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	85	-	85	19.510.000	30	0	30	0	30	0	30	Kecamatan Pringsewu	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan Aparatur Pemerintahan	100	85	-	85	2.550.000	35	0	35	0	35	0	35	Kecamatan Pringsewu	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	5.840.892.671	B	341.574.911	B	7	B	341.574.911	B	Kecamatan Pringsewu	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangng jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Kemitraan Wawasan Kebangsaan (Kecamatan)	100	85	-	88,89	99.999.900	0	25.140.000	0	25,14	0	25.140.000	0	Badan Kesbangpol	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Prosentase Partisipasi Politik	84,00	80,00	-	83,00	880.350.800	0	94.626.100	0	11	0	94.626.100	0	Badan Kesbangpol	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas Sinergi	74,30	70,00	-	72,00	16.975.132.800	37,5	16.600.000	50	0,1	37,5	16.600.000	50	Badan Kesbangpol	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegi atan (output)	Capaian Kinerja RPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun (n-1) 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun n-1 (%) 2023	Perangkat Daerah Penangngg jawab	Ket
3	4	5	6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%	12	13
		k	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Kemitraan Ketahanan Masyarakat (Lokasi/Wilayah)	3	3	-	3	84.595.900	2	900.000	66	2	66	900.000	2	Badan Kesbangpol	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Potensi Konflik yang tidak menjadi konflik	85,71	80,00	-	80,00	750.763.200	25	251.826.000	40	35		251.826.000	25	Badan Kesbangpol	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip	BB	B	-	BB	3.167.008.603	B	546.288.185	B		B	546.288.185	B	Badan Kesbangpol	

2.3. Permasalahan Pembangunan.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu. Khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Tema Pembangunan “Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, beberapa permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah

Sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM.
- b. Meningkatnya keamanan dan cadangan pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya iklim berusaha dan investasi;
- d. Meningkatnya produksi hasil pertanian;
- e. Meningkatnya produksi hasil perikanan.

Permasalahan yang masih terjadi adalah :

- a. Adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Adanya ancaman inflasi daerah yang belum mampu di kendalikan.
- c. Makin mengecilnya cadangan pangan daerah.
- d. Indeks Pangan Harapan masih rendah.
- e. Keterbatasan lahan menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Pringsewu

- f. Hasil pertanian dan perikanan, masih dijual dalam bentuk mentah sehingga belum mampu menghasilkan nilai tambah.

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Sasarannya adalah

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- b. Peningkatan minat baca masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- e. Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat yang inovatif.

Permasalahan yang masih terjadi adalah :

- a. Masih adanya anak putus sekolah.
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pringsewu masih berada di bawah Nasional.
- c. Belum berfungsi secara optimalnya keberadaan Perpustakaan di Sekolah dan di Pekon.
- d. Masih terjadinya kekerasan perempuan dan anak di masyarakat.
- e. Indeks Desa Membangun Kabupaten Pringsewu masih relatif rendah.
- f. Masih sedikitnya status pekon mandiri di Kabupaten Pringsewu.

3. Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting

Sasarannya adalah

- a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- b. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PPKS.
- c. Menurunnya angka kemiskinan.
- d. Menurunnya prevalensi stunting.
- e. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender

Permasalahan yang masih terjadi adalah :

- a. Masih relatif tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka.
- b. Masih banyaknya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang belum tertangani.
- c. Masih terdapat 4.530 warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrims.
- d. Masih relatif tingginya angka prevalensi stunting.
- e. Masih adanya keluarga yang rentan terhadap masalah sosial.
- f. Tingkat laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi.

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasarannya adalah

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- e. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional.

Permasalahan yang masih terjadi adalah :

- a. Nilai SAKIP Pringsewu masih rendah (B).
- b. Nilai Reformasi Birokrasi Pringsewu masih Rendah (CC)
- c. Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih relatif rendah.
- d. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu masuk kategori Inovatif
- e. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pringsewu masih dalam kategori Cukup.
- f. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pringsewu masih masuk kategori Kurang.

5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Sasarannya adalah

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten.
- b. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.
- e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Permasalahan yang masih terjadi adalah :

- a. Masih banyaknya kondisi jalan rusak di Pringsewu, sementara itu anggaran yang tersedia sangat terbatas.
- b. Kondisi Infrastruktur Ibukota Kabupaten belum tertata dengan rapih.
- c. Belum semua Perangkat Daerah memiliki gedung kantor sendiri yang representatif, dan saat ini masih menyewa rumah penduduk.
- d. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang belum tertangani.

- e. Belum semua program unggulan dan prioritas daerah, dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- f. Masih adanya pencemaran limbah, akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

6. Meningkatkan Ketertiban, Kenyamanan dan Mitigasi Bencana
Sasarannya adalah

- a. Meningkatnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Permasalahanyangmasihterjadiadalah:

- a. Masih tingginya angka kriminilatis yang terjadi di Pringsewu.
- b. Masih adanya ancaman bencana banjir, puting beliung dan kebakaran.
- c. Belum seluruh Pekon ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana.
- d. Semakin meningkatnya eksalasi politik menghadapi Pesta Demokrasi Pemilihan Umum.
- e. Masih relatif kecilnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunanyang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yangmenjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangnyadalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakanmasyarakat. Berdasarkan hasil capaian kinerja urusan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah pendidik pada jenjang TK, SD dan SMPsesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, dari segi kuantitasmaupun kualitas.

- b. Masih kurangnya prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Kurang optimalnya sistem zonasi pada waktu PPDB;
- d. Meningkatnya kasus kenakalan remaja akibat penerapan pendidikan karakter belum optimal.

2. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi lahir;
- b. Masih adanya balita gizi buruk dan kasus stunting;
- c. Masih adanya penyakit menular (DBD, TBC, ISPA, dan diare).
- d. Masih banyaknya kasus stunting.
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang polahidup bersih dan sehat (PHBS);
- f. Banyaknya jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan;
- g. Belum optimalnya fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia; serta
- h. Penanganan limbah medis belum optimal.
- i. Merebaknya pandemi Covid-19 yang belum mampu dikendalikan, sementara itu vaksin yang dibutuhkan belum tersedia.

3. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kondisi jalan mantab kabupaten.
- b. Masterplan drainase belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu;
- c. Belum optimalnya pengelolaan PSU di lingkungan permukiman;
- d. Kurangnya peralatan pemeliharaan jalan;
- e. Sebagian besar jalan aspal belum memenuhi ketentuan yang ada (seperti lebar aspal, *street furniture*, dan lainlain);
- f. Banyaknya infrastruktur jalan yang rusak;
- g. Tingginya limpasan di tepi jalan kabupaten;
- h. Banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak;
- i. Masih banyaknya pelanggaran sempadan oleh masyarakat, baik sempadan jalan, irigasi maupun sungai;
- j. Belum optimalnya pemantauan terhadap kualitas air bersih atau air

- minum bagi masyarakat;
- k. Terbatasnya instalasi pengolahan air limbah komunal;
- l. Ada beberapa PD yang belum mempunyai gedung perkantoran yang representatif;
- m. Masih kurangnya kualitas daya saing jasa dan industri konstruksi;
- n. Belum optimalnya penyediaan data spasial hasil pembangunan;
- o. Belum adanya kajian kebutuhan perumahan MBR;
- p. Tingginya alih fungsi lahan;

4. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu ditangani;
- b. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi MBR;
- c. Tingginya nilai indeks resiko bencana;
- d. Masih tingginya jumlah penduduk sebanding dengan tingginya kebutuhan areal pemukiman.
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah rumah tangga.
- f. Belum sepenuhnya pengembang perumahan yang memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

5. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.*

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya potensi kerawanan dan konflik sosial karena tingkat kemajemukan masyarakat serta perubahan sosial;
- b. Maraknya penyakit masyarakat;
- c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana walaupun sudah bertambah, namun dari sisi keamanan dan keselamatan masih perlu diperhatikan. Solusi yang dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan;
- d. Belum terpenuhinya daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap WMK (tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhinya waktu tanggap kurang dari 15 menit);
- e. Masih adanya pelanggaran perda oleh masyarakat; serta

- f. Masih kurangnya kapasitas linmas dalam pencegahantindak kriminal.

6. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sosial adalah sebagai berikut:

- a. Data PPKS daerah belum bisa terintegrasi dengan data pusat;
- b. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) terlatih dan PSKS lainnya belum optimal melaksanakan kegiatan penanganan PPKS;
- c. Kurangnya kepedulian dari sebagian masyarakat terhadap permasalahan sosial (kondisi anak terlantar, penyandangdisabilitas);
- d. Belum adanya tempat dan sarana prasarana penampungan hasil penjangkauan dan penertitban dalamupaya koersif anak jalanan dan orang terlantar;
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dan lansia;
- f. Meningkatnya peredaran dan penyalahan NAPZA;
- g. Masyarakat miskin belum maksimal dalam mengakses dana Jaring Pengaman Sosial (JPS)
- h. Penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) untuk layanan program jaminan dan perlindungan sosial secaranasional belum optimal;

B. *Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar*

1. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Serapan tenaga kerja masih rendah;
- b. Kesesuaian antara kesempatan kerja yang ada dengan kualifikasi, kemampuan dan harapan pencari kerja masihkurang;
- c. Kurangnya minat penduduk usia kerja untuk bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru bagi pengembangan kewirausahaan;
- d. Belum dipahami secara menyeluruh aturan ketenagakerjaan oleh tenaga kerja maupun perusahaan;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan standar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi terutama untuk disabilitas; serta

- f. Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar.
- g. Penempatan tenaga kerja yang kurang merata.

2. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah:

- a. Belum optimalnya update data pilah, data gender, perempuan dan anak;
- b. Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak.
- c. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Masih kurangnya sharing dana desa untuk keberlanjutan P2WKSS;
- e. Belum optimalnya lembaga penyedia dan jejaring dalam rangka penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- g. Masih banyak fasilitas umum yang belum ramah anak, remaja dan lansia; serta
- h. Belum optimalnya kelembagaan PUG.

3. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar pangan adalah:

- a. Berkurangnya luas lahan pertanian;
- b. Kurang meratanya keterjangkauan pangan karena distribusi yang panjang;
- c. Rendahnya konsumsi keberagaman pangan;
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkembangan teknologi, mutu dan keamanan pangan, terutama untuk pelaku usaha dengan usia lanjut;

4. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah desa;
- b. Masih rendahnya Bukti Hak Milik Tanah berupa sertifikat.
- c. Kurangnya data/administrasi pertanahan; serta

d. Belum adanya sistem informasi pertanahan yang terintegrasi.

5. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih rendah;
- b. Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LH masih rendah;
- c. Belum optimalnya pengelolaan persampahan terutama di kawasan perkotaan;
- d. Adanya kerusakan kawasan resapan dan lindung sempadan sungai akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan yang tidak berijin.
- e. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.

6. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan Catatan Sipil.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan dengan pemerintah pusat sangat tinggi, terutama dalam jaringan komunikasi data dan ketersediaan blanko;
- b. Sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan masih belum optimal;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pencatatan sipil yang terintegrasi;
- d. Belum akuratnya database kependudukan (masih adanya data anomali) sebagai akibat kurang tertibnya pelaporan;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa kependudukan;

7. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang sangat dinamis;
- b. Belum optimalnya penyelesaian siklus tahunan desa, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas;
- c. Masih terjadi hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa

- dan lembaga desa kurang harmonis;
- d. Pelaksanaan siskudes belum maksimal, baik dari jaringan internet maupun kualitas SDM-nya;
- e. Kedisiplinan perangkat desa kurang, terutama dalam pelayanan masyarakat; serta
- e. Sulitnya mendapat data yang valid tentang profil desa.

8. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka perkawinan usia dini;
- b. Masih lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Tingginya angka *unmetneed* KB;
- d. Kesadaran KB bagi pria masih rendah;
- e. Kurangnya regenerasi kader IMP; serta

9. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Masih belum seimbangny realisasi perlengkapan jalan (LPJU, RPPJ, APILL, rambu, guardrail, halte) dengan kebutuhan;
- b. Rendahnya kesadaran berlalu lintas di jalan;
- c. Menurunnya kualitas dan kuantitas angkutan umum yang beroperasi;
- d. Maraknya parkir liar dan pungutan tidak sesuai tarif;
- e. Belum adanya pelayanan bidang perhubungan berbasis TI;
- f. Masih banyaknya kendaraan yang belum memenuhi syarat kelaikan jalan; serta

10. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika adalah :

- a. Sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan teknis bidang komunikasi dan informatika belum mencukupi;
- b. Infrastruktur komunikasi dan informatika sudah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu, namun kinerjanya belum

memadai khususnya di wilayah pedesaan;

- c. Pengembangan aplikasi sistem informasi belum mencakup seluruh tata kelola pemerintahan maupun layanan publik; serta

11. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah :

- a. Terbatasnya kapasitas SDM Koperasi dalam manajemen koperasi, penguasaan teknologi, inovasi pengembangan produk;
- b. Motivasi generasi muda untuk berkoperasi rendah;
- c. Belum adanya fungsional penyuluh koperasi; serta
- d. Loyalitas anggota koperasi masih rendah.

12. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan lahan bagi investor;
- b. Belum adanya data dan informasi potensi investasi;
- c. Kebijakan online single submission (OSS) masih belum mencakup semua layanan perizinan.
- d. Dukungan peningkatan iklim investasi kurang optimal.

13. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penguatan organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- c. Kurangnya jiwa entrepreneurship di kalangan pemuda;
- d. Prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional belum maksimal;
- e. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana cabang olahraga;
- f. Pembibitan dari usia dini belum maksimal; serta
- g. Masih terjadinya beberapa kasus kenakalan pelajar dan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, yang disinyalir akibat pengaruh pergaulan dan pengaruh media sosial yang kurang terkontrol.

14. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik.*

Sampai saat ini, penyajian data statistik dasar masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja pemerintah daerah sehingga akan menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisis data untuk keperluan pembangunan

15. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar persandian adalah belum optimalnya dalam pelaksanaannya. Hal ini karena regulasi pendukung pengamanan informasi belum ada, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

16. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Lunturnya sebagian nilai-nilai budaya tradisional dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat akibat perkembangan zaman;
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi;
- c. Seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat masih bersifat hiburan belum sampai pada penanaman nilai kehidupan; serta
- d. Terbatasnya ruang publik untuk tempat berkreatifitas dan berekspresi.

17. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi;
- b. Prasarana dan sarana perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan;
- c. Kerjasama perpustakaan belum optimal; serta
- d. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai.

18. *Urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua Perangkat Daerah mengelola arsip dengan baik;
- b. Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai;
- c. Kualitas dan kuantitas SDM pengelola arsip belum memadai.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan.

1. Urusan Pemerintah Pilihan Pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Destinasi wisata belum mampu menarik wisatawan mancanegara;
- b. Masih kurang kuatnya pencitraan yang mampu membuat destinasi lebih unggul. Misalkan dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan sadar wisata sebagai tuan rumah yang baik sehingga meningkatkan minat berkunjung kembali (*repeater*) maupun lama tinggal wisatawan;
- c. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata masih konvensional, belum optimal memanfaatkan teknologi informasi;
- d. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata belum secara terarah dikembangkan untuk berbagai segmen wisatawan;
- e. Regulasi kawasan pariwisata belum terintegrasi antar pemangku kepentingan;
- f. SDM bidang pariwisata belum berstandar nasional/internasional;
- g. Produk dan usaha pariwisata belum bervariasi;

2. Urusan Pemerintah Pilihan Pertanian.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan meningkat;
- b. Kandungan unsur hara semakin menipis;
- c. Keterbatasan penyuluh dari segi kualitas dan kuantitas;
- d. Generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian;
- e. Masih kurangnya ketersediaan benih dan pupuk;
- f. Tingginya biaya produksi;
- g. Belum optimalnya kualitas hasil produksi pertanian;serta

3. Urusan Pemerintah Pilihan Perdagangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak adanya sanksi bagi distributor barang yang melanggar ketentuan pengawasan;
- b. Sulitnya mengendalikan distribusi bahan pangan antar daerah;
- c. Kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengenali produk dengan kandungan bahan berbahaya.

4. *Urusan Pemerintah Pilihan Perindustrian.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Masih sulitnya menembus perijinan untuk usaha ekspor;
- b. Belum optimalnya pemantauan terhadap pelaku usahayang telah mendaatkan bimtek;
- c. Belum adanya pemetaan pelaku usaha tentang tolak ukurstandarisasi produk dan proses produksi; serta
- d. Belum optimalnya intensivitas penguatan modal.

5. *Urusan Pemerintah Pilihan Transmigrasi.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran;
- b. Masih minimnya sarana penampungan bagi calon transmigran, khususnya di tingkat kabupaten.

6. *Urusan Pemerintah Pilihan Kelautan dan Perikanan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya produksi ikan pada musim kemarau, yang disebabkan jumlah air yang tersedia menurun maupun banyak bermunculan penyakit ikan;
- b. Menurunnya ketersediaan benih ikan pada musim kemarau.
- c. Masih banyak pembudidaya yang pemahaman teknologi rendah, karena usaha budidaya ikan hanya sampingan;
- d. Tingginya harga pakan ikan;
- e. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan Kabupaten Pringsewu apabila dibandingkan tingkat konsumsi ikan nasional.
- f. Masih kurangnya permodalan bagi kelompok pembudidaya ikan.

D. Urusan Pemerintahan Penunjang.

1. Urusan Penunjang Perencanaan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Belum ada instrumen yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program yang satu dengan program lainnya dalam mendukung pencapaian sasaran maupun misi daerah;
- b. Belum ada instrument yang baku dan jelas dalam menganalisis korelasi antara program dan kegiatan PD sehingga sulit mengukur kontribusinya terhadap pencapaian sasaran PD maupun sasaran daerah.
- c. Masih adanya program dan kegiatan yang belum terakomodir pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
- d. Masih belum optimalnya kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. Urusan Penunjang Keuangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa regulasi teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis.
- b. Belum optimalnya pengembangan sistem informasi.
- c. Masih terjadinya penyerapan anggaran diakhir tahun, sehingga daya dukungnya terhadap perkenomian daerah menjadi kurang.
- d. Integrasi perencanaan dengan penganggaran masih terkendala dengan kemampuan SDM terhadap aplikasi yang diberlakukan oleh Kemendagri.
- e. Masih belum selesainya pengadministrasian asset daerah melalui penerbitan sertifikat.
- f. Masih rendahnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung belanja daerah.
- g. Belum optimalnya upaya inventarisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

3. Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.
- b. Pengangkatan pegawai dalam jabatan belum berdasarkan talent tool atau berdasarkan kompetensi, mengingat keterbatasan SDM.
- c. Belum seluruh pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi pratama, mengikuti Diklatpim sesuai ketentuan.
- d. Masih belum terpadunya data kepegawaian sehingga proses kenaikan pangkat, masih dilakukan secara manual.
- e. Belum tersedianya dokumen sistem merit berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

4. *Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
- b. Urusan penelitian dan pengembangan masih dikelola oleh pejabat eselon III di Bappeda, sehingga jangkauannya masih terbatas.
- c. Sistem Inovasi Daerah belum terkelola dengan baik.
- d. Belum tersedianya dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan Peraturan Bupati tentang Sistem Inovasi Daerah.

5. *Urusan Penunjang Pengawasan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Belum seluruh personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok fungsinya;
- b. Tindak lanjut yang melibatkan pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kerugian dan kewajiban setor masih lambat progresnya.
- c. Belum semua personil memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Belum semua SKPD mendapatkan pembinaan ZIWBK/WBBM.
- e. Masih rendahnya ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi para pengawas.

6. *Urusan Penunjang Sekretariat Daerah.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya regulasi tentang tata cara kerjasama daerah

sebagai turunan dari aturan baru Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

- b. Berdasarkan Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Sudah ada regulasi tentang batas wilayah Kabupaten Pringsewu serta penetapan nama dan batas wilayah desa, namun pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cermat;
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- d. Belum terintegrasinya sistem pelaksanaan tugas antar bagian, sebagai unsur staf dalam mendukung tugas pimpinan.

7. *Urusan Penunjang Sekretariat Dewan.*

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penunjang sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya dukungan perencanaan kerja dari masing-masing alat kelengkapan dewan;
- b. Masih adanya berbagai kepentingan yang bersifat politis dari masing-masing parpol dalam pembahasan produk hukum daerah.
- c. Masih rendahnya capaian target Program Legislasi Daerah.
- d. Belum optimalnya hasis reses anggota dewan yang mampu untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai akibat belum optimalnya penyampaian pokok-pokok pikiran anggota dewan melalui aplikasi SIPD.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini menyajikan kondisi perekonomian hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 dan tahun 2022 serta tantangan dan prospek perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 serta gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan. Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2024 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2024, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat dijadikan alat ukur kinerja pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah yang dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, Perekonomian Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 tumbuh 4,37%. Pertumbuhan ini lebih besar dari pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 2,91%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada kategori Jasa lainnya sebesar 24,62%. Sedangkan pertumbuhan paling kecil terjadi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, yakni tumbuh sebesar -3,50%.

Sektor-sektor yang laju pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan PDRB adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (4,75); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,13%); Transportasi dan Pergudangan (15,42%); Penyediaan Akomodasi dan Makan minum (10,98); Jasa Perusahaan (16,51), dan Jasa Lainnya (24,62%). Terdapat sektor-sektor yang mengalami laju penurunan dari tahun sebelumnya diantaranya Industri pengolahan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Selanjutnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022 secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.01.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di
Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,92	1,85	1,21	0,57	-0,98	2,51
B Pertambangan dan Penggalian	9,07	6,71	4,31	2,03	-5,83	1,57
C Industri Pengolahan	5,70	6,13	5,36	-5,60	4,47	0,32
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,03	6,52	7,14	8,76	3,86	4,75
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,30	3,09	4,26	4,32	6,97	3,93
F Konstruksi	5,16	6,41	5,95	-2,46	6,04	3,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,93	6,18	6,85	-6,01	5,69	13,13
H Transportasi dan Pergudangan	6,91	6,85	8,24	-3,72	2,11	15,42
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,49	9,55	9,27	-2,89	-0,83	10,98
J Informasi dan Komunikasi	9,78	8,21	7,89	9,38	6,35	0,44
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	1,46	1,95	3,22	2,79	-3,50
L Real Estate	6,73	3,70	5,71	-2,72	1,13	3,14
M, N Jasa Perusahaan	5,71	1,54	3,52	-2,46	1,04	16,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,73	4,21	4,13	4,41	4,12	-1,13
P Jasa Pendidikan	5,73	7,12	8,05	3,42	1,15	2,45
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,40	5,31	6,45	9,11	3,05	-1,14
R,S,T,U Jasa Lainnya	8,84	9,20	7,97	-4,93	-2,09	24,62
LAJU PERTUMBUHAN PDRB	5,11	5,01	5,03	-1,21	2,91	4,37

Sumber : BPS Pringsewu, 2023.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung, dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu masih lebih tinggi, dimana laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 adalah -1,67% dan tahun 2022 adalah 8,79%. Begitu juga bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung maka posisi Kabupaten Pringsewu tahun 2022 masih cukup baik. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.02.
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampung Barat	5.03	5.09	5.18	-1.16	2.58	4.10
2	Tanggamus	5.19	5.01	5.02	-1.77	2.30	4.16
3	Lampung Selatan	5.46	5.23	5.13	-1.73	2.68	4.91
4	Lampung Timur	4.58	3.71	3.79	-2.26	0.24	2.02
5	Lampung Tengah	5.27	5.33	5.35	-1.02	2.88	4.65
6	Lampung Utara	5.21	5.31	5.33	-1.45	2.82	3.16
7	Way Kanan	5.11	5.18	5.17	-1.16	2.90	4.41
8	Tulang Bawang	5.45	5.42	5.41	-1.34	2.88	3.92
9	Pesawaran	5.01	5.05	5.00	-1.26	2.08	4.55
10	Pringsewu	5.11	5.01	5.03	-1.21	2.91	4.37
11	Mesuji	5.20	5.30	5.26	-1.35	2.84	3.49

12	Tulang Bawang Barat	5.55	5.27	5.36	-1.32	2.89	4,49
13	Pesisir Barat	5.33	5.33	5.47	-1.18	2.07	2,88
14	Bandar Lampung	6.28	6.20	6.17	-1.88	3.07	4,95
15	Metro	5.66	5.68	5.57	-1.79	2.91	4,51
Provinsi Lampung		5,13	5,16	5,23	-1,67	2,79	4,28

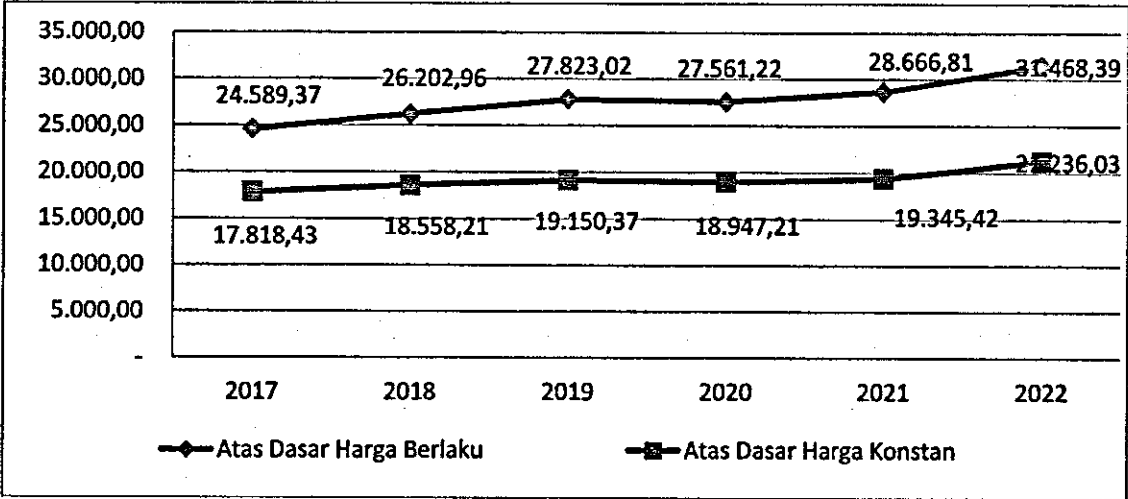
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita.

PDRB perkapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Indikator ini lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

PDRB per kapita Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku tahun 2022 adalah sebesar 31.468,39 juta rupiah, atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 28.666,81 juta rupiah. Peningkatan ini lebih besar bila dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Begitu juga untuk perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2022 adalah sebesar 21.236,03 juta rupiah atau mengalami peningkatan sedikit dari tahun 2021 adalah sebesar 19.345,42 juta rupiah. Adapun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.01
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Propinsi Lampung, posisi PDRB per Kapita Kabupaten Pringsewu masih jauh di bawahnya. Posisi Kabupaten Pringsewu hanya lebih baik dari Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus. Adapun perbandingan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.03.
Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampung Barat	20.504,82	22.020,49	23.737,15	23.614.681	24.714.990	27.297.349
2	Tanggamus	22.868,02	24.535,78	26.149,57	24.224.635	25.297.765	27.758.945
3	Lampung Selatan	38.601,74	41.625,30	44.604,90	41.704.922	43.307.952	47.827.728
4	Lampung Timur	35.176,79	38.475,99	40.735,72	36.710.498	38.323.275	44.151.639
5	Lampoung Tengah	48.319,77	52.172,32	56.155,57	48.861.769	50.315.555	54.968.952
6	Lampung Utara	33.545,01	36.066,71]	39.105,30	37.549.879	39.212.125	42.521.962
7	Way Kanan	27.400,05	29.378,16	31.378,77	29.594.040	30.746.033	33.579.502
8	Tulang Bawang	45.086,32	48.366,07	51.651,62	53.691.359	56.118.778	60.292.388
9	Pesawaran	32.109,20	34.428,27	36.912,35	34.047.403	34.965.125	38.360.414
10	Pringsewu	24.589,37	26.202,96	28.116,49	27.563.217	28.666.813	31.468.773
11	Mesuji	45.089,16	49.011,13	52.835,34	45.812.389	47.414.096	51.459.869
12	Tulang Bawang Barat	36.611,20	39.562,99	42.167,40	39.971.513	41.571.981	45.690.956
13	Pesisir Barat	25.880,84	27.855,76	30.017,04	28.889.489	30.062.936	32.457.020
14	Bandar Lampung	49.298,50	53.005,95	56.592,94	50.753.356	51.903.009	56.152.403
15	Metro	33.634,92	35.671,43	38.022,69	37.361.032	38.737.510	42.207.683
Provinsi Lampung		36.998,32	39.862,79	42.693,52	39.290.332	40.872.867	45.129.335

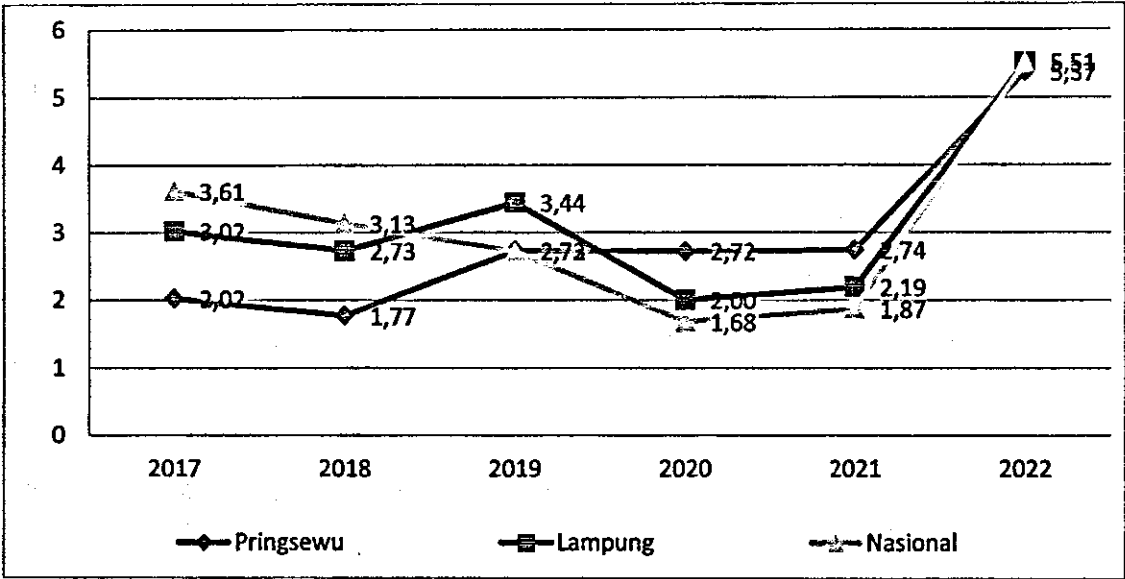
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

3. Perkembangan Harga (Inflasi).

Inflasi Kabupaten Pringsewu tahun 2022 adalah sebesar 5,37% atau lebih tinggi dari tahun 2021 sebesar 2,74%. Penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2022 adalah kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, yaitu 5,08%. Sedangkan penyumbang inflasi terkecil adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, yaitu -2,07%. Kemudian kelompok pengeluaran yang inflasinya lebih tinggi dari nilai inflasi kabupaten, meliputi kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (5,08%); kelompok perumahan (3,55%). Inflasi di Kabupaten Pringsewu mengambil data dari Inflasi Kota Metro yang memiliki kemiripan dengan karakteristik Kabupaten Pringsewu

Apabila dibandingkan dengan inflasi di Provinsi Lampung, maka inflasi di Kabupaten Pringsewu tahun 2022 masih lebih rendah, dimana inflasi di Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 5,51%. Begitu juga apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional tahun 2022, maka inflasi Kabupaten Pringsewu juga masih lebih rendah, dimana inflasi Nasional tahun 2022 sebesar 5,51%. Adapun perbandingan inflasi kumulatif Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.02
Perbandingan Inflasi Kumulatif Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 – 2022.



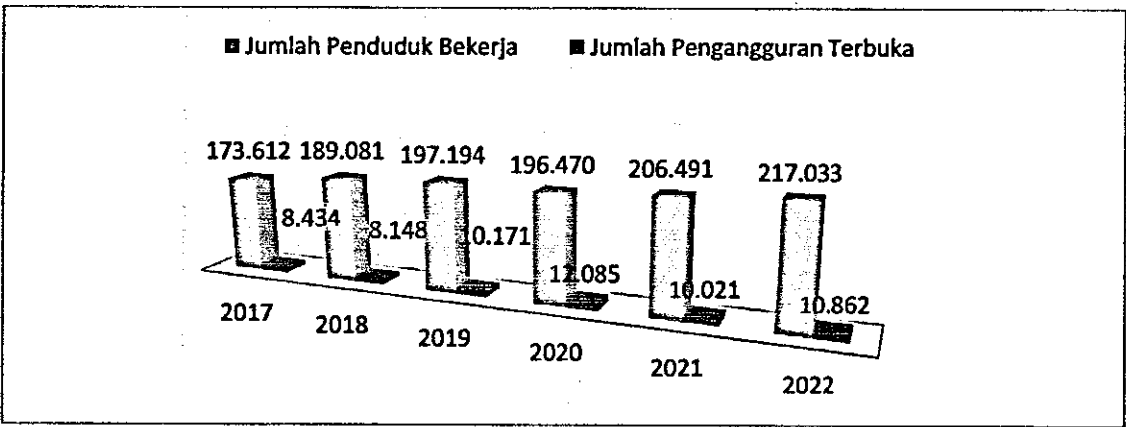
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

4. Kondisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja, dalam hal ini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun belum bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi.

Adapun perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk pengangguran terbuka di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022, dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 3.03
Perbandingan Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terbuka
Di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 – 2022.



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023.

Kualitas pendidikan yang di tamatkan oleh penduduk yang bekerja pada tahun 2022, sebagian besar adalah tamatan SMA/ sederajat, yaitu sebesar 30,51%. Hal ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal yang menarik dari kualitas pendidikan penduduk yang bekerja adalah adanya pergeseran prosentase terbesar lulusan SD pada tahun 2017 dan tahun 2018, langsung bergeser ke lulusan terbesar jenjang SMA pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Untuk mengetahui kualitas pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 secara rinci, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.04
Kualitas Penduduk yang Bekerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tidak/Belum Tamat SD	20.094	22.929	30.106	29.455	26.147	27.482
2	Tamat Sekolah Dasar	51.191	53.476	45.707	45.834	50.105	52.663
3	Tamat SMP/ Setingkat	43.664	46.163	46.128	46.221	46.480	48.853
4	Tamat SMA/ Setingkat	42.400	48.277	50.378	55.321	62.992	66.208
5	Tamat Diploma I/II/III	3.740	3.877	4.959	5.152	5.327	5.599
6	Tamat S-1/S-2/S-3	12.523	14.359	14.042	14.487	15.440	16.228
Jumlah		173.612	189.081	191.320	196.470	206.491	217.033

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu.

5. Investasi

Kabupaten Pringsewu masih tetap menarik bagi investor untuk yang akan menanamkan modalnya atau berinvestasi. Hal ini karena wilayah Kabupaten Pringsewu relatif kondusif dan nyaman serta jarang terjadi adanya perselisihan antara buruh tenaga kerja dengan perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu, dimana pada tahun 2022 tercatat ada 122 PMDN yang melakukan investasi dengan total nilai investasi sebesar Rp. 715.904.000.000, atau mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 25.586.000.000, dengan jumlah investor sebanyak 75 perusahaan.

Keberadaan investor dalam melaksanakan aktivitasnya di Kabupaten Pringsewu, juga bermanfaat terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada. Tercatat pada tahun 2017 mampu menyerap 27,12% tenaga kerja. Namun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 23,76%, tahun 2019 sebesar 13,71%, tahun 2020 sebesar 7,71%, tahun 2021 sebesar 8,40% dan tahun 2022 sebesar 2,44%. Kondisi ini menunjukkan bahwa prosentase terbesar penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pringsewu, masih di dominasi pada sektor Usaha Menengah dan Kecil atau industri rumah tangga.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

A. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tantangan perekonomian nasional dari faktor luar akan tetap berimbas pada perekonomian daerah. Laju pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dibutuhkan dalam upaya akselerasi transformasi ekonomi di tahun 2023. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Buku II Nota Keuangan APBN Tahun 2023, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan pada perekonomian antara lain tertundanya investasi, meningkatnya pengangguran, terganggunya rantai pasokan, dan kemunduran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian (learning loss). Tantangan yang tidak kalah berat yaitu perlambatan ekonomi dunia dan pelemahan perdagangan global yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dan kinerja ekspor nasional dalam jangka pendek. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan produktivitas nasional yang menjadi kunci penguatan kinerja ekonomi jangka menengah-panjang melalui sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan peran industrialisasi, ekonomi digital, dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, berbagai strategi perlu dilakukan untuk mendorong kinerja ekonomi mencapai kapasitas optimal (closing the gap).

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional menghadapi tantangan besar, terutama dipicu pandemi Covid-19. Pemerintah senantiasa merespons berbagai tantangan perekonomian dengan bauran kebijakan fiskal yang solid dan terukur. Langkah penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan fiskal extraordinary sejak tahun 2020 dengan dukungan APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel yang diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Upaya Pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional di tahun 2021 membuahkan hasil positif, sehingga terdapat ruang untuk membangun fondasi pemulihan ekonomi yang kuat. Pada tahun 2021, kinerja ekonomi mampu bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,7 persen (yoy). Tren positif ini berlanjut pada triwulan kedua tahun 2022, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen (yoy). Kinerja positif perekonomian tersebut diperkirakan dapat dijaga sampai dengan akhir tahun 2022, meskipun masih dibayangi oleh dinamika perekonomian global.

Memasuki tahun 2022, upaya pemulihan ekonomi kembali mendapatkan tantangan dan risiko baru dari faktor global yang berasal dari sisi ekonomi, geopolitik, dan keuangan. Meningkatnya aktivitas perekonomian terutama pada negara-negara maju mendorong terjadinya tingkat permintaan yang tinggi untuk komoditas pangan dan energi. Kondisi ini menyebabkan

terjadinya kenaikan harga-harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan gandum yang kemudian mendorong tingginya laju inflasi pada negara-negara yang membutuhkan komoditas-komoditas tersebut. Tingginya tekanan inflasi di berbagai negara tersebut direspons oleh beberapa bank sentral negara-negara maju dengan meningkatkan suku bunga yang dapat berisiko terhadap fundamental perekonomian domestik berupa arus modal keluar (capital outflow) serta meningkatnya inflasi dan tingkat suku bunga. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terhadap meningkatnya laju inflasi yang persisten. Fungsi APBN sebagai shock absorber dilakukan melalui optimalisasi dampak positif pendapatan negara dari kenaikan harga komoditas, terutama penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dengan menambah anggaran khususnya untuk alokasi subsidi dan kompensasi energi, serta penebalan perlindungan sosial. Langkah kebijakan tersebut tetap memperhatikan kesehatan dan kesinambungan fiskal yang selanjutnya dituangkan pada Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Selanjutnya, perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Faktor lain adalah potensi krisis utang global akibat meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga yang berpotensi mengakibatkan arus modal keluar dari negara berkembang. Di sisi lain, potensi stagflasi diperkirakan akan menyebabkan harga komoditas termoderasi. Menghadapi ketidakpastian yang tinggi, Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 akan didorong oleh pulihnya permintaan domestik dan masih terjaganya kinerja ekspor.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas melalui akselerasi transformasi ekonomi, yang meliputi: (1) normalisasi aktivitas masyarakat seiring perbaikan situasi pandemi; (2) peningkatan daya tarik investasi termasuk hilirisasi manufaktur, ekonomi digital dan ekonomi hijau; dan (3) mengembalikan peran sektor manufaktur sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri. Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2023, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal dengan melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Untuk peningkatan produktivitas nasional, dilakukan strategi prioritas anggaran dan reformasi fiskal yang holistik. Transformasi ekonomi sangat penting dilakukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap). Upaya ini diharapkan akan memicu geliat investasi serta daya saing nasional di pasar global. Dengan berpijak pada kebijakan

transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3 persen. Kinerja tersebut ditujukan bersifat inklusif dan berkelanjutan yang tercermin dari target indikator kesejahteraan sosial. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diupayakan berada pada kisaran 5,3-6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) yang diharapkan masing-masing berada pada kisaran 7,5-8,5 persen dan 0,375-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,31-73,49.

Melalui kebijakan fiskal tahun 2023, Pemerintah akan menggunakan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi agenda reformasi struktural pascapandemi dan penguatan sisi supply untuk meningkatkan produktivitas. Tahun 2023 merupakan titik awal tahun anggaran yang akan kembali ke jalur kaidah fiskal dengan batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB. Langkah konsolidasi fiskal jangka menengah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2020 dengan fondasi reformasi fiskal yang fokus kepada optimalisasi pendapatan negara, perbaikan kualitas belanja (*spending better*), serta pembiayaan produktif dan inovatif. APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan perbaikan ekonomi ke depan. Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain untuk mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

Tantangan-tantangan yang terjadi secara nasional, pada gilirannya juga merembet juga ke tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Upaya penurunan tingkat kemiskinan yang sampai dengan tahun 2024 sudah memiliki trend membaik, diperkirakan pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 akan kembali naik. Begitu juga dengan keberhasilan selama ini dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, juga terancam kembali meningkat.

Tantangan lainnya yang masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah meningkatkan daya saing daerah, yang masih dalam kategori sedang, indeks desa membangun yang masih dominan dalam kategori berkembang, dan ketimpangan wilayah yang masih terjadi. Ini semua menjadi fokus utama dalam menentukan kebijakan perekonomian daerah yang tepat. Untuk menghadapi tantangan tersebut perlu usaha yang dilakukan, yaitu:

- a. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan perbaikan produk-pruduk hukum, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mengundang investor untuk berinvestasi di daerah sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran

- serta pemerintah daerah dan lembaga penegakan hukum diperlukan untuk menjamin keberlangsungan investasi serta menekan disparitas.
- Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadahi untuk mendukung investasi di daerah sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena dapat memberi daya ungkit bagi sektor lainnya untuk terus berkembang.
 - Mengembangkan sektor unggulan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor riil sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan mengikutsertakan Koperasi, UKM, BUMN, dan Swasta yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah
 - Membangun dan mengembangkan ekonomi kreatif melalui upaya peningkatan SDM, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Risiko tersebut utamanya dipengaruhi potensi stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi global, nasional, dan daerah, maka diperkirakan kondisi makro perekonomian Kabupaten Pringsewu, akan bergerak sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.05
Perkiraan dan Target Perekonomian Makro Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 ^{a)}	Tahun 2024 ^{a)}
1	PDRB HB (Juta Rupiah)	11.156.950	11.166.160	11.662.320	12.852.320	12.129.617,39	12.920.403,62
2	PDRB HK (Juta Rupiah)	7.741.500	7.647.660	7.870.660	8.214.160	8.357.392,82	8.751.351,94
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	400.187	405.466	406.823	408.415	413.493	418.248
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,75	0,73	0,45	0,5	0,71	0,77
5	PDRB per kapita HB (juta/kapita/ tahun)	27.851,92	27.563,22	28.666,81	31.468,39	28.800	29.200
6	PDRB per kapita HK (juta/kapita/ tahun)	19.346,34	18.974,21	19.345,42	21.236,03	20.210	20.920
7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,4 - 4,7	4,5 - 5,0
9	Inflasi	2,02	1,77	2,73	5,7	2,5 - 3,00	2,5 - 3,00
10	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	10.110	16.879	34.492	34.991	62.861	84.863

Sumber : Analisa PDRB Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel tersebut dan dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap target RPD, maka proyeksi perekonomian makro di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 4,4 – 4,7% dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,5 – 5,0%.
- b. Laju Inflasi pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 2,5 - 3,00% dan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 2,5 - 3,00%.
- c. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,71% dan pada Tahun 2024 ditargetkan 0,75%.
- d. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 12.129.617,39 juta rupiah, dan pada Tahun 2024 ditargetkan mencapai 12.920.403,62 juta rupiah.
- e. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 8.357.392,82 juta rupiah, dan pada Tahun 2024 ditargetkan mencapai 8.751.351,94 juta rupiah.
- f. Nilai PDRB perkapita ADHB pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 28,80 juta rupiah perkapita dan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 29,20 juta rupiah per kapita.
- g. Nilai PDRB perkapita ADHK pada Tahun 2023 diperkirakan sebesar 20,21 juta rupiah perkapita dan pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 20,92 juta rupiah perkapita.
- h. Nilai investasi PMDA dan PMA pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 62.861 juta rupiah dan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 84.863 juta rupiah.

3.1.3. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024, maka perlu upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial di Kabupaten Pringsewu. Program dan kegiatan juga difokuskan pada peningkatan peran dan sinergitas sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan serta jasa. Untuk selanjutnya kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi UMKM, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor UMKM, jasa dan perdagangan, industri kerajinan dan pariwisata.
 - b. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk sektor jasa dan perdagangan, industri kerajinan dan pariwisata.
 - c. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata dan desa wisata serta wisata alternatif.
 - d. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perekonomian.
 - e. Membuka akses terhadap pusat-pusat perekonomian baru.

- f. Memberikan ruang kepada dunia usaha untuk ikut serta dalam membangun sarana dan prasarana perekonomian.
- 2. Meningkatnya keamanan dan cadangan pangan masyarakat, program diarahkan pada:
 - a. Mengatasi perubahan iklim.
 - b. Mempromosikan keragaman pangan.
 - c. Meningkatkan produksi.
- 3. Meningkatnya iklim berusaha dan investasi, program diarahkan pada:
 - a. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - b. Peningkatan nilai investasi.
 - c. Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Pengembangan ekonomi kreatif.
- 4. Meningkatnya produksi hasil pertanian, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian
 - b. Pendampingan yang intensif dengan memberdayakan penyuluh pertanian.
 - c. Kepastian bibit dan pupuk bagi sektor pertanian.
- 5. Meningkatnya produksi hasil perikanan, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor perikanan.
 - b. Pendampingan yang intensif dengan memberdayakan penyuluh perikanan.
 - c. Kepastian bibit dan pupuk bagi sektor perikanan.
- 6. Menurunnya angka kemiskinan, program diarahkan pada:
 - a. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif.
 - c. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.
- 7. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, program diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
 - b. Pemanfaatan lahan secara optimal.
 - c. Memberi kemudahan kepada dunia usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.
 - d. Memberi dukungan terhadap aktivitas penduduk yang dapat memberikan nilai ekonomis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, dimana semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu disisi lain, perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran.

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran.

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah (APBD) harus disesuaikan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan prioritas, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sesuai dengan realita di lapangan.

Dalam konteks ini maka arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa juga ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD.
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat

menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Untuk Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk Pendapatan Transfer mencakup Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pemerintah Pusat itu sendiri, meliputi dana perimbangan (dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam; dana alokasi umum; dana alokasi khusus fisik; dan dana alokasi khusus non fisik), dana insentif daerah, dan dana desa. Sedangkan untuk Transfer Antar Daerah, meliputi pendapatan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah; dan bantuan keuangan yang diterima dari daerah lain.

Selanjutnya untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, mencakup hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam hal ini adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dana darurat dalam hal ini adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 meliputi :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.

- c. Memberikan reward dalam bentuk undian bagi wajib pajak di setiap kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - e. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assessment.
 - f. Mendayagunakan asset daerah.
2. Optimalisasi data pendukung pendapatan transfer, yang meliputi :
- a. Memperhitungkan celah fiskal secara seksama, sebagai bahan perhitungan dana alokasi umum.
 - b. Menjaga kondusifitas dan kepatuhan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 - c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan secara baik dan terukur, terutama terhadap pelayanan masyarakat.
 - d. Melaksanakan berbagai inovasi dalam rangka mendukung penerimaan dana insentif daerah.
 - e. Menyediakan data secara lengkap dan proaktif menyusun laporan dalam rangka penerimaan dana alokasi khusus fisik dan non fisik.
 - f. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa/pekon dalam rangka pengelolaan dana desa.
 - g. Memberikan dukungan sarana dan prasarana terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan pajak yang menjadi kewenangan provinsi.
 - h. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
3. Optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang syah melalui :
- a. Melakukan upaya-upaya yang terstruktur untuk mendapatkan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah.
 - c. Memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penerapan standar pelayanan minimal, sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan dana operasional sekolah dan dana operasional pelayanan kesehatan.
 - d. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah dan mengoptimalkan penerimaan dari dana desa.
 - e. Membuka ruang untuk bekerjasama antar pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama.

Berdasarkan arah kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya di implementasikan melalui analisis penerimaan pendapatan secara logis terhadap realisasi pendapatan pada tahun-tahun yang lalu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan proyeksi

pendapatan di tahun yang akan datang. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.06
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (N-3)	REALISASI TAHUN 2022 (N-2)	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2023)	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025 (N+1)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.206.214.223.948,33	1.197.952.212.131,52	1.187.010.866.222,00	1.241.657.457.638,00	1.416.069.267.350,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86.313.480.515,97	110.105.650.568,52	146.969.614.222,00	139.414.902.382,00	156.938.602.350,00
1.1.1	Pajak Daerah	23.521.005.221,72	27.500.000.000,00	48.000.000.000,00	43.000.000.000,00	49.160.907.600,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.441.509.866,00	5.072.685.000,00	9.743.250.000,00	7.188.538.162,00	10.669.901.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.785.492.325,76	2.315.330.440,00	3.226.364.222,00	3.226.364.222,00	2.914.734.500,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.565.473.102,49	75.217.635.128,52	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	94.193.058.750,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.073.034.790.863,69	1.039.178.361.563,00	1.040.041.252.000,00	1.102.242.555.254,00	1.205.549.165.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	988.765.827.361,00	973.753.967.111,00	960.041.252.000,00	1.022.242.555.254,00	1.121.280.201.500,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	84.268.963.502,69	65.424.394.452,00	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00	84.268.963.500,00

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah digunakan diantaranya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, aktivitas belanja daerah bersifat fleksibel dengan tetap konsisten pada prioritas dan tujuan daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan memengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara luas.

Kebijakan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pringsewu mengacu pada prinsip *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi anggaran belanja untuk program dan kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pringsewu. Keluaran dari Belanja Daerah harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Secara lebih operasional lagi, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dalam hal ini belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah. Belanja modal tersebut meliputi :

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Termasuk dalam hal ini adalah keperluan mendesak untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam hal ketersediaan belanja tidak terduga tersebut, tidak mencukupi untuk pengembalian kelebihan pembayaran, maka menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan. Untuk belanja bagi hasil, dalam penganggaran belanjanya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk belanja bantuan keuangan, diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan ini terdiri atas bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota, dan bantuan Keuangan Daerah kabupaten kepada desa atau pekon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah sebagaimana dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.
4. Mengalokasikan belanja untuk bidang kesehatan minimal sebesar 20% dari APBD, bidang kesehatan minimal 10% dari APBD, dan transfer dana desa sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran penanganan Pandemi Covid-19 dan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya.
8. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2024.
9. Mendukung program strategis terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
10. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, mengacu pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemanfaatan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
12. Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program program pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

14. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung seperti belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
15. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta mendukung capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya di implementasikan melalui analisis pengelolaan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun realisasi dan proyeksi belanja Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.07
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (N-3)	REALISASI TAHUN 2022 (N-2)	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2023)	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025 (N+1)
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	1.074.057.150.853,77	1.047.017.674.509,14	1.214.510.866.222,00	1.259.912.927.822,00	1.248.540.548.950,00
2.1	BELANJA OPERASI	773.930.074.864,36	865.220.646.409,56	915.578.500.770,00	943.429.493.770,00	983.540.278.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	505.144.344.928,00	589.615.927.655,56	562.289.530.418,00	574.790.173.418,00	604.933.364.200,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	243.684.446.083,36	248.198.118.754,00	318.165.875.952,00	318.706.225.952,00	292.712.350.600,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	18.150.533.853,00	25.606.600.000,00	33.338.094.400,00	48.238.094.400,00	82.637.279.700,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.950.750.000,00	1.800.000.000,00	1.590.000.000,00	1.500.000.000,00	3.257.283.500,00
2.2	BELANJA MODAL	300.124.318.989,41	164.296.400.288,58	109.149.773.252,00	126.700.842.852,00	259.350.745.950,00
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.282.922.875,41	1.797.163.296,58	1.700.000.000,00	2.250.000.000,00	5.221.506.900,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.681.072.754,00	60.589.897.864,00	16.215.891.298,00	18.715.891.298,00	93.632.045.000,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.895.785.181,00	35.525.757.909,00	21.886.048.325,00	27.687.117.925,00	55.578.489.800,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	119.999.007.016,00	65.690.794.259,00	59.990.696.379,00	67.490.696.379,00	99.034.701.200,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.265.531.163,00	692.786.960,00	9.357.137.250,00	10.557.137.250,00	5.884.003.050,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.757.000,00	17.500.627.811,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	5.649.525.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.757.000,00	17.500.627.811,00	5.250.000.000,00	5.538.750.000,00	5.649.525.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	175.281.837.692,00	193.864.318.242,00	184.532.592.200,00	183.777.121.016,00	195.528.718.400,00
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.071.440.084,00	3.331.852.342,00	5.774.325.000,00	5.018.853.816,00	4.563.510.900,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	173.210.397.608,00	190.532.465.900,00	178.758.267.200,00	178.758.267.200,00	190.965.207.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.124.764.597,44)	(42.929.780.619,62)	(27.500.000.000,00)	(17.500.000.000,00)	(28.000.000.000,00)

3.2.3.Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pembiayaan hanya akan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan, yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan melakukan penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diluar yang telah ditetapkan pada point 1 dan point 2 diatas, hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.

Kemudian berdasarkan arah kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan tersebut, maka realisasi dan proyeksi pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025 secara lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.08
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 – 2025

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021 (N-3)	REALISASI TAHUN 2022 (N-2)	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (2023)	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2025 (N+1)
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.124.764.597,44	44.929.780.619,62	35.000.000.000,00	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.	44.124.764.597,44	44.929.780.619,62	35.000.000.000,00	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	43.124.764.597,44	42.929.780.619,62	27.500.000.000,00	17.500.000.000,00	28.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Sebelum sampai dengan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, terlebih dahulu diuraikan secara singkat arahan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 mengacu kepada Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026. Adapun tujuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif.
4. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan.
5. Meningkatkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Kemudian syarat utama dalam menentukan tujuan adalah harus bersifat *Measurable* atau terukur. Berikut ini adalah indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026.

Tabel 4.01
Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal	Target Indikator Tujuan					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil reformasi birokrasi.	51.24	54.01	57.01	60.01	63.01		63.01
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Ekonomi.	70.98	71.05	71.40	71.90	72.45		72.45
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi tahunan pertumbuhan ekonomi	4.37	3.31	4.23	4.96	5.48		5.48
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Indeks komposit dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan.	N/A	70.00	70.10	70.20	70.30		70.30
5	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Survey indeks rasa aman	indeks	0.084	0.083	0.070	0.062		0.062

Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari setiap tujuan ditetapkan sasarannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat capaian keberhasilan sasaran yang akan diwujudkan. Adapun sasaran dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

- A. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- B. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 3. Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.
 4. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.

- C. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.
 - 2. Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah.
- D. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan.
 - 2. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup.
- E. Meningkatkan Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - 1. Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.
 - 2. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator target kinerja sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.02
Target Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil reformasi birokrasi	Indeks	58.49	54.01	57.01	60.01	63.01	63.01
				Nilai SAKIP	Nilai evaluasi pelaksanaan SAKIP	Nilai	66.35	67.01	70.01	72.01	74.01	74.01
				Opini BPK RI	Opini BPK atas LKPD Tahun	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pembobotan kualitas SDM, sarpras, transparansi, pengaduan dan inovasi	Persen	3,61	3.51	3.53	3.60	3.65	3.65
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai perhitungan dari BPS	Indeks	0.636	0.650	0.655	0.660	0.665	0.665
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai perhitungan dari BPS	Indeks	0.773	0.780	0.783	0.786	0.789	0.789
			Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan keset. gender.	Indeks Desa Membangun	Indeks komposit ketahanan social, ketahan ekonomi dan ketahanan ekologi	Indeks	0.74	0.77	0.79	0.81	0.83	0.83
				Indeks Pembangunan Pemuda	Penjumlahan komposit aspek Pendidikan, kesehatan kesejahteraan. Lapangan, kesempatan kerja, kepemimpinan & gender/5	Indeks	40.98	52.00	54.00	55.00	57.00	57.00
				Indekas Pembangunan Gender	Angka indeks pemberdayaan gender hasil perhitungan	Indeks	92.50	92.63	92.71	92.79	92.83	92.83
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja.	Angka Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100	Persen	4.77	4.72	4.58	4.33	4.13	4.13

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi.	PDRB hrga konstan tahun ke t, dibagi PDRB harga konstan tahun k t-1 x 100	Persen	4.37	3.31	4.23	4.96	5.48	5.48	
				Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin di Pringsewu pada tahun (n) (dengan 2 digit di belakang koma) Sumber BPS	Persen	9.34	9.68	9.47	9.25	9.04	9.04	
				Gini Rasio.	Angka indeks gini yang bersumber dari perhitungan BPS	Indeks	0.272	0.309	0.308	0.307	0.306	0.306	
			Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah.	Nilai survey atas daya saing daerah	Indeks	-	3.20	3.58	3.78	3.98	3.98	
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	Pembobotan dari 8 indikator infrastruktur	Persen	46,04	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman.	Luas penanganan pemukiman kumuh/luas wilayah permukiman kumuh	Persen	0,37	0.38	0.76	1.14	1.52	1.52	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (30%IKA) + (30%IKU) +(40%IKTL)	Indeks	59.33	63.26	63.80	64.35	64.90	64.90	
5	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial	Survey solidaritas social, toleransi&stabilitas/ketertiban umum	Indeks	N/A	60.0	61.30	61.85	62.05	62.05	
			Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Nilai perhitungan dari BNPB	Indeks	95.20	57.7	58.85	60.08	61.80	61.80	

4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu maka dalam penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, harus mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya. Dalam hal ini khususnya adalah dokumen Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

4.2.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, ditegaskan bahwa visi pembangunan lima tahun kedepan (2020-2024) adalah Terwujudnya Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang akan dicapai, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan misi tersebut, secara khusus Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia.

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dari lima arahan tersebut selanjutnya ditetapkan 7 (tujuh) agenda utama pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan

perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

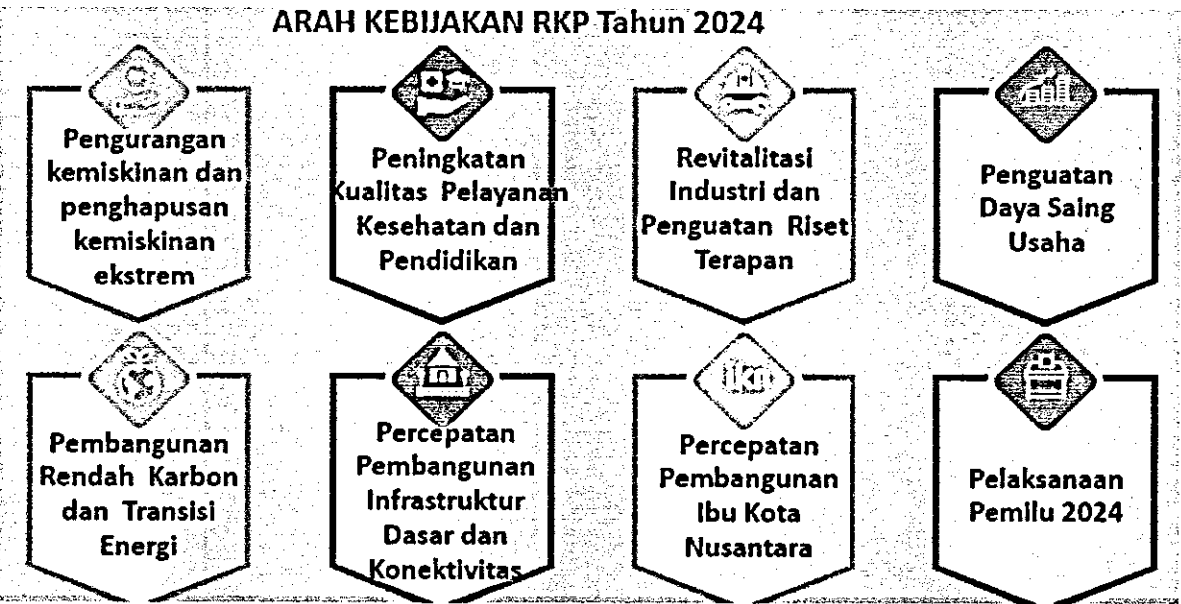
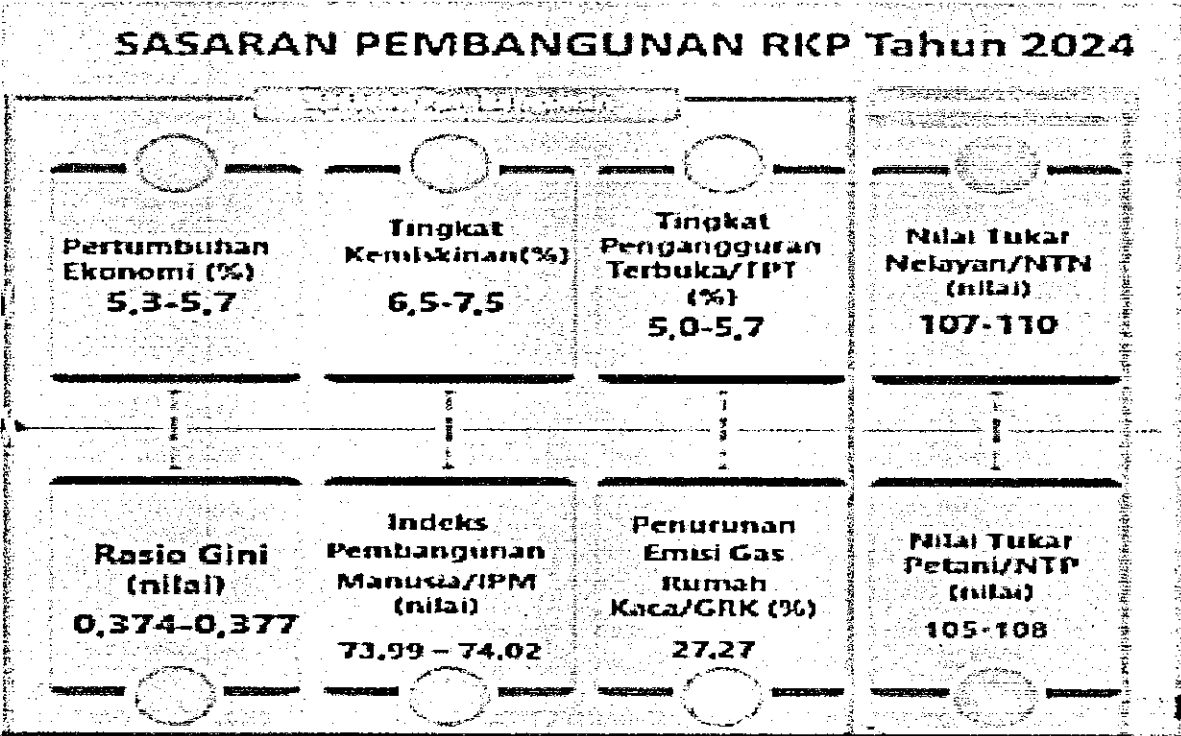
Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan kesemuanya itu dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Adapun tentang tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2024, yaitu :

“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Prioritas :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sasaran Pembangunan pada RKP 2024 yang hendak dicapai :



4.2.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, ditegaskan bahwa visi pembangunan daerah Provinsi Lampung lima tahun kedepan adalah :

RAKYAT LAMPUNG BERJAYA.

Makna dari visi Rakyat Lampung Berjaya adalah :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Kemudian dalam rangka untuk mencapai visi Pembangunan Provinsi Lampung **RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan *good govemance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia), dengan sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah; serta meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.
2. Pelestarian warisan budaya dengan sasaran meningkatnya pelestarian budaya.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi; meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja; dan meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat); meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah; meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas; meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya); dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya), dengan sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah; terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang; meningkatnya kapasitas jaringan sumberdaya air; dan meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman
6. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian; meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan; menjaga stabilitas harga; menurunkan kemiskinan; mengurangi ketimpangan antar wilayah; dan menurunkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat
7. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Prioritas Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan. Kedua prioritas tersebut disusun berdasarkan pemikiran bahwa proses pembangunan khususnya di Provinsi Lampung membutuhkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas, dimana IPM Provinsi Lampung di Tahun 2022 sebesar 70,45 masih berada di bawah IPM Nasional yaitu sebesar 72,91. Adapun untuk prioritas Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan juga melihat realita bahwa 30% perekonomian di Provinsi Lampung masih didominasi oleh Sektor Pertanian.

Secara lebih khusus, arahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 mengamanatkan kepada Kabupaten Pringsewu sebagai mandatori lumbung pangan di Provinsi Lampung. Selain itu juga menjadi hiterland penyangga Kota Bandar Lampung. Lalu dengan adanya pembangunan bendungan Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu, juga akan menjadi destinasi wisata yang representatif. Arahan-arahan pengembangan itu, menjadi bahan pendukung untuk di sinergikan terhadap perencanaan yang di susun oleh Kabupaten Pringsewu.

Sedangkan tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah:

“Pemantapan Transformasi Ekonomi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya”

Prioritas :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana;

Sasaran Makro Pembangunan yang hendak dicapai Provinsi Lampung pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi, berkisar 4,5 – 5,5 %
2. Tingkat Inflasi, berkisar 3,0 ± 1%
3. PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah), sebesar 45 – 46 Jt
4. Tingkat Pengangguran Terbuka, 4,0 – 3,8%
5. Tingkat Kemiskinan, 11,4 – 10,9%
6. Indeks Pembangunan Manusia, 70,6 - 70,9
7. Indeks Gini, 0,293 - 0,314
8. Nilai Tukar Petani, 105 - 106
9. Pertumbuhan PAD, 8,47
10. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, 78,0%
11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 7,29

4.2.3. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026. Dalam dokumen RPD tersebut, indikasi tema pada tahun 2024 adalah “Penguatan Sektor Strategis Berbasis Potensi Unggulan dan Pelayanan Publik”. Kemudian indikasi arah kebijakan pembangunannya adalah :

1. Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.
2. Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidik serta tenaga kependidikan yang berkualitas.
3. Peningkatan minat baca masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.
6. Penguatan lembaga dan pemberdayaan masy. pekon.
7. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar.
9. Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan.
10. Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat.
11. Memberikan kemudahan investasi dan penan. modal.
12. Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kawasan untuk mendukung perek masyarakat.
13. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.
14. Optimalisasi penataan perumahan dan kawasan permukiman yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah.
15. Penguatan partisipasi masyarakat dlm mengantisipasi timbulnya gangguan, keamanan dan ketertiban.
16. Penanganan pasca bencana secara cepat sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan indikasi tema dan arah kebijakan tersebut, setelah disesuaikan dengan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di Kabupaten Pringsewu, maka ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah :

Penguatan Sektor Ekonomi Strategis dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Pringsewu tahun 2024 adalah :

1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM.
- b. Meningkatnya keamanan dan cadangan pangan masyarakat.
- c. Meningkatnya iklim berusaha dan investasi;

- d. Meningkatnya produksi hasil pertanian;
- e. Meningkatnya produksi hasil perikanan.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi.	4,37	4.50 – 5,00
2	Gini Rasio.	0.272	0.27 – 0,30
3	Inflasi	5,37	2,50 – 3,00

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- b. Peningkatan minat baca masyarakat.
- c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- e. Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat yang inovatif.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Indeks Daya Saing Daerah.	3.068	3.58
2	Indeks Pembangunan Manusia	70.98	71.40
3	Indeks Pembangunan Pemuda	40.98	54.00
4	Indeks Pembangunan Gender	92.50	92.71
5	Indeks Desa Membangun	0.72	0.79

3. Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
- b. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS.
- c. Menurunnya angka kemiskinan.
- d. Menurunnya prevelansi stunting.
- e. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Angka kemiskinan	9.34	9,40 - 9.47
2	Angka Pengangguran Terbuka	4.77	4,00 - 4.58
3	Prevelansi Stunting	5,50	3,50

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- e. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B
2	Nilai SAKIP	B	B
3	Opini BPK RI	WTP	WTP
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	3.53

5. Peningkatan Kualitas Insfrasruktur dan Lingkungan Hidup

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten.
- b. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman masyarakat.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.
- e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	46,04	100
2	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman.	N/A	0.76
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,33	63.80
4	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	N/A	70.10

6. Meningkatkan Ketertiban, Kenyamanan dan Mitigasi Bencana

Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- b. Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana.
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2022	TARGET 2024
1	Indeks Kesalehan Sosial	N/A	61.30
2	Indeks Resiko Bencana	95.20	93.40
3	Indeks rasa aman	indeks	0.083

Sedangkan untuk sasaran dan target makro sosial ekonomi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,50 – 5,00%.
- 2. Tingkat Inflasi berkisar antara 2,50 – 3,00%.
- 3. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 9,40 – 9,47%.
- 4. Tingkat Pengangguran ditekan menjadi 4,0 - 4,58%
- 5. IPM naik menjadi 71,40.
- 6. Angka Harapan Hidup pada kisaran 70,87 tahun;
- 7. Rata-Rata Lama Sekolah, 8,84 tahun;
- 8. Angka harapan lama sekolah 12,87
- 9. Gini Rasio pada kisaran 0,27 – 0,30
- 10. PDRB per Kapita ADHB sebesar 29,20 juta rupiah per Kapita.

Tabel 4.03
Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2024
Terhadap RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026

RPD 2023-2026				RKPD 2024		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan sistem pendukung kualitas tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan • Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan kualitas pelayanan publik • Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional
			Perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis, adaptif dan inovatif.			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung dan SDM pengelola pelayanan publik.	Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik berbasis elektronik.			
			Peningkatan kualitas aparatur pengelola pelayanan publik			
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	Pemerataan dan kemudahan akses pendidikan secara berkualitas.	Penyediaan sarana prasarana dan SDM pendidik serta tenaga kependidikan yang berkualitas	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	• Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. • Peningkatan minat baca masyarakat. • Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. • Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. • Meningkatkan tingkat keberdayaan masyarakat
			Peningkatan minat baca masyarakat			
	Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	Penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat pekon			

RPD 2023-2026				RKPD 2024		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Peningkatan produktivitas pemuda dan prestasi olah raga			yang inovatif.
			Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender serta pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan akses kesehatan.	Peningkatan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas	Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Menurunkan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting	• Menurunnya angka kemiskinan • Menurunnya prevelansi stunting • Meningkatnya partisipasi angkatan kerja. • Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS. • Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif			
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Menurunkan angka pengangguran.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar			
			Penguatan komitmen dengan investor untuk penyerapan tenaga kerja lokal			
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas.	Meningkatkan sarana prasarana perdagangan, pemberdayaan UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.	Peningkatan kualitas produksi UMKM dan sarana distribusi perdagangan.	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah	• Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM. • Meningkatnya keamanan dan cadangan pangan masyarakat. • Meningkatnya iklim

RPD 2023-2026				RKPD 2024		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
			Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan cadangan pangan masyarakat.			berusaha dan investasi. • Meningkatnya produksi hasil pertanian • Meningkatnya produksi hasil perikanan.
			Pemberdayaan usaha masyarakat miskin dan pemenuhan perlindungan jaminan sosial.			
	Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Meningkatkan kualitas sistem pendukung produktifitas potensi daerah	Optimalisasi sistem pendukung peningkatan produksi dan pasca panen hasil pertanian dan perikanan.			
			Memberikan kemudahan investasi dan penanaman modal.			
			Penguatan pariwisata berbasis ekonomi lokal dan promosi pariwisata.			
4. Meningkatkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan.	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang memadai.	Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kawasan untuk mendukung perekonomian masyarakat.	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Insfrasruktur Dan Lingkungan Hidup	• Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten • Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar • Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan dan
			Penyediaan sasrana dan prasarana perhubungan sesuai dengan rencana pengembangan wilayah			

RPD 2023-2026				RKPD 2024		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
	Meingkatnya kualitas permukaan dan lingkungan hidup	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan lingkungan hidup.	Optimalisasi penataan perumahan dan kawasan permukiman yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah.			permukiman masyarakat. • Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai • Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
			Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup			
5. Meningkatkan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang nyaman	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.	Penguatan partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya gangguan, keamanan dan ketertiban	Ketertiban dan Kenyamanan	Meningkatkan ketertiban, kenyamanan dan mitigasi bencana	• Meningkatnya ketertiban dalam kehidupan Masyarakat • Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum • Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana
			Penguatan peran FKUB dan lembaga kemasyarakatan dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis.			
	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.	Penguatan kapasitas masyarakat menuju pekon mandiri tangguh bencana.			
			Penanganan pasca bencana secara cepat sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP).			

Tabel 4.04
Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 dengan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

RKP		RKPD Provinsi Lampung		RKPD Kabupaten Pringsewu		
Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Pembangunan	Sasaran Makro
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	• Pertumbuhan Ekonomi 5,3 - 5,7 • Tingkat Kemiskinan (%) 6,5 - 7,5	1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan	• Pertumbuhan Ekonomi, berkisar 4,5 - 5,5 % • Tingkat Inflasi, berkisar 3,0 ± 1 %	1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah	a. Meningkatkan kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM.	• Pertumbuhan ekonomi berkisar 4,5 - 5,0 % • Tingkat Inflasi berkisar antara 2,50 - 3,00%
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• TPT 5,0-5,7 • Rasio Gini 0,374 - 0,377 • IPM 73,99 - 74,02 • Penurunan Emisi GRK (%) 27,27	2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	• PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah), sebesar 45 - 46 Jt • Tingkat Pengangguran Terbuka, 4,0 - 3,8%		b. Meningkatkan keamanan dan cadangan pangan masyarakat.	• Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 9,40 - 9,47% • Tingkat Pengangguran ditekan menjadi 4,0 - 4,58%
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	• NTP 105 - 108 • NTN 107 - 110	3. Pembangunan Infrastruktur	• Tingkat Kemiskinan, 11,4 - 10,9% • Indeks Pembangunan Manusia, 70,6 - 70,9		c. Meningkatkan iklim berusaha dan investasi;	• IPM naik menjadi 71,40 • Angka Harapan Hidup pada kisaran 70,87 tahun
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		4. Reformasi Birokrasi	• Indeks Pembangunan Manusia, 70,6 - 70,9 • Indeks Gini, 0,293 - 0,314	2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	d. Meningkatkan produksi hasil pertanian;	• Rata-Rata Lama Sekolah, 8,84 tahun • Angka harapan lama sekolah 12,87
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya	• Nilai Tukar Petani, 105 - 106 • Pertumbuhan PAD, 8,47		e. Meningkatkan produksi hasil perikanan.	• Gini Rasio pada kisaran 0,27-0,30 • PDRB per Kapita ADHB sebesar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana	• Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi, 78,0%		a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.	
					b. Meningkatkan minat baca masyarakat.	
					c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.	

RKP		RKPD Provinsi Lampung		RKPD Kabupaten Pringsewu		
Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Pembangunan	Sasaran Makro
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik			• Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, 7,29	3. Menurunkan Kemiskinan Ekstrims dan Stunting	d. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. e. Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat yang inovatif. a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja b. Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS. c. Menurunnya angka kemiskinan. d. Menurunnya prevelansi stunting. e. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender	29,20 juta rupiah per Kapita

RKP		RKPD Provinsi Lampung		RKPD Kabupaten Pringsewu		
Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Pembangunan	Sasaran Makro
				4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan. b. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan. c. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. e. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional	
				5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	a. Meningkatnya kualitas infrastruktur pada kawasan ibukota kabupaten. b. Meningkatnya penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.	

RKP		RKPD Provinsi Lampung		RKPD Kabupaten Pringsewu		
Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Makro	Prioritas	Sasaran Pembangunan	Sasaran Makro
				6. Meningkatkan Ketertiban, Kenyamanan dan Mitigasi Bencana	c. Meningkatkan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman masyarakat. d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. a. Meningkatkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. b. Meningkatkan stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman. c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mitigasi bencana. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum.	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan.

Kerangka Pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang dapat digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai target prioritas pembangunan daerah.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah. Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- d. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.

Oleh karena itu dalam menganalisis kerangka pendanaan daerah, maka terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan atau struktur APBD. Data-data berkaitan perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Adapun hasil analisis kerangka pendanaan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.01
 Kerangka Pendanaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

KODE	URAIAN	PROYEKSI/TARGET TAHUN 2024
4	PENDAPATAN	1.241.657.457.638,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	139.414.902.384,00
4.1.1	Pajak Daerah	43.000.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	7.188.538.162,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	3.226.364.222,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	86.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.102.242.555.254,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.022.242.555.254,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	80.000.000.000,00
5	BELANJA	1.259.157.457.638,00
5.1	BELANJA OPERASI	943.429.493.770,00
5.1.1	Belanja Pegawai	574.790.173.418,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	318.706.225.952,00
5.1.4	Belanja Subsidi	195.000.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	48.238.094.400,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	126.700.842.852,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.250.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.715.891.298,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.687.117.925,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.490.696.379,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.557.137.250,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.250.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	183.777.121.016,00
5.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.018.853.816,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa/Pekon	178.758.267.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.500.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00
6.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.	25.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	17.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00

5.2. Program dan Kegiatan Prioritas.

Program dan kegiatan prioritas merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program dan prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, perkiraan capaian pembangunan tahun 2023 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPD Kabupaten Pringsewu tahun 2023-2026. Selain itu, program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 merupakan rencana perwujudan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan tema dan prioritas pembangunan yang mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional serta tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pringsewu. Disisi lain, bahwa upaya pencapaian target pembangunan, juga dibarengi dengan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap program-program pembangunan yang benar-benar sangat dibutuhkan dan memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui proses top down tersebut, kemudian ditentukan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan.

Dalam penentuan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

5.2.1. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

A. Pendidikan.

1. Program pengelolaan pendidikan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Indeks Pendidikan 0,652; rata-rata lama sekolah 8,84 tahun; Angka Harapan Lama Sekolah 12,87 tahun, APK SD/MI 99,10%; APK SMP/MTs

83,00%; APM SD/MI 96,60%; APM SMP/MTs 80,70%; APS Anak Usia 7 – 12 tahun 96,60%; dan APS Anak Usia 13 – 15 tahun 80,70%.

2. *Program pendidik dan tenaga kependidikan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV 94,85%; dan Prosentase guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV 93,90%

3. *Program pengendalian perizinan pendidikan*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu penerbitan izin PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat sebesar 100%.

B. Kesehatan.

1. *Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Indeks Kesehatan 0,783; Angka Usia Harapan Hidup 70,87; Angka prevalensi stunting 3,50; angka kelangsungan hidup bayi 70,00%; angka kematian ibu melahirkan 0,10%; prosentase balita gizi buruk 0,002%; prosentase Puskesmas yang telah terakreditasi 100%; prosentase Puskesmas yang standar 100,00%

2. *Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan fungsional minimal di UPT Puskesmas Kabupaten Pringsewu sesuai standar 84,60%

3. *Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase sarana kefarmasian sesuai standar sebesar 75,00%

4. *Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif sebesar 100%

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1. *Program pengelolaan sumber daya air (SDA).*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik 77,00%.

2. *Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu prosentase Penduduk Berakses Air Minum 81,50%.

3. *Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Penanganan Sampah 59,00%.

4. *Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Cakupan Layanan Air Limbah 93,00%.

5. *Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Drainase Lingkungan Perkotaan dalam kondisi baik (tidak tersumbat) 82,40%.

6. *Program pengembangan permukiman*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Konektivitas Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100,00%.

7. *Program penataan bangunan gedung*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah Penerbitan PBG, SLF, SIMBG sebesar 89,00.

8. *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase terpeliharanya fasilitas umum dengan baik sebesar 82,00%.

9. *Program penyelenggaraan jalan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Jalan dalam Kondisi Baik 37,82%.

10. *Program Pengembangan Jasa Konstruksi*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi 13,18; dan Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi sebesar 100,00%.

11. *Program penyelenggaraan penataan ruang*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Presentase Dokumen Pengaturan Tata Ruang yang ditetapkan, dokumen perencanaan tata ruang yang disusun sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan tata ruang 92,40%.

D. Perumahan dan kawasan permukiman

1. *Program pengembangan perumahan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Ketersediaan Rumah Layak Huni 95,85%.

2. *Program kawasan permukiman.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertata 0,76%; prosentase ketersediaan kualitas lingkungan permukiman kumuh 98,86%; dan ketersediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas 100,00%.

3. *Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase ketersediaan kepemilikan perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas 25,00%.

E. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

1. *Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase penegakan perda dan perbup 86,00%.

2. *Program penanggulangan bencana.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio desa tangguh bencana 20,00%; dan Persentase Pelayanan Pasca bencana sesuai standar 100,00%.

3. *Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Pelayanan kebakaran 39,50%.

F. Sosial.

1. *Program pemberdayaan sosial.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 85,00%.

2. *Program rehabilitasi sosial.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Skor Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) 87,50.

3. *Program perlindungan dan jaminan sosial.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase penduduk miskin dan rentan dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 63,50%.

4. *Program penanganan bencana*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase korban bencana yang tertangani pada saat dan setelah tanggap darurat 100,00%.

5.2.2. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

A. Tenaga Kerja.

1. *Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan 70,00 persen.
2. *Program penempatan tenaga kerja.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 80,00%.
3. *Program hubungan industrial.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial 10,10%.

B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1. *Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 63,00%.
2. *Program perlindungan perempuan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 0,01%.
3. *Program peningkatan kualitas keluarga.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak 66,67%.
4. *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu ketersediaan Dokumen data terpilah gender dan anak 1 (satu) dokumen
5. *Program pemenuhan hak anak (PHA)*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase kecamatan yang telah membentuk forum anak 66,67%; Prosentase forum anak yang aktif (melakukan kegiatan minimal 3 kali setahun) 100,00%.
6. *Program perlindungan khusus anak*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase anak berhadapan dengan hukum yang mendapat perlindungan 100,00%

C. Pangan.

1. *Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Peningkatan infrastruktur pendukung kemandirian pangan, 1 unit.
2. *Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Tingkat penganekaragaman ketersediaan pangan dan konsumsi pangan, 85,00%
3. *Program penanganan kerawanan pangan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cadangan Pangan 300 ton.
4. *Program pengawasan keamanan pangan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Industri Pangan yang memiliki Sertifikasi keamanan pangan, 92,00 %.

D. Pertanian

1. *Program penatagunaan tanah*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah 25,00.

E. Lingkungan hidup.

1. *Program perencanaan lingkungan hidup*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup, sejumlah 3 dokumen
2. *Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Ketersediaan dokumen Kualitas lingkungan hidup, yang memuat IKA, IKU, dan IKTL 100,00%.
3. *Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan ketersediaan laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/Izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, sejumlah 3 laporan.
4. *Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase kepatuhan pelaku usaha sebesar 70,00%.

5. *Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan penilaian kinerja dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sebesar 7 penilaian.

6. *Program pengelolaan persampahan*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024, Persentase sampah yang dikelola TPA berbanding potensi timbulan sampah berdasar populasi BPS (n-1), sebesar 47,23%.

F. Kependudukan dan pencatatan sipil.

1. *Program pendaftaran penduduk.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Kepemilikan KTP El, Kartu Identitas Anak (KIA), sebesar 98,00%.

2. *Program pencatatan sipil.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024, Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th), Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, sebesar 97,00%.

3. *Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data/Dokumen Kependudukan, 70,00%.

4. *Program Pengelolaan Profil Kependudukan*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Penerbitan Buku Profil dan Data Kependudukan, 95,00%.

G. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

1. *Program penataan desa*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu jumlah desa yang terfasilitasi penataannya, sebesar 89.

2. *Program peningkatan kerjasama desa*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024, Prosentase desa yang melaksanakan kerjasama antar desa, sebesar 100,00%

3. *Program administrasi pemerintahan desa.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024, Prosentase pekon yang berkinerja baik 89,00%.

4. *Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif, sebesar 73,00%.

H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1. *Program pengendalian penduduk.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 81,00%.

2. *Program pembinaan keluarga berencana.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Peserta KB Aktif 81,00%; Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 10,00%; Total Fertility Rate (TFR) 2,34%.

3. *Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio ketergantungan penduduk 80%.

I. Perhubungan

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase penurunan titik rawan kecelakaan 78,75%; Persentase uji KIR kendaraan, 77,00%.

J. Komunikasi dan informatika.

1. *Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 60,00%.

2. *Program pengelolaan aplikasi informatika.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Indeks SPBE, sebesar 2,85.

K. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

1. *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Penongkatan prosentase Koperasi Sehat, 18,95%.

2. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Pelaku Perkoperasian yang dibina, sebesar 100,00%.

3. *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Koperasi Aktif, sebesar 30,00%.
4. *Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase UMKM yang masuk klasifikasi UKM, sebesar 30,00%.

L. Penanaman modal.

1. *Program pengembangan iklim penanaman modal*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan persetujuan nilai investasi (izin) 1.700 Izin.
2. *Program promosi penanaman modal*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah realisasi investasi sebesar 726 Milyar.
3. *Program pelayanan penanaman modal*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase pelayanan perizinan dan atau non perizinan secara online, sebesar 95,00%.
4. *Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio kepatuhan pelaku usaha, sebesar 90,00%.
5. *Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah PMA dan PMDN (investor), 30 Investor.

M. Kepemudaan dan olahraga

1. *Program pengembangan kapasitas saya saing kepemudaan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan peningkatan daya saing kepemudaan, sebesar 57,00%.
2. *Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga berprestasi, sejumlah 25 prestasi.
3. *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keperamukaan (organisasi), sejumlah 1 organisasi.

N. Statistik

Program penyelenggaraan statistik sektoral.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral, sejumlah 18 unit kerja.

O. Persandian

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan pengamanan informasi, sebesar 81,08%.

P. Kebudayaan

1. Program pengembangan kebudayaan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase seni dan budaya yang lestari, sebesar 62,50 persen.

2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase cagar budaya yang terpelihara, sejumlah 28,00 persen.

Q. Perpustakaan

Program pembinaan perpustakaan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase budaya baca dan literasi masyarakat, sebesar 55,00%.

R. Kearsipan.

1. Program pengelolaan arsip.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase perangkat daerah, kelurahan dan pekon yang telah menerapkan arsip sesuai standar, sebesar 10,70%.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Arsip Yang diselamatkan dan terpelihara, sebesar 78,00%.

5.2.3. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan.

A. Kelautan dan Perikanan.

1. Program pengelolaan perikanan budidaya.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton), sebesar 12.850 ton.

2. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Peningkatan Pasca Panen Perikanan, sebesar 5,25%.

B. Pariwisata

1. *Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah kunjungan wisatawan, sejumlah 50.000 orang.

2. *Program pemasaran pariwisata.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya, yaitu sejumlah 6 promosi.

3. *Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu jumlah pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif, yaitu sejumlah 10.

C. Pertanian

1. *Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu produksi padi per tahun, sebesar 126.257 ton; jumlah produksi jagung, sebesar 38.352 ton; Jumlah produksi bawang merah (kuintal), sebesar 3.341 kuintal; Jumlah produksi kakao (ton), sejumlah 2.933 ton; dan Jumlah produksi tembakau (ton), sebesar 98 ton.

2. *Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Rasio pembangunan prasarana pertanian, dengan nilai 1,02.

3. *Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Jumlah ketersediaan Daging (ton), sejumlah 4.033 ton; Jumlah ketersediaan Telur (ton), sebesar 8.244 ton; Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali), sejumlah 5.275 kali; dan Jumlah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner (kali) dengan jumlah 4.235.

4. *Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase lahan yang mendapat pengendalian dan pananggulangan bencana pertanian, sebesar 74,00%.

5. *Program penyuluhan pertanian.*

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan penyuluhan kelompok tani (%) 82,39%.

D. Perdagangan.

1. *Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan sarana pasar daerah yang sehat, 7 pasar.
2. *Program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Pemantauan Ketersediaan dan Harga Kebutuhan Pokok, 7 pasar.
3. *Program standarisasi dan perlindungan konsumen.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Alat Ukur Takar Timbangan Dan Perlengkapannya, 90,00%.
4. *Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan produk dalam negeri sebesar 4.

E. Perindustrian.

1. *Program perencanaan dan pembangunan industri.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan IKM yang mendapatkan pemberdayaan, pelatihan & bantuan sarana dan prasarana, 9 IKM.
2. *Program Pengendalian Izin Usaha Industri*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Bina perindustrian, 73 Industri.
3. *Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Cakupan Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten, 9 Data Industri.

F. Transmigrasi

Program pembangunan kawasan transmigrasi.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase penempatan transmigran, sebesar 60,00.

5.2.4. Program dan Kegiatan Urusan Penunjang.

A. Sekretariat Daerah.

1. *Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024, Persentase pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yaitu 80,00%.
2. *Program perekonomian dan pembangunan.*
Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase pelaku perekonomian dan pembangunan yang taat kebijakan, sebesar 65,00%.

B. Sekretariat DPRD

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase dukungan terhadap peran legislatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan 90,00%.

C. Perencanaan.

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan, sebesar 97,78%, dan cakupan indikator kinerja PD yang dievaluasi sebesar 97,78%.

2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah 97,85%; dan Persentase Keselarasan Sasaran Perangkat Daerah sebesar 97,80%.

D. Keuangan

1. Program pengelolaan keuangan daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 72,50%.

2. Program pengelolaan barang milik daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Prosentase Capaian Indeks Pengelolaan Aset Daerah sebesar 92,00%.

3. Program pengelolaan pendapatan daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu prosentase Realisasi Pajak Daerah (96,75%); dan Persentase Realisasi Retribusi Daerah (75,25%).

E. Kepegawaian

1. Program kepegawaian daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Pengelolaan Kinerja, Penghargaan dan Pembinaan Disiplin ASN sebesar 100,00%; Kebutuhan dan Pengadaan ASN sebesar 100,00%; Persentase Validitas Data ASN sebesar 100,00%; Persentase keterisian jabatan struktural & fungsional sesuai dengan kompetensi sebesar 100%; Persentase Pelayanan proses mutasi, laporan peningkatan pendidikan, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sebesar 100,00%.

F. Pendidikan dan pelatihan

Program pengembangan sumber daya manusia.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional sebesar 100,00%; Persentase ASN yang telah mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan sebesar 100,00%.

G. Penelitian dan pengembangan

Program Penelitian dan pengembangan daerah.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Inovasi Perangkat Daerah (100,00%)

H. Pengawasan

1. Program penyelenggaraan pengawasan.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Penyelenggaraan Pengawasan (100%).

2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Fokus kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2024 yaitu Persentase Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi (100,00%)

Tabel 5.02
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1 1	Pendidikan	4	13	55	393.893.959.372
1 1 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	13	55	393.893.959.372
1 2	Kesehatan	5	24	88	194.876.942.460
1 2 01	Dinas Kesehatan	5	24	88	194.876.942.460
1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	23	67	98.164.097.803
1 3 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	12	23	67	98.164.097.803
1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3	4	9	2.751.399.000
1 4 01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	3	4	9	2.769.249.000
1 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	22	53	19.651.608.643
1 5 01	Satuan Polisi Pamong Praja	2	10	33	14.249.342.719
1 5 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	12	20	5.402.265.924
1 6	Sosial	5	14	36	6.764.970.059
1 6 01	Dinas Sosial	5	14	36	6.764.970.059

Kodeifikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
2 7	Tenaga Kerja	4	9	16	3.290.030.315
2 7 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4	9	16	3.290.030.315
2 8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	18	34	5.404.352.024
2 8 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	18	34	5.404.352.024
2 9	Pangan	5	13	33	4.455.668.722
2 9 01	Dinas Ketahanan Pangan	5	13	33	4.455.668.722
2 10	Pertanahan	1	1	1	
2 10 06	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	13.699.000
2 10 10	Sekretariat Daerah	1	1	1	13.699.000
2 11	Lingkungan Hidup	7	15	31	7.109.641.407
2 11 01	Dinas Lingkungan Hidup	7	15	31	7.109.641.407
2 12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	5.702.284.108
2 12 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	12	24	5.702.284.108
2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	11	46	7.907.946.343
2 13 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5	11	46	7.907.946.343
2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	7.234.665.150
2 14 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	16	7.234.665.150
2 15	Perhubungan	2	15	39	14.778.513.472
2 15 01	Dinas Perhubungan	2	15	39	14.778.513.472
2 16	Komunikasi dan Informatika	3	10	26	8.840.732.231
2 16 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	10	26	8.840.732.231
2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5	10	20	6.411.600.000
2 17 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	5	10	20	6.411.600.000
2 18	Penanaman Modal	6	12	28	6.308.349.488
2 18 01	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal	6	12	28	6.308.349.488
2 19	Kepemudaan dan Olahraga	4	14	28	6.962.530.779
2 19 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4	14	28	6.962.530.779
2 20	Statistik	1	1	1	200.203.000
2 20 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	200.203.000
2 21	Persandian	1	2	5	13.949.500
2 21 01	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	2	5	13.949.500
2 22	Kebudayaan	2	4	5	760.143.000
2 22 01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2	4	5	760.143.000
2 23	Perpustakaan	2	10	22	3.479.679.819
2 23 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	10	22	3.479.679.819
2 24	Kearsipan	2	3	4	185.324.100
2 24 01	Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah	2	3	4	185.244.100

Kodefikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
3	URUSAN PILIHAN				
3 25	Kelautan dan Perikanan	3	14	30	4.518.775.757
3 25 01	Dinas Perikanan	3	14	30	4.518.775.757
3 26	Pariwisata	3	4	6	824.609.000
3 26 01	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3	4	6	824.609.000
3 27	Pertanian	6	24	60	16.239.720.202
3 27 01	Dinas Pertanian	6	24	60	16.239.720.202
3 28	Kehutanan				
3 29	Energi dan Sumber Daya Mineral				
3 30	Perdagangan	4	4	6	1.504.689.740
3 30 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	4	4	6	1.504.689.740
3 31	Perindustrian	3	3	5	2.309.000.000
3 31 01	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	3	3	5	2.309.000.000
3 32	Transmigrasi	1	1	3	100.000.000
3 32 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	3	100.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG				
4 1	Sekretariat Daerah	3	20	66	44.694.521.421
4 1 01	Sekretariat Daerah	3	20	66	44.694.521.421
4 2	Sekretariat DPRD	2	17	73	54.812.306.578
4 2 01	Sekretariat DPRD	2	17	73	54.812.306.578
5	UNSUR PENUNJANG				
5 1	Perencanaan	3	15	54	9.386.485.846
5 1 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	15	54	9.386.485.846
5 2	Keuangan	5	20	98	237.452.950.542
5 2 02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	67	227.667.887.923
5 2 03	Badan Pendapatan Daerah	2	7	31	9.785.062.619
5 3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3	13	33	9.168.477.241
5 3 01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	13	33	9.168.477.241
5 4	Penelitian dan Pengembangan	1	2	6	690.831.150
5 4 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	6	690.831.150
6	UNSUR PENGAWASAN				
6 1	Inspektorat	3	11	29	14.178.903.507
6 1 01	Inspektorat Kabupaten	3	11	29	14.178.903.507
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
7 1	Kecamatan	53	101	198	28.069.584.443
7 1 01	Kecamatan Pringsewu	5	11	22	10.186.130.337
	Kecamatan Gadingrejo	6	13	27	2.726.635.689
	Kecamatan Pagelaran	6	12	23	2.246.227.629
	Kecamatan Banyumas	6	9	15	2.143.916.954
	Kecamatan Sukoharjo	6	11	21	2.348.286.269
	Kecamatan Adiluwih	6	11	23	2.324.176.644

Kodeifikasi Organisasi	Urusan / OPD	Jumlah			Pagu Indikatif
		Prog.	Keg.	Sub Keg	
	Kecamatan Pagelaran Utara	6	12	23	1.841.118.917
	Kecamatan Ambarawa	6	11	23	1.952.182.815
	Kecamatan Pardasuka	6	11	21	2.300.909.190
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8 1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	26	30.044.912.685
8 1 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	26	30.044.912.685
JUMLAH		198	528	1380	1.259.157.457.638

Tabel 5.03
Dukungan Program dan Kegiatan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2024

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1. Peningkatan Ketahanan Perekonomian Daerah					
a. Peningkatan kualitas produksi dan distribusi hasil UMKM	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	399.114.000	Sekretariat Daerah
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	188.694.000	Sekretariat Daerah
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	204.640.000	Sekretariat Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	Sekretariat Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	Sekretariat Daerah
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	102.556.000	Sekretariat Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	101.811.000	Sekretariat Daerah
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	700.000.000	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.135.197.578	Dinas Perhubungan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	50.000.000	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	26.340.000	Dinas Perhubungan
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Dinas Perhubungan
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	175.000.000	Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	116.910.000	Dinas Perhubungan
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.400.000	Dinas Perhubungan
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	13.430.000	Dinas Perhubungan
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	5.000.000	Dinas Perhubungan
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	17.985.000	Dinas Perhubungan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	198.388.500	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7.675.000	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	523.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	70.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	811.689.470	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	128.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	121.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	102.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	96.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	246.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	173.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	63.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.003.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	33.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.037.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	115.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	184.083.900	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	105.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	209.574.475	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
b. Peningkatan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	155.009.500	Dinas Ketahanan Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
c. peningkatan iklim berusaha dan investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	96.346.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	60.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	385.586.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	26.592.488	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150.085.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.667.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	184.444.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	386.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
d. Peningkatan Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	131.732.000	Dinas Pertanian
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	164.254.000	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	148.135.287	Dinas Pertanian
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12.160.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	10.610.000	Dinas Pertanian
			Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	22.950.000	Dinas Pertanian
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	51.150.000	Dinas Pertanian
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	22.680.000	Dinas Pertanian
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	87.000.000	Dinas Pertanian
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	9.450.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	19.000.000	Dinas Pertanian
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	41.330.000	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.700.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2.700.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.700.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	-	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	2.700.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	2.700.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	34.500.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2.700.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	398.936.202	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	26.325.000	Dinas Pertanian
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	7.500.000	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	108.170.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	16.350.000	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	250.000.000	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	7.750.000	Dinas Pertanian
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	25.321.000	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	11.475.000	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	114.584.000	Dinas Pertanian
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	62.163.000	Dinas Pertanian
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.550.000	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	231.917.000	Dinas Pertanian
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	5.950.000	Dinas Pertanian
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	191.905.000	Dinas Pertanian
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	5.225.000	Dinas Pertanian
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah LapangKelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	5.325.000	Dinas Pertanian
e. Peningkatan Produksi Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yangUsahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan TeknologiSederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	35.000.000	Dinas Perikanan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	32.500.000	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	Dinas Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.000.000	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perikanan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Perikanan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.000.000	Dinas Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	Dinas Perikanan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perikanan
2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia					
a. Meningkatnya kualitas kualitas pendidikan dan kesehatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	390.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	255.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	195.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.157.361.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	638.355.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	20.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	79.375.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	35.868.842.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	630.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	48.195.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	153.822.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	59.834.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.235.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.617.819.240	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	485.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	250.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.674.760	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	88.500.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	30.060.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Sekolah Menengah Pertama		
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.596.158.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	128.740.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	43.023.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	22.668.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	77.433.600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.015.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	84.394.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.694.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	47.405.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	696.960.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	728.316.000,	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Rumah Sakit	0	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	43.567.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.096.368.295	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.650.419.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.023.730.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin	2.022.066.998	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.812.829.000,	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	877.400.500	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	396.966.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	115.096.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	844.028.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	353.600.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.061.213.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	574.343.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	129.760.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	62.120.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	170.850.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	973.967.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	175.855.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	13.674.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.542.024.900	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	96.232.800	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	540.630.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	258.558.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	31.012.200	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	263.741.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	191.165.500	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	13.032.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	275.331.100	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.151.208.100	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	16.734.902.700	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14.158.000	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	62.800.000.000	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Puskesmas	18.200.000.000	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.146.397.000	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	97.900.000	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6.000.000	Dinas Kesehatan
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	40.735.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	89.310.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.860.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	108.180.000	Dinas Kesehatan
					Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4.675.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.095.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.148.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	6.146.000	Dinas Kesehatan
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10.920.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.700.000	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.980.000	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.397.000	Dinas Kesehatan
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	9.240.000	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.632.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	24.230.000	Dinas Kesehatan
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14.300.000	Dinas Kesehatan
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.100.000	Dinas Kesehatan
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	21.196.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	9.840.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.950.000	Dinas Kesehatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	8.000.000	Dinas Kesehatan
		Rumah Tangga	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	8.000.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	199.610.000	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.428.613.100	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39.420.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	112.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	23.125.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengembangan Bahan Pustaka	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	27.372.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	21.065.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
b. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan, dan perlindungan anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	21.599.741	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	243.969.501	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	629.350.905	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan	33.348.696	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	63.403.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	741.199	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Daerah Kabupaten/Kota			Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.035.234,	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.094.886	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.148.962	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.792.673	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
d. Meningkatnya Kapasitas Kepemudaan, Prestasi Olahraga & Pelestarian Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	88.638.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	165.675.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	58.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	437.950.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	8.900.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	162.271.700,	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	115.047.113	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	110.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Pariwisata
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	1.135.200.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Pariwisata
3. Menurunkan kemiskinan ekstrim dan stunting					
a. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGAKERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	40.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelatihan Transmigrasi	10.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b. peningkatan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	340.478.750	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.540.000	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300.150.890	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	53.109.000	Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	49.500.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	42.720.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	60.560.000	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	30.000.000	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Rujukan	0	Dinas Sosial

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120.821.800	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.680.685.700	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	280.143.700	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	53.214.500	Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	10.000.000	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	10.000.000	Dinas Sosial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100.000.000	Dinas Sosial
e. Peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan kesetaraan gender	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	65.638.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan NonFormal	11.576.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Perumusan Parameter Kependudukan	12.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	11.576.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	49.901.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	2.340.611.022	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	26.581.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2.297.739.484	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	1.774.269.000	Dinas

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyuluhan KKBPK		Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	33.410.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	59.877.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	127.460.515	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	37.045.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55.390.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	146.859.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	256.669.000	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan					
a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	399.114.000	Sekretariat Daerah
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	188.694.000,	Sekretariat Daerah
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	204.640.000	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	95.096.000	Sekretariat Daerah
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	180.910.000	Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPembangunan	301.865.000	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan Pengadaan Barangdan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	49.662.500	Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	527.150.000	Sekretariat Daerah
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	191.554.000	Sekretariat Daerah
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,	102.556.000	

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			dan Perikanan		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	101.811.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	286.660.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	77.286.400,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	83.786.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	155.733.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	125.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penyusunan Pemerintahan Desa	183.642.400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	85.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	87.738.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	98.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	57.000.000	
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	332.903.750	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	197.091.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.00	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	59.818.300	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	53.532.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	51.973.800	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	20.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	116.221.050	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	BARANG MILIK DAERAH				Daerah
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	49.759.336	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6.787.848	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	8.249.450	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah	291.965.359	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah	45.865.152,	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	153.851.292	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	35.828.100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45.865.152	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	254.640.603	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kabupaten/Kota		Daerah
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	Kecamatan Pringsewu
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan	708.282.500	Kecamatan Pringsewu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.000.000	Kecamatan Pringsewu
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.000.000.000	Kecamatan Pringsewu
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.318.500.000	Kecamatan Pringsewu
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	6.650.000	Kecamatan Pringsewu
				19.600.000	Kecamatan Gadingrejo
				10.700.000	Kecamatan Pagelaran
				12.000.000	Kecamatan Banyumas
				16.830.000	Kecamatan Sukoharjo
				16.164.500	Kecamatan Adiluwih
				10.670.000	Kecamatan Pagelaran Utara
				13.953.500	Kecamatan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Ambarawa
				10.300.000	Kecamatan Pardasuka
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	339.872.871	Semua OPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	444.834.123	Semua OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	583.958.638.914	Semua OPD
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	21.731.395.951	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	202.270.000	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	303.586.597	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5.000.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD	5.000.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	472.585.422	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	105.500.000	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.488.000	Dinas Sosial
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.204.552.317	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	532.165.960	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.000.000	Dinas Perhubungan & Sekretariat DPRD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.329.790.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				610.638.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4.437.840.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22.566.000	Sekretariat Daerah
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.135.000	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	46.350.000	Sekretariat Daerah
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	590.000.000	Sekretariat Daerah
	b. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	55.395.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	41.870.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	159.379.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	46.887.200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	558.417.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	110.415.800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	10.390.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	277.138.600	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	47.652.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	12.570.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.282.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.956.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.175.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	511.841.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.003.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.638.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11.638.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Koordinasi Perencanaan BidangPerekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	135.475.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	256.800.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan HarmonisasiPerencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	208.950.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.560.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	7.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	8.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.097.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.399.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	8.313.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	8.732.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	936.061.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.253.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	8.732.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	178.254.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	55.015.250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	161.365.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	218.237.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	69.536.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	150.404.400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	36.273.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	282.549.596	Badan Pendapatan Daerah
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	110.000.000	Badan Pendapatan Daerah
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	135.852.669	Badan Pendapatan Daerah
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	290.249.716	Badan Pendapatan Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.100.000.000	Badan Pendapatan Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	160.502.689	Badan Pendapatan Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	85.832.189	Badan Pendapatan Daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	8.893.500	Badan Pendapatan Daerah
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	181.244.690	Badan Pendapatan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	183.835.300	Badan Pendapatan Daerah
			Penagihan Pajak Daerah	890.347.119	Badan Pendapatan Daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10.360.020	Badan Pendapatan Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	218.485.187	Badan Pendapatan Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	136.208.688	Badan Pendapatan Daerah
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	110.000.000	Badan Pendapatan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	49.478.055	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.531.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	16.774.890	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	16.774.890	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	58.319.623	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	58.319.623	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	502.575.425	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	481.363.163	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	48.894.780	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	160.420.700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.028.102	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	39.442.645	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9.030.560	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan	29.407.813	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	41.979.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	113.973.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	55.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	362.164.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	39.129.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	110.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	89.443.200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.064.808	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	100.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	183.886.021.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.250.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.624.325.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.290.000	Kecamatan Gadingrejo
				14.354.000	Kecamatan Pagelaran
				8.789.000	Kecamatan Banyumas
				12.909.000	Kecamatan Sukoharjo

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				17.600.000	Kecamatan Pagelaran Utara
				21.505.000	Kecamatan Ambarawa
				25.000.000	Kecamatan Pardasuka
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.100.000	Kecamatan Adiluwih
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.800.000	Kecamatan Pagelaran
				15.000.000	Kecamatan Banyumas
				14.529.800	Kecamatan Pardasuka
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.830.000	Kecamatan Sukoharjo
				12.375.000	Kecamatan Adiluwih
				15.884.000	Kecamatan Ambarawa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	259.619.818	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	196.456.750	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	53.760.000	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	133.970.091	Semua OPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	48.010.000	Semua OPD
c. Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.168.500.000	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	37.500.000	Inspektorat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	604.421.000	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	99.158.000,	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.430.000	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis diBidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	780.310.000	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang FasilitasiPengawasan	302.900.000	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi	230.700.000	Inspektorat
	d. Peningkatan Kualitas PelayananPublik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	216.466.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				132.495.000	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				290.942.000	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.402.231.000	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	387.630.000	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian KinerjaTerkait Kesejahteraan Masyarakat	0	Sekretariat Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	306.235.000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Bantuan Hukum	441.223.000	Sekretariat Daerah
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	272.712.000	Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	87.625.000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0	Sekretariat Daerah
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	39.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa PentingTerkait Pencatatan Sipil	39.300.000	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada PemangkuKepentingan dan Masyarakat	58.985.000	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan ProyeksiKependudukan serta Kebutuhan yang Lain	41.648.000	Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil
	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	25.520.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	110.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antarDesa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalamKabupaten/Kota	19.899.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					dan Pekon
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan PendayagunaanKelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.089.768.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.143.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	197.268.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	160.536.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	153.527.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	89.403.977	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	426.474.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	178.443.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	355.616.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelayanan Informasi Publik	143.520.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media danKemitraan Komunitas	1.816.890.000	Dinas Komunikasi danInformatika
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	378.541.000	Dinas Komunikasi danInformatika
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.563.640.500	Dinas Komunikasi danInformatika
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	172.684.500	Dinas Komunikasi danInformatika
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu SatuPintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	26.592.488	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	150.085.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.667.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	184.444.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	386.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program, Pembentukan Peraturan Daerah	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.291.743.000	Sekretariat DPRD
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	100.000.000	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	5.000.000	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	414.589.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	414.589.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan APBD	371.739.000	Sekretariat DPRD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pembahasan APBD Perubahan	371.875.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Laporan Semester	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	401.030.000	Sekretariat DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10.000.000	Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pendalaman Tugas DPRD	3.176.874.000	Sekretariat DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	601.950.000	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	195.226.600	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	474.898.000	Sekretariat DPRD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.211.618.000	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Program Kerja DPRD	184.760.000	Sekretariat DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.125.096.000	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	218.957.500	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Reses	1.191.920.000	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengawasan Kode Etik DPRD	272.737.000	Sekretariat DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	5.000.000	Sekretariat DPRD
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.781.838.338	Sekretariat DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	55.595.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.033.859.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	229.000.000	Sekretariat DPRD
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	10.000.000	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	590.845.097	Semua OPD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.004.297.740	Semua OPD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	257.500.000	Sekretariat Daerah
				171.469.670	Sekretariat DPRD
				82.500.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Daerah
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.936.329.281	Semua OPD
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.701.973.045	Semua OPD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.047.777.307	Semua OPD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.974.050.260	Semua OPD
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000	Sekretariat Daerah
				154.500.000	Sekretariat DPRD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	Sekretariat Daerah
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Sekretariat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	776.910.800	Semua OPD
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Sekretariat Daerah
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.500.000	Sekretariat Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	321.360.000	Sekretariat Daerah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	543.428.000	Semua OPD
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	Sekretariat DPRD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	952.608.000	Semua OPD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	353.236.500	Semua OPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	516.287.394	Semua OPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	Dinas Pertanian
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	137.115.000	Sekretariat Daerah
				6.650.000	Kecamatan Pringsewu
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	134.650.000	Sekretariat Daerah
				1.115.000	Dinas Perhubungan
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	Sekretariat Daerah
				19.701.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	Sekretariat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	236.000	Dinas Kesehatan
				1.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.074.513.650	Semua OPD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000	Badan Penanggulangan Bencana
				30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				11.000.000	Sekretariat Daerah
				76.970.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1.800.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.552.992.500	Semua OPD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.325.812.166	Semua OPD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.168.511.092	Semua OPD
			Pemeliharaan Mebel	55.000.000	Sekretariat Daerah
				10.000.000	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	210.872.947	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.650.000	Kecamatan Pagelaran
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	531.597.000	Semua OPD
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	Sekretariat DPRD

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				38.500.000	Sekretariat Daerah
				9.300.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				23.639.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				22.050.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana
				27.280.000	Dinas Sosial
				21.802.000	PPPP dan KB
				209.000.000	Sekretariat Daerah
				62.298.546	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				21.846.000	Dinas Komonikasi dan informatika
				20.000.000	Sekretariat DPRD
				3.300.000	Kecamatan Ambarawa
				21.571.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.133.850.169	Semua OPD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.253.908.000	Sekretariat Daerah
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0	Sekretariat Daerah
e. Terwujudnya aparatur yang kompeten dan profesional	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	933.548.562	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	67.696.969	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Data Kepegawaian	55.333.865,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.640.657	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	99.291.570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	79.669.215	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Promosi ASN	1.050.681.655	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.838.860.816	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Daya Manusia
			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	38.941.614	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	38.214.450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	186.706.355	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	109.345.616	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	71.287.920	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	126.214.942	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	56.720.950	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	280.250.00	Satuan Polisi Pamong Praja
				65.000.000	BPBD
				28.070.000	Sekretariat Daerah
				110.000.000	Dinas Perhubungan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.247.896.250	Semua OPD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				21.912.000	Dinas Kesehatan
				29.568.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
					Perumahan Rakyat
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	Sekretariat Daerah
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.340.000	Dinas Kesehatan
				0	Sekretariat Daerah
				4.545.926	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	Dinas Kesehatan
				20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				0	Sekretariat Daerah
				0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				88.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				96.222.554	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	72.100.000	Sekretariat Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Perundang-Undangan	62.557.264,	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Penataan Organisasi		
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	193.364.000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	176.185.000	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	124.775.500	Sekretariat Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	31.188.500	Sekretariat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	99.070.000	Sekretariat Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	262.318.000	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	246.660.000	Sekretariat Daerah
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	289.095.000	Sekretariat Daerah
5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup					
a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan ibukota kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantaipada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Sistem Informasi Penataan Ruang	94.960.300	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	221.736.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c. Peningkatan sarana da prasarana Perumahan dan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13.921.949.812	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	536.778.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	278.802.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.222.346.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	6.932.956.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	52.212.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	52.212.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	52.212.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	48.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	698.845.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	40.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	258.707.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	162.698.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	254.149.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	196.114.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.178.820.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.522.832.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pembangunan Jalan	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Rekonstruksi Jalan	30.018.952.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pemeliharaan Rutin Jalan	4.163.442.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Jembatan	3.945.774.840	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Rehabilitasi Jembatan	461.842.268	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.073.205.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	49.604.310	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	288.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPIPD/RPJMD	0	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	288.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	87.179.625	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	82.291.088	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	47.628.966	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.388.188	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	168.313.934	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	52.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.951.690	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	9.607.232	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	92.359.575	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	82.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PERSAMPAHAN		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	654.656.955	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	413.880.316	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	6.424.688	Dinas Lingkungan Hidup
6. Peningkatan Kualitas Tataan Sosial Masyarakat					
a. Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	65.795.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	39.929.500	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	37.414.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.604.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongprajadan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	91.323.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.337.500	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	6.750.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	61.340.000	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Bupati/Wali Kota	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.189.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	79.144.000	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	154.498.500	Satuan Polisi Pamong Praja
b. Meningkatkan stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman.	PROGRAM PENATAGUNAANTANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	13.699.000	Sekretariat Daerah
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Sekretariat Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	0	Sekretariat Daerah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	264.125.000	Kecamatan Pringsewu
				280.507.500	Kecamatan Gadingrejo
				213.000.000	Kecamatan Pagelaran
				158.707.000	Kecamatan Banyumas
				180.000.000	Kecamatan Sukoharjo
				162.000.000	Kecamatan Adiluwih
				164.000.000	Kecamatan Pagelaran Utara

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
				174.600.000	Kecamatan Ambarawa
				222.000.000	Kecamatan Pardasuka
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000	Kecamatan Ambarawa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	Kecamatan Pringsewu
				16.145.000	Kecamatan Gadingrejo
				11.515.000	Kecamatan Pagelaran
				10.037.000	Kecamatan Banyumas
				7.174.000	Kecamatan Sukoharjo
				15.094.500	Kecamatan Adiluwih
				7.550.000	Kecamatan Pagelaran Utara
				20.000.000	Kecamatan Ambarawa
				26.990.000	Kecamatan Pardasuka
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	99.999.900	Badan Kesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	677.061.482	Badan Kesbangpol

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	880.350.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.975.132.800	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	54.596.000	Badan Kesbangpol

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.999.900	Badan Kesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	28.461.000	Badan Kesbangpol
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	722.302.200	Badan Kesbangpol
c. Peningkatan Kualitas Tanggap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	12.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	30.751.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	30.175.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 2024	PROGRAM PENDUKUNG	KEGIATAN PENDUKUNG	SUB KEGIATAN PENDUKUNG	JML RENCANA PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	30.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan PemadamKebakaran	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYAPOLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	865.615.600	Badan Kesbangpol
JUMLAH				1.259.157.457.638	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai atau SMART untuk pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu *Pertama Spesifik*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama. *Kedua Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. *Ketiga Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi. *Keempat Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur. *Kelima, Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

IKU Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut IKU daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Penjabat Bupati Pringsewu, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah. IKU perangkat daerah yang mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan. IKU daerah maupun IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja dampak (*impact*) untuk mengukur tujuan dan sasaran RPD disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.01
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5
A	Indikator Tujuan			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57.01	63.01
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71.40	72.45
3	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Prosen	4.5-5.0	5.48
4	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Indeks	70.10	70.30
5	Indeks rasa aman	Indeks	0.083	0.062
B	Indikator Sasaran			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57.01	63.01
2	Nilai SAKIP	Nilai	70.01	74.01
3	Opini BPK RI	Opini	WTP	WTP
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.53	3.65
5	Indeks Pendidikan	Indeks	0.655	0.665
6	Indeks Kesehatan	Indeks	0.783	0.789
7	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.79	0.83
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54.00	57.00
9	Indekas Pembangunan Gender	Indeks	92.71	92.83
10	Angka Pengangguran Terbuka	Prosen	4.0-4,58	4.13
11	Pertumbuhan Ekonomi.	Prosen	4.5-5.0	5.48
12	Angka kemiskinan	Prosen	9,4-9.47	9.04
13	Gini Rasio.	Indeks	0.27-0.3	0.306
14	Indeks Daya Saing Daerah.	Indeks	3.58	3.98
15	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	Indeks	100	100
16	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman.	Indeks	0.76	1.52
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63.80	64.90
18	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	61.30	62.05
19	Indeks Resiko Bencana	Indeks	93.40	91.60

6.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Unsur Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Capaian kinerja makro tersebut meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan. Kemudian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Dalam penetapan target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; *Pertama* melihat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang telah dianalisis dimana telah dirumuskan secara runtut dalam kerangka tujuan dan sasaran pembangunan daerah. *Kedua* memetakan alat ukur keberhasilan urusan dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Alat ukur tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perumusan indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah terpilih. *Ketiga*, perumusan program pembangunan dalam mencapai keberhasilan. Nomenklatur program menggunakan nomenklatur yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan, disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6.02
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,5-5,0	5,48
2	Laju inflasi	Persen	2.50-3.00	2.50-3.00
3	Gini Ratio	Indeks	0,27-0,3	0,306
4	PDRB Per Kapita	Juta	29,20	30,10
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	71,40	72,45
6	Angka kemiskinan	Persen	9,4-9,47	9,04
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,0-4,58	4,13
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1.1	Indeks pendidikan	Indeks	0,652	0,657
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.84	9,14
1.3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,87	12,90
2	Kesehatan			
2.1	Indeks kesehatan	Indeks	0,783	0,789
2.2	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,87	71,27
2.5	Angka prevalensi stunting	Persen	3,50	3,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah	Persen	100	100
3.2	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	77	85
3.3	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	81.50	87.00
3.4	Prosentase Cakupan Layanan Air Limbah	Persen	93.00	100.00
3.5	Rasio Konektivitas Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Km	417.2	451
3.6	Prosentase Gedung Negara yang terpelihara dengan baik	Persen	82	87
3.7	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Persen	37.82	39.82
4	Perumahan Rakyat dan Permukiman			
4.1	Persentase Penurunan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persen	0.76	1.52
4.2	Prosentase Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Yang Tertata	Persen	0.76	1.52
4.3	Prosentase Perumahan Sehat dan Aman Yang Dilengkapi Dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Persen	25.00	50.00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.			
5.1	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persen	49.17	51.35
5.2	Persentase penanganan gangguan K3	Persen	80.25	80.75
5.3	Tingkat Respon Time	Persen	100.00	100.00
6	Sosial			

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5
6.1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	46,00	52,00
6.2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Persen	62,00	62,50
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1.1	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	68,85	70,66
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,71	92,83
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	69,32	70,32
3	Pangan			
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	89,30	89,50
3.2	Prosentase penurunan daerah rawan pangan	Persen	13,00	15,00
4	Pertanahan			
4.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai penatagunaan tanah	Persen	93,00	94,00
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	63,35	63,40
5.2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,12	86,25
5.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	29,67	33,95
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	98,50	99,00
6.2	Prosentase Kepemilikan KTP El, Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	98,50	99,00
6.3	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Th), Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian	Persen	97,75	98,25
6.4	Prosentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data / Dokumen Kependudukan	Persen	80,00	90,00
6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks	81,50	83,50
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Cakupan pekon mandiri	Pekon	11	15
7.2	Cakupan pekon berkembang ke maju	Pekon	37	21
7.3	Cakupan pekon maju ke mandiri	Pekon	78	90
7.4	Prosentase Badan usaha milik pekon	Persen	55	70
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Angka ketergantungan penduduk	Rasio	46,35	46,20
8.2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Nilai	0,77	0,75
9	Perhubungan			
9.1	Prosentase penurunan titik rawan kecelakaan	Persen	78,75	80,85
9.2	Prosentase sarpras jalan yang berfungsi dengan baik	Persen	80,50	81,70
9.3	Prosentase Uji KIR Kendaraan	Persen	77,00	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik,	Indeks	60	65
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Jumlah Koperasi Aktif	Persen	101	111
11.2	Prosentase Peningkatan UMKM	Persen	0,5	0,5
12	Penanaman Modal			
12.1	Nilai investasi daerah	Rp. Milyar	5.415	6.552
12.2	Prosentase peningkatan nilai investasi	Persen	9,08	9,10
12.3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95,00	95,00
13	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,00	57,00
13.1	Jumlah atlit berprestasi	Atlit	25	30
14	Statistik			
14.1	Jumlah unit kerja pemanfaat data statistik sektoral	Unit Kerja	18	25
15	Persandian			
15.1	Cakupan Pengamanan Informasi	Persen	81,08	100
16	Kebudayaan			
16.1	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	Persen	51,75	53,25
17	Perpustakaan			
17.1	Indeks tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	29,00	37,00
17.2	Nilai pembangunan literasi masyarakat	Persen	5,20	5,60
18	Kearsipan			
18.1	Nilai pengawasan tata kelola kearsipan perangkat daerah, kelurahan dan pekon	Nilai	C	CC
C	Urusan Pilihan			
1	Perikanan dan Kelautan			
1.1	PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	4,85	4,95
1.2	Indeks berantai produksi perikanan budidaya	Indeks	104,04	104,29
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapi/th	28,46	29,61
2	Pariwisata			
2.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	50.000	60.000
3	Pertanian			
3.1	Kontribusi PDRB sektor pertanian	Persen	19,20	19,24
3.2	Indeks Pertanaman	Indeks	1,81	1,84
3.3	Produksi hasil peternakan (daging)	Ton	4.033	4.433
3.4	Produksi hasil peternakan (telur)	Ton	8.224	8.424
4	Perdagangan			
4.1	Nilai PDRB sektor Perdagangan	Persen	14,17	14,19
5	Perindustrian			
5.1	Kontribusi Industri terhadap PDRB	Persen	15,27	15,32
5.2	Prosentase Pertumbuhan Industri Kecil	Persen	0,2	0,2
6	Transmigrasi			
6.1	Prosentase warga transmigran yang produktif	Persen	50,00	50,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	Target Akhir 2026
1	2	3	4	5
D	Urusan Penunjang			
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	Persen	73,00	80,00
1.2	Capaian kinerja sasaran daerah	Persen	97,60	98,00
1.3	Capaian kinerja sasaran perangkat daerah	Persen	97,60	98,00
1.4	Keselaranan perencanaan pembangunan daerah	Persen	97,60	98,00
2	Keuangan			
2.1	Indeks tata kelola keuangan dan asset daerah	Persen	82,00	85,00
2.2	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Persen	72,50	75,50
2.3	Indeks pengelolaan asset daerah	Persen	91,50	94,50
2.4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	10,56	11,35
2.5	Prosentase peningkatan pajak daerah	Persen	11,00	13,00
2.6	Prosentase peningkatan retribusi daerah	Persen	1,00	2,00
3	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Indeks Sistem Merit	Point	0,6	0,6
3.2	Indeks Profesional ASN	Persen	34,3	41,3
4	Penelitian dan Pengembangan			
4.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	58,02	63,96
5	Pengawasan			
5.1	Nilai Maturitas SPIP	Level	3	3
5.2	Level APIP	Level	3	3
5.3	Prosentase Nilai SAKIP OPD yang bernilai baik	Persen	100	100
6	Pemerintahan Umum			
6.1	Cakupan Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur.	Indeks	100	100
2	Indeks Daya Saing Daerah.	Indeks	3.58	3.98
3	Indeks Resiko Bencana	Indeks	58.85	61.80
4	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Indeks	80.25	80.75
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57.01	63.01
6	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.53	3.65
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,80	64,90
8	Indeks SPBE	Indeks	3,10	3,60
9	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.79	0.83
10	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	61.30	62.05

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan bagian penting dalam rangka pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pringsewu merupakan penjabaran pelaksanaan dari RPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, RPJPD Kabupaten Pringsewu 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2024 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2024, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2024, mengacu pada analisis isu-isu strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan hingga tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta terwujudnya sinergeritas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

7.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran RKPD 2024 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. RKPD tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024. Kemudian berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Pelaksanaan semua kegiatan memerlukan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada

masing-masing perangkat daerah. Pelaksanaan tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pringsewu tahun 2023 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat antara lain:
 - a) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - c) Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - d) Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - e) Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024.
3. Tercipta sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Pusat; dan
4. Pelaksanaan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dapat berjalan efektif, jika senantiasa dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2024.

7.2. Kaidah-kaidah Pendanaan Pembangunan

Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD tahun 2024 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip diatas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan antara lain:

1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha;
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat guna efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam bentuk program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan dan komitmen dari DPRD bersama dengan masyarakat Kabupaten Pringsewu, selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental dan tekad, semangat, ketaatan dan keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH